

Analisis
**Penerimaan dan
Pengeluaran Publik**
Kabupaten Manokwari 2013



AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Publik ini dilaksanakan atas kerjasama AIPD-Australian Aid dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari

Pelaksana studi oleh Yayasan BaKTI Makassar dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua, Manokwari

Quality Assurance Team (QAT)-Yayasan BaKTI Makassar: Abdul Madjid Sallatu (team leader), Sultan Suhab (operation manager), Nursini (research manager), Agussalim (senior economist), Andi Tawakkal (PFM specialist), Andi Nixia Tenriawaru (sectoral specialist), Muhammad Ashry Sallatu (management officer), St. Asma, St. Marwah dan Adya Utami (finance and administration assistant)

Tim Peneliti: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua, Manokwari Provinsi Papua Barat.

Design and Layout: Syamsu Alam

Foto pada halaman sampul, foto pada Bab 1 sampai Bab 6 merupakan Hak Cipta @ Victor Rumere

**Analisis
Penerimaan dan Pengeluaran Publik
Kabupaten Manokwari 2013**

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



Acknowledgement

Laporan Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Publik/ *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) ini diterbitkan melalui kerjasama Yayasan BaKTI dengan Pemerintah Australia melalui Program Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD).

Disclaimer

Pandangan dan pendapat dalam laporan Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Publik/ *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) ini bersumber dari Yayasan BaKTI, dan tidak menggambarkan pandangan Pemerintah Australia.

Kata Pengantar

Direktur Program AIPD

Pemerintah Australia mendukung usaha Pemerintah Indonesia untuk memperkuat implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia, terutama melalui *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation* (AIPD). Program AIPD bertujuan untuk mendorong perbaikan layanan publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Pada tahun 2013 program AIPD bermitra dengan Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) telah melakukan analisis penerimaan dan pengeluaran publik dalam bentuk *laporan Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) di 20 kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Laporan PERA ini menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, audit, pengawasan eksternal, dan kerkaitannya dengan indikator-indikator pembangunan di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian. Laporan ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait perbaikan aspek pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pelayanan dasar dengan memperhatikan isu-isu strategis di Kabupaten Manokwari seperti kemiskinan, kesetaraan gender, dan HIV/AIDS.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kami kepada Tim Peneliti dari Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Universitas Negeri Papua (UNIPA) dan peneliti senior dari Universitas Hasanuddin – Yayasan BaKTI Makassar yang telah bekerja keras untuk terwujudnya laporan ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari yang berperan penting dalam mengarahkan dan memfasilitasi seluruh proses pembuatan laporan ini.

Kami mengharapkan bahwa laporan kajian PERA ini dapat berkontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Manokwari dan pemerhati keuangan dan pembangunan daerah demi terwujudnya perbaikan layanan publik melalui kebijakan penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di Kabupaten Manokwari.

Direktur Program



Jessica Ludwig-Maarooft

Kata Pengantar

Bupati Manokwari

Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat merupakan fokus utama dari Pemerintah Kabupaten Manokwari. Kesejahteraan mencakup pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Di usia ke-115 tahun, Kabupaten Manokwari masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan penyelesaian secara terpadu dan berkesinambungan. Berbagai upaya peningkatan perekonomian rakyat serta kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat telah dilakukan. Upaya-upaya ini telah membawa perubahan dalam kondisi kehidupan masyarakat seperti yang terukur melalui Indeks Pembangunan Manusia. Disadari bahwa perubahan belum terjadi secara menyeluruh dan dibutuhkan upaya-upaya perluasan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Manokwari.

Untuk melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Manokwari, dibutuhkan pembenahan dalam aspek pengelolaan keuangan daerah terlebih dahulu. Pembenahan pada aspek perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan anggaran akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya fiskal Kabupaten Manokwari untuk peningkatan perekonomian serta layanan kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Manokwari menyambut baik penyusunan dan penerbitan Laporan Kajian Pendapatan dan Belanja Publik di Kabupaten Manokwari. Hasil dan rekomendasi kajian ini sangat membantu pemerintah Kabupaten Manokwari dalam memperbaiki kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih untuk komitmen dan kerja keras yang telah dilakukan AIPD bersama DJPK Kementerian Keuangan RI dan Pemerintah Provinsi Papua Barat serta UNIPA dan Yayasan BaKTI dalam melakukan Kajian Pendapatan dan Belanja Publik serta memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari. Semoga publikasi ini dapat dijadikan salah satu referensi penting oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Manokwari, Desember 2013

BUPATI MANOKWARI



DR. Bastian Salabai, S.Th, M.A.M.Th

Daftar Isi

	Halaman
<i>Acknowledgement/ Disclaimer</i>	ii
Kata Pengantar Direktur Program AIPD	iii
Kata Sambutan Bupati Manokwari	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Singkatan	viii
Ringkasan Eksekutif	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Karakteristik Daerah	2
1.2. Kinerja Makro Ekonomi	3
1.3. Kinerja Pembangunan Sosial	6
1.4. Kesimpulan dan Rekomendasi	8
BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9
2.1. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	10
2.2. Analisis Perencanaan Dan Penganggaran	10
2.3. Analisis Pelaksanaan Anggaran: Manajemen Kas, Pengadaan, Manajemen Aset, Akuntansi dan Pelaporan	11
2.4. Analisis <i>Oversight</i> dan <i>Accountability</i>	14
2.5. Kesimpulan dan Rekomendasi	15
BAB III PENDAPATAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH	17
3.1. Gambaran Umum Pendapatan Daerah	18
3.2. Pendapatan Asli Daerah	19
3.3. Dana Perimbangan	21
3.4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23
3.5. Pembiayaan Daerah	24
3.6. Kesimpulan dan Rekomendasi	25
BAB IV BELANJA DAERAH	27
4.1. Gambaran Umum Belanja Daerah	28
4.2. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi	29
4.3. Belanja Daerah Menurut Sektor	30
4.4. Kesimpulan dan Rekomendasi	31
BAB V SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	33
5.1. Sektor Pendidikan	34
5.1.1. Belanja Sektor Pendidikan	34
5.1.2. Kinerja Keluaran dan Hasil Sektor Pendidikan	35
5.1.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	37
5.2. Sektor Kesehatan	38
5.2.1. Belanja Sektor Kesehatan	38
5.2.2. Kinerja Keluaran dan Hasil Sektor Kesehatan	39
5.2.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	40
5.3. Sektor Infrastruktur	41
5.3.1. Belanja Sektor Infrastruktur	41
5.3.2. Kinerja Keluaran dan Hasil Sektor Infrastruktur	42
5.3.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	42
5.4. Sektor Pertanian	43
5.4.1. Sub Sektor Tanaman Pangan	43
5.4.2. Kinerja Luaran dan Hasil Sektor Pertanian	45
5.4.3. Kesimpulan dan Rekomendasi Sektor Pertanian	46

BAB VI ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	47
6.1. Isu Kemiskinan	48
6.2. Isu Gender	50
6.3. Isu HIV/AIDS	51
6.5. Dana Otonomi Khusus	52
6.6. Kesimpulan dan Rekomendasi	56
Daftar Pustaka	57
Lampiran	59
Lampiran Matriks A Kesimpulan dan Rekomendasi	60
Lampiran Matriks B Master Tabel	63
Lampiran Matriks C Catatan Metodologi PERA	67

Daftar Gambar

Gambar. 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Manokwari	2
Gambar. 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Indonesia Tahun 2007-2011.	4
Gambar. 1.3. Struktur Perekonomian Kabupaten Manokwari Menurut Lapangan Usaha, 2007-2011.	4
Gambar. 1.4. Perkembangan PDRB riil perkapita Kabupaten dan Provinsi Papua Barat, 2007 – 2011	5
Gambar. 1.5. Inflasi di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Indonesia Tahun 2007-2011	5
Gambar. 1.6. Jumlah Penduduk di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat Thn. 2007-2011	6
Gambar. 1.7. Pertumbuhan Penduduk Balita dan Usia Pencari Kerja di Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011	6
Gambar. 1.8. TPAK Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat	7
Gambar. 1.9. Nilai IPM Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Indonesia tahun 2007-2011	7
Gambar. 2.1. Skor penilaian PKD	10
Gambar. 2.2. Skor Penilaian Kerangka Peraturan Perundangan.	11
Gambar. 2.3. Skor Penilaian Perencanaan dan Penganggaran.	11
Gambar. 2.3. Skor Penilaian Perencanaan dan Penganggaran.	11
Gambar. 2.4. Skor Penilaian Pelaksanaan Anggaran	12
Gambar. 2.5. Skor Penilaian Sistem Akuntansi dan Manajemen.	13
Gambar. 2.6. Skor Penilaian Pengolahan Aset Daerah.	14
Gambar. 3.1. Nilai dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Riil Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat	18
Gambar. 3.2. Pendapatan Daerah Riil Perkapita Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, Tahun 2007-2011	18
Gambar. 3.3. Perkembangan dan Postur Total Pendapatan Daerah Riil Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011	19
Gambar 3.4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari, Fakfak, Sorsel, Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011	19
Gambar. 3.5. Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011	20
Gambar. 3.6. Komposisi Sumber Retribusi Daerah Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011	21
Gambar. 3.7. Perolehan Dana Perimbangan Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011	21
Gambar. 3.8. Komposisi dan Porsi Dana Perimbangan Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011	22
Gambar. 3.9. Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011	22
Gambar. 3.10. Perkembangan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Manokwari, Thn. 2007-2011	23
Gambar. 3.11. Perkembangan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Manokwari, Thn. 2007-2011	23
Gambar. 3.12. Perkembangan Pembiayaan Daerah Riil (Surplus/Defisit) Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011 (dalam Rp miliar)	24
Gambar. 3.13. Perkembangan SiLPA dan Penggunaannya, serta Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011 (dalam Rp miliar)	24
Gambar. 4.1. Perkembangan Belanja Riil Kabupaten Manokwari, 2007-2011	28
Gambar. 4.2. Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Riil per Kapita Kabupaten Manokwari Tahun 2007-2011	28
Gambar. 4.3. Dana APBN yang dibelanjakan di Kabupaten Manokwari, 2011	29
Gambar. 4.4. Komposisi Belanja Riil Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Kabupaten Manokwari Tahun 2007-2011	29
Gambar. 4.5. Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, 2007-2011	30

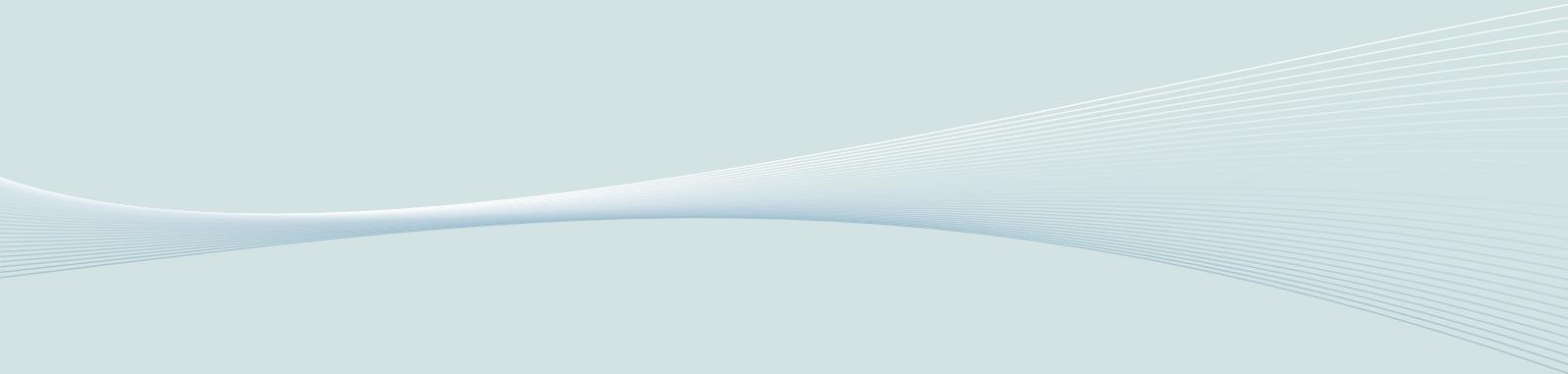
Gambar. 4.6.	Komposisi dan Perkembangan Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Sektoral Kabupaten Manokwari	31
Gambar. 5.1.	Perbandingan Belanja Pendidikan dengan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari	34
Gambar. 5.2.	Alokasi Belanja Pendidikan untuk Program Wajib belajar dan Program lainnya di Kabupaten Manokwari	34
Gambar. 5.3.	Komposisi Alokasi Belanja Riil Pendidikan di Kabupaten Manokwari	35
Gambar. 5.4.	Porsi Alokasi Belanja Riil Urusan Kesehatan di Kabupaten Manokwari	38
Gambar. 5.5.	Komposisi Alokasi dan Porsi Belanja Riil Urusan Kesehatan di Kabupaten Manokwari	38
Gambar. 5.6.	Pertumbuhan Jumlah Kasus Penyakit dan Komposisinya di Kabupaten Manokwari	40
Gambar. 5.7.	Belanja riil Infrastruktur dan Belanja Riil Daerah di Kabupaten Manokwari	41
Gambar. 5.8.	Komposisi dan Porsi Komponen Belanja Riil Infrastruktur di Kabupaten Manokwari	42
Gambar. 5.9.	Komposisi dan Porsi Komponen Kewenangan terhadap Jalan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Manokwari	42
Gambar. 5.10.	Porsi Belanja Sektor Pertanian Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Manokwari	43
Gambar. 5.11.	Komposisi dan Porsi Komponen Belanja riil Sektor Pertanian di Kabupaten Manokwari	44
Gambar. 5.12.	Perkembangan infrastruktur sektor pertanian di Kabupaten Manokwari	46
Gambar. 6.1.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011	48
Gambar. 6.2.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Manokwari Tahun 2007-2010	49
Gambar. 6.3.	Gini Rasio Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, Tahun 2007-2010	49
Gambar. 6.4.	Indeks Pemberdayaan dan Pembangunan Gender Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat tahun 2007-2010	50
Gambar. 6.5.	Jumlah Kasus KDRT di Kabupaten Manokwari Tahun 2007-2011	51
Gambar. 6.6.	Tren Pertumbuhan Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Manokwari Tahun 2007-2011	51
Gambar. 6.7.	Jumlah Dana Otonomi Khusus yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, Fakfak, Sorsel, Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat, Tahun 2007-2011	52
Gambar. 6.8.	Porsi Realisasi Dana Otsus Untuk Pendidikan di Kabupaten Manokwari, 2007-2011	53
Gambar. 6.9.	Realisasi Dana Otsus untuk Berbagai Program Pendidikan di Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011	53
Gambar. 6.10.	Nilai nominal dan Proporsi Dana Otsus Sektor Kesehatan di Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011	54
Gambar. 6.11.	Nilai Nominal dan Porsi Dana Otsus Untuk Sektor Infrastruktur di Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011	54
Gambar. 6.12.	Nilai Nominal dan Porsi Dana Otsus untuk Ekonomi Rakyat di Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011	55
Gambar. 6.13.	Alokasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten Manokwari Berdasarkan Bidang, Th. 2012	55

Daftar Tabel

Tabel. 1.1.	Luas dan Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Manokwari Tahun 2012.	3
Tabel. 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari Menurut Lapangan Usaha, 2008-2011.	4
Tabel. 1.3.	Indeks Komposit Pembentuk IPM Tahun 2010 dan 2011	7
Tabel. 2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Papua Barat, 2006-2011	15
Tabel. 3.1.	Komposisi Pajak Daerah Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011	20
Tabel. 4.1.	Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Sektoral di Kabupaten Manokwari	31
Tabel. 5.1.	Pencapaian Indikator Urusan Wajib Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Manokwari	35
Tabel. 5.2.	Pencapaian Indikator Urusan Wajib Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Manokwari	36
Tabel. 5.3.	Pencapaian Indikator Urusan Wajib Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manokwari, 2008-2011	36
Tabel. 5.4.	Pencapaian Indikator Urusan Wajib Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manokwari	37
Tabel. 5.5.	Sarana Penunjang Urusan Kesehatan dan Penduduk di Kabupaten Manokwari	39
Tabel. 5.6.	Rasio Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan, 2010-2011	39
Tabel. 5.7.	Indikator Capaian Pelayanan Kesehatan Tahun 2010-2011 di Kabupaten Manokwari	40
Tabel. 5.8.	Proporsi Alokasi Belanja pada Program Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Manokwari	44
Tabel. 5.9.	Proporsi Alokasi Belanja pada Program Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Manokwari	45
Tabel. 5.10.	Proporsi Alokasi Belanja pada Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Manokwari	45

Daftar Singkatan

APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD-P	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
APS	= Angka Partisipasi Sekolah
AMH	= Angka Melek Huruf
AKI	= Angka Kematian Ibu
AKB	= Angka Kematian Bayi
BOS	= Bantuan Operasional Sekolah
BOP	= Bantuan Operasional Pemeliharaan
BPK	= Badan Pemeriksa Keuangan
BPHTB	= Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DAU	= Dana Alokasi Umum
DPA SKPD	= Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah
GKG	= Gabah Kering Giling
HIV/AIDS	= <i>Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i>
IDG	= Indeks Pemberdayaan Gender
IHK	= Indeks Harga Konsumen
IPG	= Indeks Pembangunan Gender
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
KUA	= Kebijakan Umum APBD
LKPD	= Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
NTP	= Nilai Tukar Petani
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
PDB/PDRB	= Produk Domestik Bruto / Produk Domestik Regional Bruto
PEA	= <i>Public Expenditure Analysis</i>
PERA	= <i>Public Expenditure and Revenue Analysis</i>
PFM/PKD	= Public Finance Management / Pengelolaan Keuangan Daerah
PNPM	= Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PP	= Peraturan Pemerintah
PPK SKPD	= Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
Renja SKPD	= Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah
Renstra SKPD	= Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah
RKASKPD	= Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah
RKPD	= Rencana Kerja Pemerintah Daerah
PAUD	= Pendidikan Anak Usia Dini
RPJMD	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RT	= Rumah Tangga
SD/MI	= Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidayah
SDM	= Sumberdaya Manusia
SiLPA	= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
SKPD	= Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SMA/SMK/MA	= Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah
SMP/MTs	= Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah
SOP	= Standar Operasional Prosedur
SPM	= Standar Pelayanan Minimal
SBH	= Survey Biaya Hidup
SDA	= Sumber Daya Alam
TKPKD	= Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TPAK	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	= Tingkat Pengangguran Terbuka



Ringkasan Eksekutif

Berkembangnya Kabupaten Manokwari tidak lepas dari status yang dimiliki oleh kota Manokwari. Pertama, sebagai kota inil menjadi tempat dimana dimulainya peradaban orang Papua, yang ditandai dengan memperingati masuknya inil di tanah Papua dan diperingati setiap tahun oleh hampir semua penduduk Kristiani Papua dan dari luar Papua yang melakukan ibadah di Pulau Mansinam. Kedua, kota Manokwari sebagai ibu kota pemerintahan Provinsi Papua Barat. Kedua status ini menjadi daya dorong yang sangat kuat untuk berkembang. Dukungan Pemerintah pusat diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik monumen inil masuk pertama kali di tanah Papua ditempatkan di Pulau Mansinam. Disamping sebagai situs sejarah juga sebagai tempat wisata dari pengunjung dalam dan luar negeri, sehingga memberikan pengaruh terhadap perkembangan kota sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari cenderung melambat dan berfluktuatif, sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 bahkan berada di bawah Provinsi Papua Barat. Kelompok sektor tersier lebih mendominasi pembentukan nilai tambah selama lima tahun terakhir di Kabupaten Manokwari. Kontribusi sektor tersier terhadap total PDRB lebih tinggi dibandingkan dengan dua kelompok lainnya, walaupun berdasarkan data di lapangan usaha sektor pertanian memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya, namun memiliki *share* yang cenderung menurun hingga tahun 2011 yang mencapai 31,9 persen, sedangkan sektor sekunder cenderung stabil pada kisaran 21,0 persen. Makin bertambahnya kontribusi sektor tersier di Kabupaten Manokwari hingga mencapai 46,27 persen disebabkan wilayah Manokwari sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat sehingga jasa perdagangan, hotel, restoran dan jasa lainnya mengalami perkembangan sangat pesat karena disamping makin bertambahnya arus migrasi disertai juga dengan investasi jasa lainnya. Kondisi ini mengakibatkan terjadi peningkatan pengangguran terbuka menjadi 9,29 ditahun 2011

Pendapatan riil Kabupaten Manokwari berfluktuatif selama lima tahun. Hal ini disebabkan oleh sumber penerimaan dari dana perimbangan yang berfluktuasi karena dalam kurun waktu tersebut terjadi pemekaran wilayah atau penambahan daerah otonom baru baik provinsi maupun kabupaten di seluruh Indonesia sehingga mempengaruhi akan pengalokasian pendapatan di setiap daerah. Beberapa tindakan apresiasi yang terkait dengan peningkatan PAD seperti: perluasan basis penerimaan PAD melalui pembayar pajak/retribusi dan menjaring wajib pajak/retribusi baru, meningkatkan basis data obyek pajak/retribusi, penilaian kembali (*appraisal*) atas obyek pajak/retribusi; pengendalian atas kebocoran pendapatan dari pajak dan retribusi melalui audit pendapatan baik rutin maupun insidental, perbaikan sistem akuntansi penerimaan daerah, peningkatan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pungutan liar; serta melakukan pengkajian akademik terhadap penyebab menurunnya penerimaan PAD .

Peningkatan belanja riil Kabupaten Manokwari disebabkan oleh bertambahnya belanja tidak langsung selama kurun waktu 5 tahun Belanja modal mendominasi belanja riil walaupun mengalami penurunan selama periode 2007-2011. Belanja operasional di dominasi oleh belanja pegawai yang mencapai 51 persen sedangkan belanja modal didominasi oleh belanja gedung dan bangunan yang mencapai 41persen. Alokasi belanja riil terbesar adalah pemerintahan umum dan pendidikan. Selama lima tahun rata-rata yang dialokasikan untuk urusan pemerintahan sebesar 35 persen, urusan pendidikan 20 persen dan kesehatan 7,6 persen, sedangkan pekerjaan umum dan pertanian masing-masing 13,6 persen dan 2,9 persen. Kondisi belanja sektoral seperti ini belum konsisten dengan prioritas pembangunan daerah, yang menempatkan pertanian sebagai *leading sector* dan pendidikan, kesehatan sebagai prioritas utama. Belanja sektoral belum mampu mencerminkan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD. Belanja pertanian yang merupakan salah satu sektor prioritas sangat kecil kontribusi belanjanya bahkan semakin berkurang. Perencanaan penganggaran yang mengacu pada RPJMD akan memberikan fokus kepada sektor pertanian sehingga sebagai *leading sector* akan memberikan dampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat.

Sektor strategis pendidikan dengan dominasi belanja pegawai termenunjukkan bahwa rasio guru dengan murid pada setiap tingkatan dapat dikatakan cukup ideal walaupun belum memenuhi standar indikator SPM. Rasio guru dengan murid menunjukkan ke arah perbaikan. Bantuan langsung untuk anak sekolah melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) bersumber dari (APBN) dan bantuan operasional pendidikan (BOP) bersumber dari (APBD). Dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dan menurunkan angka putus sekolah, maka capaian yang diperoleh sesuai target SPM, masih perlu dilakukan pembenahan pada semua jenjang pendidikan.

Porsi Alokasi belanja pegawai yang mendominasi mengalami penurunan seiring dengan menurunnya alokasi belanja sektor kesehatan. Melalui program perbaikan sarana dan prasarana pendukung kesehatan

belum mampu mengimbangi jumlah penduduk dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan penduduk. Kendati ada upaya perbaikan kesehatan bagi masyarakat secara umum melalui peningkatan kinerja terutama ditinjau dari pelayanan terhadap kesehatan Ibu dan Anak.

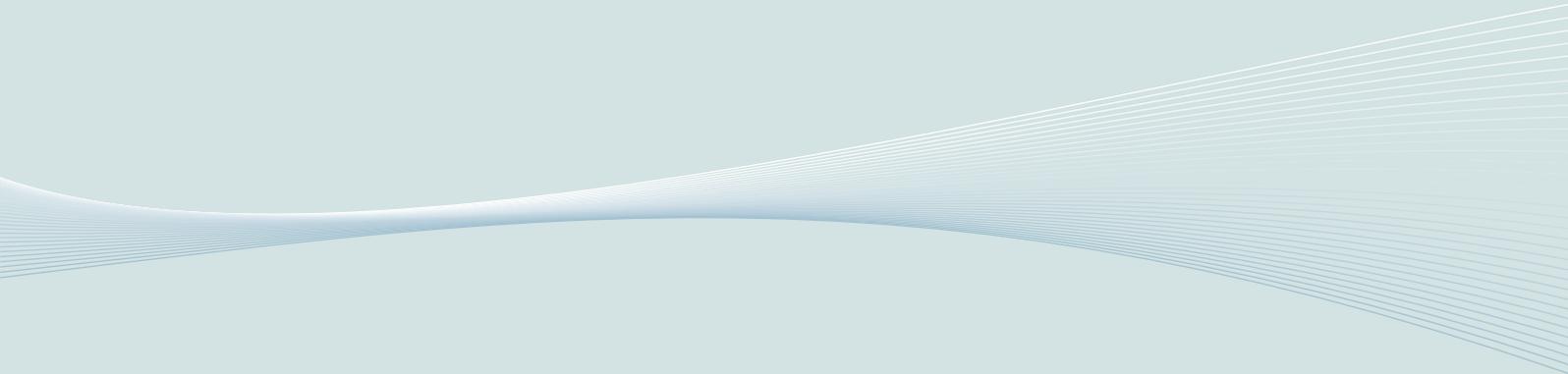
Belanja modal mendominasi sektor infrastruktur, walaupun porsinya mengalami penurunan. Secara umum kondisi jalan di Kabupaten Manokwari berdasarkan kewenangan Pemda Manokwari belum menunjukkan kondisi perbaikan, hal ini perlu mendapat perhatian khusus agar pembukaan jalan dengan permukaan tanah senantiasa dapat menunjang akan perekonomian masyarakat secara merata. Sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah, maka diperlukan perencanaan dan metode valuasi yang lebih memadai mengenai seberapa besar belanja yang harus dialokasikan (misalnya irigasi dan jalan menuju sentra produksi pertanian dan pemasaran) untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas sektoral lainnya seperti pertanian yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Manokwari.

Walaupun pertanian menjadi sektor unggulan penyumbang PDRB terbesar namun dukungan alokasi belanja mengalami penurunan hingga 2,6 persen dari penerimaan daerah dengan rata-rata alokasi belanja terbesar pada belanja pegawai. Sebagai *leading sector* sektor ini kurang mendapatkan kontribusi belanja yang memadai, terlebih dengan banyaknya program yang dilakukan, namun kurang memberikan respons terhadap peningkatan output pertanian karena selama 5 tahun terakhir menunjukkan kontribusi dari sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan perencanaan penganggaran terutama pada program peningkatan produksi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat lokal sehingga dari sisi pendapatan akan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan pada sisi output akan memberikan kontribusi terhadap *intermediate input* bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Pada aspek lainnya akan mengurangi impor komoditi pertanian di Kabupaten Manokwari, bahkan berpeluang ekspor sehingga akan memperbesar kontribusi nilai tambah terhadap output daerah.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Manokwari mencapai 37,28 persen lebih rendah dari Provinsi Papua Barat. Walaupun berada pada level bawah, namun selama lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan indeks kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan di Manokwari masih bertumpu pada program-program yang diimplementasikan oleh pemerintah secara nasional, terutama melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jika diamati, program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah dilakukan melalui dua skema utama, yaitu *pertama*, menurunkan atau memperkecil beban pengeluaran penduduk miskin. Skema ini muncul dalam bentuk pembebasan biaya (misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis), dan pemberian subsidi (misalnya, pupuk dan sarana produksi lainnya). *Kedua*, meningkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk miskin. Skema ini muncul terutama dalam bentuk pembangunan infrastruktur perdesaan (misalnya irigasi, pasar, jalan desa), penyediaan skim bantuan modal usaha. Inisiatif program pengentasan kemiskinan secara lokal oleh pemerintah daerah masih sangat terbatas. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui pembentukan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah pada tahun 2012 dan kegiatan tim ini masih dalam tahap penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Manokwari.

Alokasi dana otsus merupakan salah satu pendukung skema tersebut yang diarahkan pada empat pilar yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perekonomian masyarakat. Walaupun mengalami peningkatan nominal alokasi otsus namun realisasi penggunaan cenderung mengalami penurunan. Ada beberapa hal yang diperoleh yaitu Peningkatan alokasi dana otsus untuk pendidikan tidak sebanding dengan proporsi belanja untuk pendidikan selama lima tahun, fokus utama alokasi dana otsus untuk Pendidikan sebesar 43 melebihi dari ketentuan, program yang memperoleh dukungan dana terbesar yaitu program pembangunan jalan dan jembatan yang mencapai 61,2 persen.





1 PENDAHULUAN



1.1. Karakteristik Daerah

Kabupaten Manokwari terletak di sebelah utara kepala burung Pulau Papua. Kabupaten Manokwari memiliki luas $\pm 12.838 \text{ Km}^2$ dengan 29 distrik (Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari No. 4 Tahun 2004), dan dihuni oleh penduduk dari berbagai suku di Indonesia. Berkembangnya Kabupaten Manokwari tidak lepas dari status yang dimiliki oleh Kota Manokwari, baik sebagai Kota Injil maupun sebagai ibukota Provinsi Papua Barat. Sebagai Kota Injil, Manokwari menjadi tempat dimulainya peradaban orang Papua. Masuknya Injil di tanah Papua telah diperingati setiap tahun oleh hampir semua umat Kristiani, baik dari Papua maupun luar Papua. Dukungan pemerintah pusat diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik monumen Injil yang ditempatkan di Pulau Mansinam. Monumen tersebut telah menjadi situs sejarah dan objek wisata. Sebagai ibukota provinsi, Manokwari telah menjadi pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi dan bisnis. Kedua status ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Manokwari.

Gambar 1.1. Peta Administratif Kabupaten Manokwari



Sumber: RPJM Manokwari 2012.

Pemanfaatan lahan di Kabupaten Manokwari sangat bervariasi mulai dataran rendah hingga dataran tinggi. Saat ini sekitar 85,45 persen kawasan Kabupaten Manokwari masih belum termanfaatkan dan masih berbentuk hutan rimba dan semak belukar. Pemanfaatan lahan yang paling luas untuk aktivitas tegalan/ladang sebesar 4,89 persen. Tingkat kesuburan lahan terbatas pada tingkat kedalaman efektif tertinggi mencapai $\pm 25 \text{ cm}$, dan pada wilayah-wilayah pegunungan kapur kedalamannya $\pm 10 \text{ cm}$. Sebagian besar masyarakat asli Manokwari (Suku Arfak) masih menggunakan pola ladang berpindah untuk aktivitas pertanian, sedangkan untuk masyarakat non pribumi lebih menggunakan pola ladang menetap dan sebagian besar dari mereka berada di wilayah dataran rendah.

Tabel 1.1. Luas dan Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Manokwari Tahun 2012.

PenggunaanLahan	Luas (Ha)	%
Perairan	6,455.49	0.47
HutanRimba	1,171,262.41	85.45
Pasir/Bukit PasirLaut	2,028.86	0.15
Perkebunan/Kebun	17,893.65	1.31
PermukimanTempatKegiatan	7,564.90	0.55
Rawa	8,136.02	0.59
Sawah	3,266.69	0.24
Semakbelukar/ alang- alang	87,061.78	6.35
Tagalan/ladang	66,985.81	4.89
Jumlah	1,370,655.61	100

Sumber: RPJM Manokwari 2012.

Sesuai dengan kondisi alamnya, Kabupaten Manokwari merupakan penghasil beberapa jenis komoditas pertanian. Produksi padi sawah dalam bentuk gabah kering giling mencapai 23,733 ton, dengan sentra produksi padi tersebar di Distrik Masni, Prafi dan Oransbari. Produksi padi ladang mencapai 694 ton. Selain itu, juga terdapat produksi ubi kayu, ubi jalar, jagung, dan sayuran. Untuk tanaman perkebunan, potensi Kabupaten Manokwari, antara lain, kelapa sawit, kakao, kopi, cengkeh, kelapa dan pala. Tanaman kelapa sawit seluas 11.000 hektar yang dikelola oleh PTP Nusantara XII di Distrik Prafi, ±8.000 hektar dikelola oleh PT. Medco Hijau Papua Selaras di Distrik Sidey, Masni dan Manokwari Utara, dan 1.950 hektar dikelola oleh masyarakat. Selain tanaman kelapa sawit, masyarakat juga mengelola kebun kakao seluas 2.700 hektar, kelapa 1.800 hektar, dan kopi, cengkeh dan pala seluas 642 hektar. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Manokwari tahun 2012, masih terdapat potensi lahan untuk perkebunan seluas 222.346 hektar dan kehutanan yang masih sangat luas namun belum memberikan manfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini sektor pertanian masih menjadi andalan dan unggulan bagi perekonomian Kabupaten Manokwari dan berfungsi sebagai *leading sector* untuk memacu sektor ekonomi lainnya.

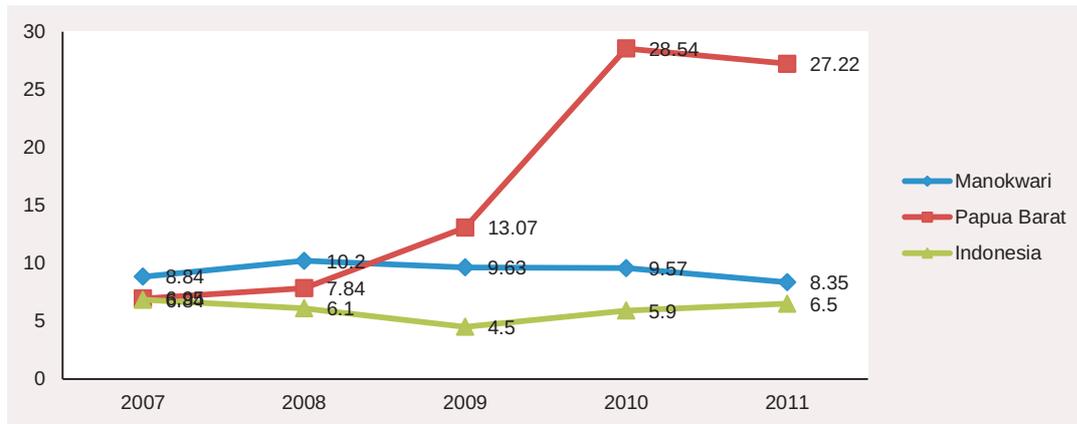
Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Manokwari relatif rendah. Penduduk di Kabupaten Manokwari tersebar mulai dari daerah pinggiran pantai, dataran rendah, rawa, pinggiran sungai hingga wilayah pegunungan. Sebagian besar masyarakat asli Manokwari (Suku Arfak) bermukim di wilayah pegunungan sedangkan masyarakat Papua lainnya sebagian bermukim pada wilayah pinggiran pantai. Masyarakat Transmigrasi Nasional (Transnas) yang berasal dari luar Papua bermukim di Distrik Prafi, Warmare, Masni, Oransbari dan Ransiki. Data tahun 2011, menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Manokwari hanya 13 orang per Km². Wilayah pesisir pantai dan wilayah dataran rendah memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pegunungan. Wilayah yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah Distrik Manokwari Barat (316 orang per Km²), yang merupakan salah satu wilayah di pusat pemerintahan Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Manokwari masih berorientasi pada sektor pertanian. Di dalam RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2010-2015, disebutkan bahwa strategi pembangunan bertumpu pada pemberdayaan ekonomi dengan program utama pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Kebijakan ini juga selaras dengan kebijakan provinsi dan Nasional. Di dalam RPJMD Papua Barat Tahun 2012-2016 dinyatakan bahwa kebijakan pembangunan sektor pertanian terutama diarahkan untuk menjamin ketersediaan pangan di seluruh wilayah Papua Barat. Adapun kebijakan Nasional, sebagaimana tertuang di dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015, Papua Barat (berada pada Koridor 6 bersama dengan Kepulauan Maluku) diharapkan dapat berperan sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak terlepas dari potensi sumberdaya alam yang berlimpah di Kabupaten Manokwari.

1.2. Kinerja Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari cenderung melambat selama periode 2007- 2011. Jika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat pada dua tahun pertama, maka pertumbuhan ekonomi Manokwari relatif tinggi, yaitu mencapai angka dua digit, dan berada di atas laju pertumbuhan provinsi. Namun sejak tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari cenderung melambat dan berada di bawah Provinsi Papua Barat, meskipun masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari disebabkan oleh sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan negatif, padahal kontribusinya terhadap PDRB masih dominan.

Gambar 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Indonesia Tahun 2007-2011.



Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

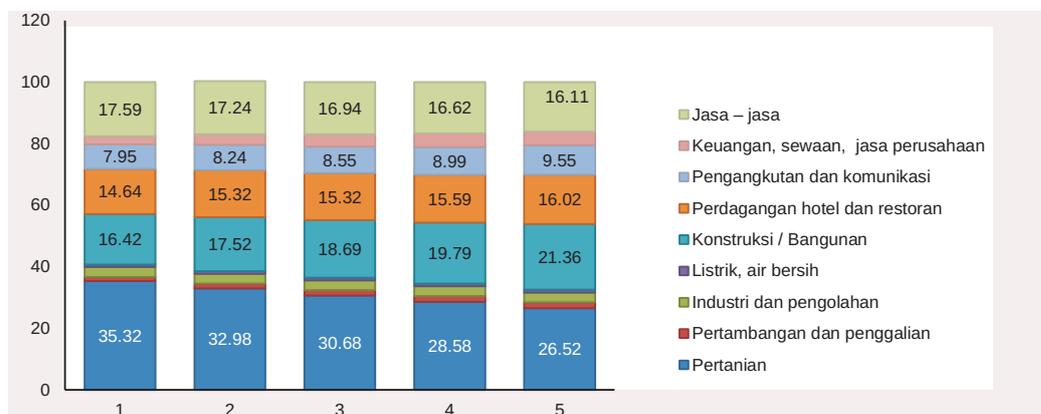
Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari Menurut Lapangan Usaha, 2008-2011.

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	Rerata
Pertanian	-6.63	-6.97	-6.84	-7.21	-6.91
Pertambangan dan Penggalian	11.68	11.11	11.18	3.7	9.42
Industri dan Pengolahan	-0.31	-0.62	-	-1.56	-0.83
Listrik dan Air Bersih	1.23	2.44	1.19	5.88	2.69
Konstruksi/Bangunan	6.7	6.68	5.89	7.93	6.80
Perdagangan, Hotel dan Restoran	4.64	-	1.76	2.76	3.05
Pengangkutan dan Komunikasi	3.65	3.76	5.15	6.23	4.70
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	27.82	19.71	10.32	-1.34	14.13
Jasa-jasa	-1.99	-1.74	-1.89	-3.07	-2.17

Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

Perekonomian Kabupaten Manokwari dalam lima tahun terakhir masih bertumpu pada sektor pertanian dengan kecenderungan yang menurun. Sektor pertanian memiliki pangsa lebih besar dari sektor lainnya walaupun terjadi penurunan dari 35% di tahun 2007 menjadi 26 % di tahun 2011. Posisi kedua dan ketiga masing-masing ditempati oleh sektor bangunan dan konstruksi serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kedua sektor ini menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap PDRB dan berlangsung secara konsisten. Sedangkan industri pengolahan, bukan hanya menunjukkan kontribusi yang relatif kecil tetapi juga cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Fakta ini menegaskan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Manokwari bergeser dari sektor pertanian ke sektor jasa, seperti pada umumnya terjadi pada daerah-daerah yang perekonomiannya bertumpu pada sumberdaya alam.

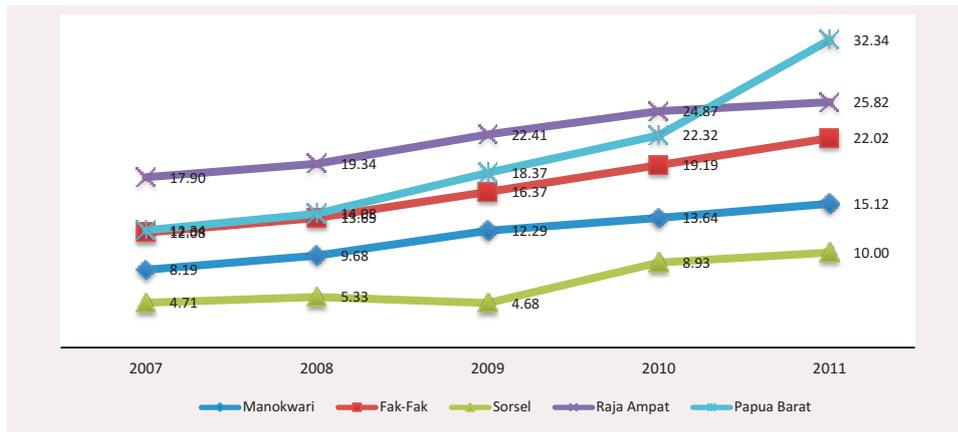
Gambar 1.3. Struktur Perekonomian Kabupaten Manokwari Menurut Lapangan Usaha tahun 2007-2011.



Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

Peningkatan PDRB dan tingkat inflasi yang rendah menyebabkan PDRB riil perkapita meningkat dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, PDRB riil perkapita Kabupaten Manokwari masih berada di bawah provinsi. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat output riil yang dihasilkan oleh setiap penduduk di Kabupaten Manokwari relatif lebih rendah dibanding rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat. Kondisi ini tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk Kabupaten Manokwari yang mencapai 24 persen dari seluruh penduduk Provinsi Papua Barat. Posisi Kabupaten Manokwari sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi telah menjadi daya tarik bagi penduduk luar untuk melakukan migrasi ke Kabupaten Manokwari.

Gambar 1.4. Perkembangan PDRB Riil per Kapita Kabupaten dan Provinsi Papua Barat tahun 2007 – 2011



Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

Tingkat inflasi di Kabupaten Manokwari semakin terkendali di bawah dua digit. Kabupaten Manokwari merupakan salah satu daerah di Papua Barat, selain Kota Sorong, yang dijadikan sebagai indikator perhitungan inflasi Nasional. Hasil Survey Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 menunjukkan bahwa bobot Kabupaten Manokwari dalam proses pembentukan inflasi secara Nasional adalah 0,09 persen dari 315 barang/jasa yang diperhitungkan. Pada tahun 2008, Kabupaten Manokwari merupakan salah satu wilayah yang memiliki inflasi tertinggi di Indonesia (dari 66 kabupaten/kota yang dihitung) yaitu sebesar 17,96 persen. Namun secara umum, inflasi di Provinsi Papua Barat pada saat yang sama (tahun 2008) juga mengalami peningkatan dan lebih besar dari inflasi di Kabupaten Manokwari. Sejak tahun 2009 hingga 2011, laju inflasi di Kabupaten Manokwari mulai dapat dikendalikan hingga mencapai angka satu digit dan terus mengalami penurunan. Dalam dua tahun terakhir, tingkat inflasi di Kabupaten Manokwari berada di bawah Provinsi Papua Barat dan Nasional.

Gambar 1.5. Inflasi di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Indonesia Tahun 2007-2011



Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

1.3. Kinerja Pembangunan Sosial

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manokwari cukup tinggi. Sepanjang periode 2007-2011, jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari bertumbuh rata-rata 3,32 persen per tahun. Angka ini relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Barat dan Nasional. Tingginya laju pertumbuhan di daerah ini tampaknya tidak terlepas dari posisi Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat dan pusat pertumbuhan ekonomi sehingga memicu migrasi masuk ke Kabupaten Manokwari. Selain itu, posisi Kabupaten Manokwari sebagai pintu gerbang untuk Kabupaten Teluk Wondama dan Teluk Bintuni serta dua kabupaten baru yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak, telah menjadikan daerah ini menarik bagi penduduk migran.

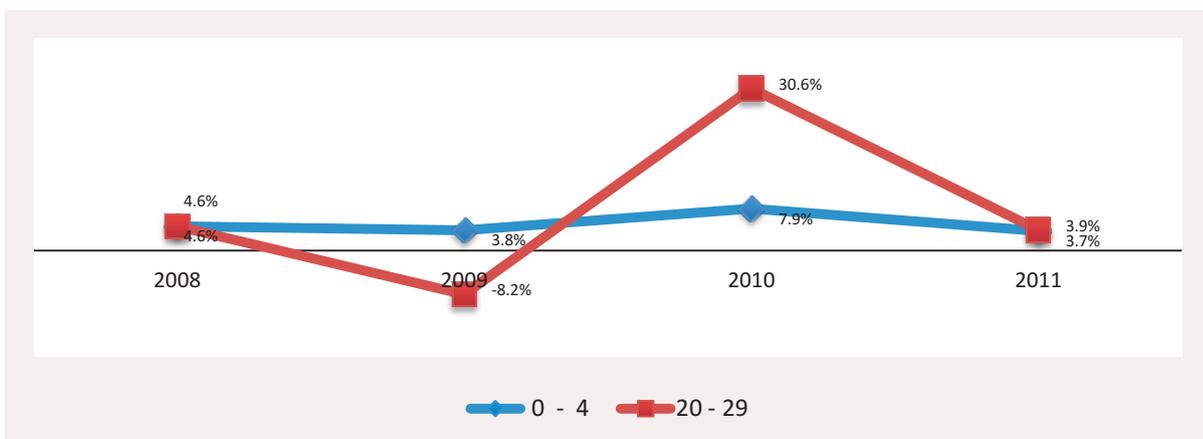
Gambar 1.6. Jumlah Penduduk di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2011



Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

Struktur kependudukan menegaskan terjadinya migrasi masuk tenaga kerja ke Kabupaten Manokwari. Seiring dengan pertumbuhan sektor bangunan dan konstruksi serta sektor jasa lainnya, maka permintaan tenaga kerja mengalami peningkatan. Keterbatasan tenaga kerja lokal dan rendahnya kesiapan mereka untuk bersaing dalam pasar kerja menyebabkan banyaknya tenaga kerja dari luar wilayah Papua yang memanfaatkan peluang tersebut. Tenaga kerja yang datang dari luar Papua rata-rata berusia 20-29 tahun, hal ini dapat dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan usia dimana pada usia 20-29 tahun mengalami peningkatan yang pesat dalam dua tahun terakhir (2010-2011). Pertumbuhan penduduk untuk kelompok umur pencari kerja tersebut berfluktuasi namun pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2010 yang mencapai 30,6 persen. Kelompok usia tenaga kerja ini merupakan kelompok pasangan usia subur yang berpotensi untuk mendorong laju pertumbuhan penduduk ke level yang lebih tinggi.

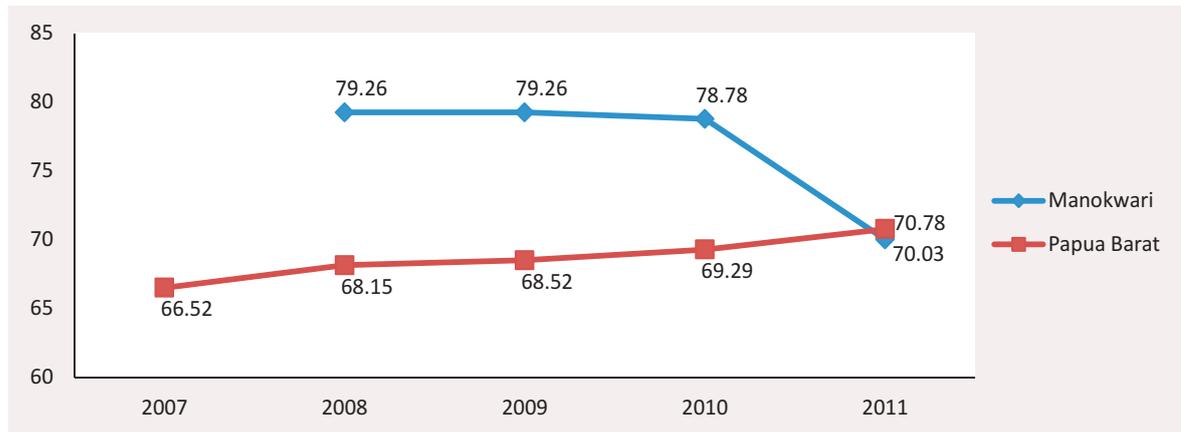
Gambar 1.7. Pertumbuhan Penduduk Balita dan usia Pencari Kerja di Kabupaten Manokwari 2007-2011



Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Manokwari cenderung menurun dari tahun ke tahun dalam lima tahun terakhir. TPAK menggambarkan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk dalam angkatan kerja. Penurunan TPAK yang cukup tajam terjadi pada tahun 2011, yang kemudian menempatkan angka TPAK Kabupaten Manokwari berada di bawah TPAK Provinsi Papua Barat. Kecenderungan ini berbeda sangat kontras dengan pola umum di Provinsi Papua Barat, dimana TPAK justru terus meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 1.8. TPAK Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat

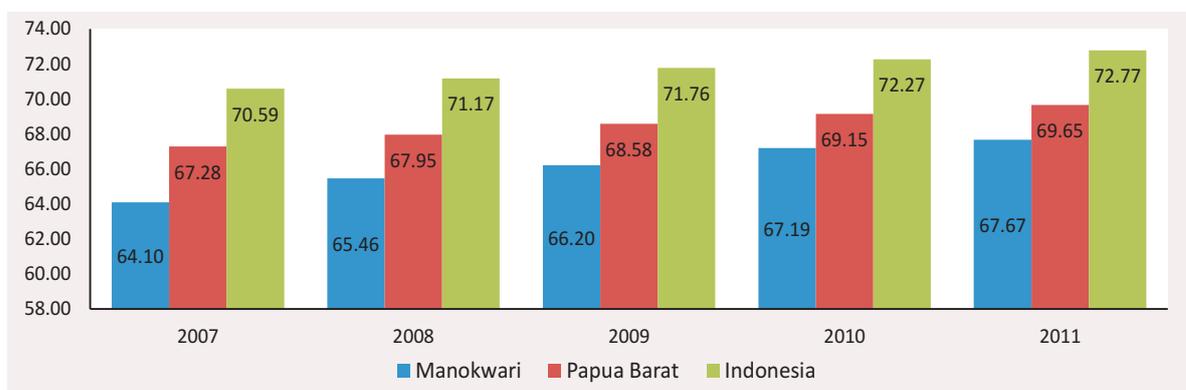


Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

Meskipun TPAK cenderung menurun, namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Manokwari justru menunjukkan peningkatan. Ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Manokwari semakin tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi seluruh pencari kerja. Peningkatan TPT paling tajam terjadi pada tahun 2011, dimana angka TPT telah mencapai 9,26 persen, padahal tahun sebelumnya hanya 1,53 persen. Itu sebabnya, pada tahun 2011, angka TPT Kabupaten Manokwari sudah berada di atas TPT Papua Barat. Dengan demikian, saat ini setiap 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Manokwari, 9 diantaranya merupakan pengangguran.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Manokwari masih relatif rendah meskipun sudah berada dalam kategori menengah (50,00-79,99). IPM Kabupaten Manokwari berada di bawah angka Provinsi Papua Barat dan Nasional. Namun IPM Kabupaten Manokwari meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan IPM Provinsi Papua Barat dan Nasional. Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari menempati posisi kelima, setelah Kabupaten Fakfak, Kaimana, Sorong, dan Kota Sorong. Jika diamati berdasarkan komponen pembentuk IPM, tampak bahwa angka melek huruf dan daya beli masyarakat masih menjadi tantangan utama bagi Kabupaten Manokwari. Kedua indikator ini berada di bawah angka Provinsi Papua Barat. Sebaliknya, angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Manokwari sudah relatif baik karena berada di atas angka Provinsi Papua Barat.

Gambar 1.9. Nilai IPM Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Indonesia tahun 2007-2011



Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

Tabel 1.3. Indeks Komposit Pembentuk IPM Tahun 2010 dan 2011

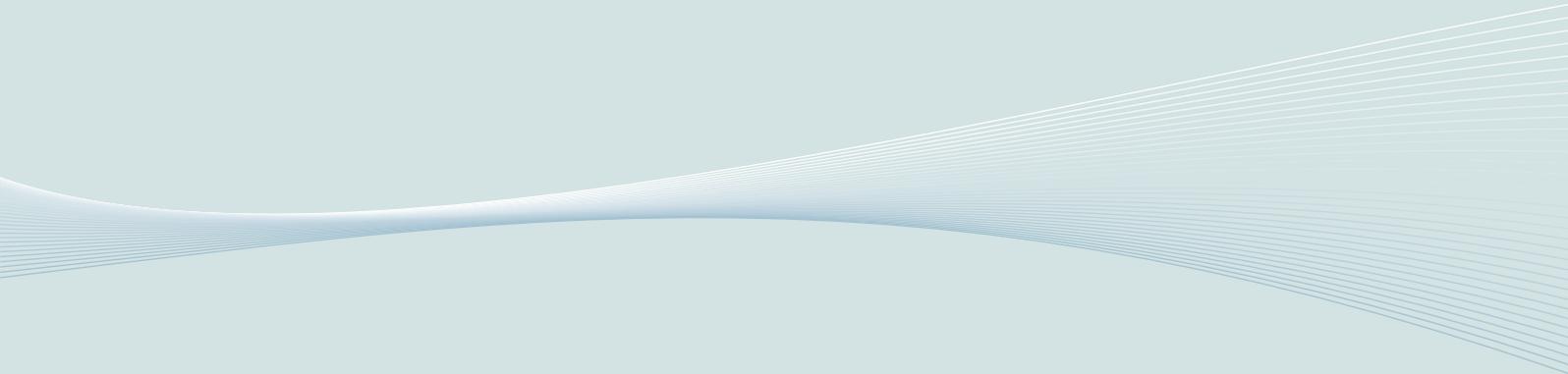
Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		AMH (%)		MYS (tahun)		PPP (Rp 000)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Fakfak	70,52	70,88	97,46	98,13	9,27	9,37	589,06	592,30
Manokwari	68,00	68,29	87,79	88,77	8,37	8,43	588,30	589,12
Sorong Selatan	66,66	66,82	88,32	88,43	7,98	8,06	588,85	590,23
Raja Ampat	66,17	66,50	93,62	94,13	7,35	7,43	560,70	562,22
Papua Barat	68,51	68,81	93,19	93,39	8,21	8,26	596,08	599,28

Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

1.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari yang melambat dalam beberapa tahun terakhir telah berdampak terhadap peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Sektor pertanian yang masih dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Manokwari dan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk, justru menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Pada saat yang sama, sektor industri pengolahan cenderung stagnan. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa keuangan menunjukkan pertumbuhan paling akseleratif, namun kontribusi sektor ini terhadap PDRB relatif kecil dan tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerjanya relatif rendah. Keseluruhan kondisi ini yang menyebabkan mengapa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari cenderung melambat, tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat, dan daya beli masyarakat relatif rendah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Manokwari perlu memberi perhatian sungguh-sungguh terhadap pengembangan sektor pertanian dan memfasilitasi pengembangan industri pengolahan di masa yang akan datang.

Kualitas sumberdaya manusia masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan Kabupaten Manokwari. Nilai IPM Kabupaten Manokwari masih berada di bawah rata-rata Provinsi Papua Barat dan Nasional dan hanya menempati peringkat kelima dari 11 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat. Posisi Kabupaten Manokwari sebagai ibukota provinsi dan pusat pertumbuhan ekonomi mengharuskan pemerintah Kabupaten Manokwari untuk memberi perhatian terhadap masalah kualitas SDM. Perhatian perlu difokuskan pada upaya pemberantasan buta huruf dan perluasan lapangan kerja.



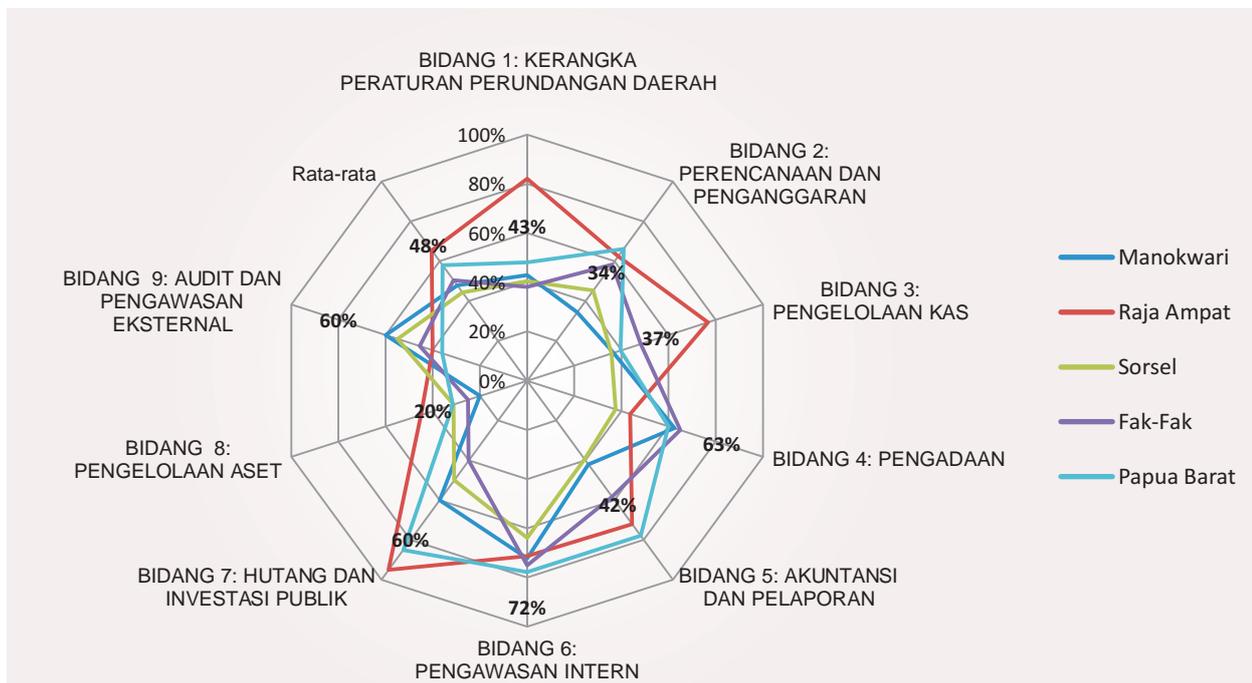
2 **PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH**



2.1. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara umum pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Manokwari yang mencakup aspek perencanaan & penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta pengawasan dan akuntabilitas belum efisien dan efektif. Berdasarkan 9 (sembilan) aspek yang dinilai, diperoleh skor rata-rata sebesar 48 persen sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang harus dibenahi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi asas-asas transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aspek pengelolaan keuangan daerah yang paling lemah adalah pengelolaan aset dengan skor 20 %, kemudian pengelolaan kas skor 34 % dan perencanaan dan penganggaran skor 37 persen, sedangkan aspek pengelolaan keuangan daerah lainnya mendapat skor antara 42 persen sampai dengan 72 persen.

Gambar 2.1 Skor Penilaian PKD



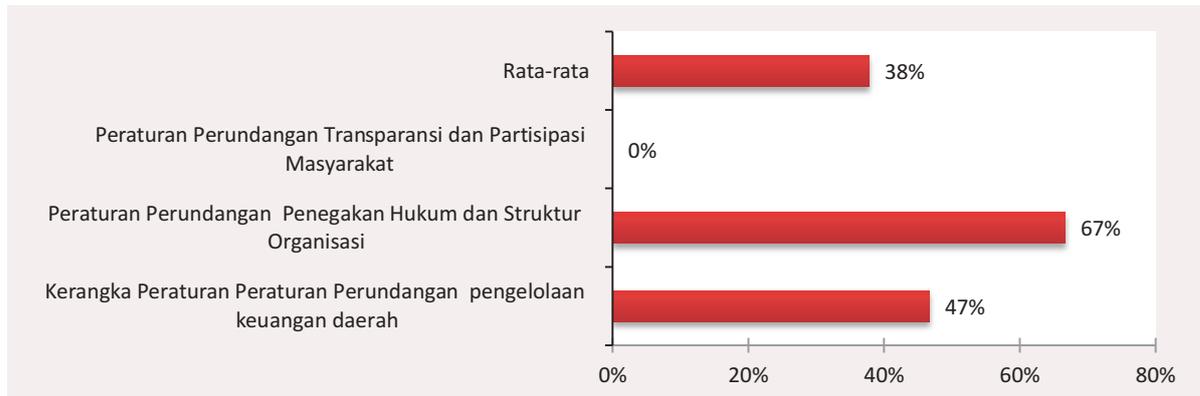
Sumber: Data Kuesioner PFM, data diolah (2013)

2.2. Analisis Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran yang memenuhi standar belum tersusun dengan baik walaupun dokumen perencanaan dan penganggaran multi tahun sudah tersedia. Dokumen RPJM, KUA APBD dan PPAS TA 2012, telah disajikan namun kurang melibatkan stakeholder pada masing-masing SKPD. Indikator bidang perencanaan dan penganggaran yang dikelompokkan dalam perencanaan dan penganggaran multi tahun, target anggaran yang layak berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis dan sistem pemantauan dan evaluasi, hanya memperoleh skor 42,9 %. Indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi menyangkut target anggaran dan sistem pemantauan dan evaluasi dalam proses perencanaan dan penganggaran ternyata belum terlaksana secara utuh.

Kerangka peraturan perundangan yang mendukung perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien belum sepenuhnya didukung oleh perangkat peraturan daerah. Peraturan perundangan daerah yang belum tersedia diantaranya adalah peraturan tentang SPM, kebijakan akuntansi pemerintah daerah, pengelolaan barang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, standar harga, standar biaya, dan analisis standar belanja peraturan daerah tentang transparansi dan partisipasi masyarakat dan akses masyarakat terhadap sidang-sidang DPRD. Belum efektifnya struktur organisasi pengelolaan daerah sehingga ketentuan tentang transparansi dan partisipasi masyarakat belum dapat dipenuhi.

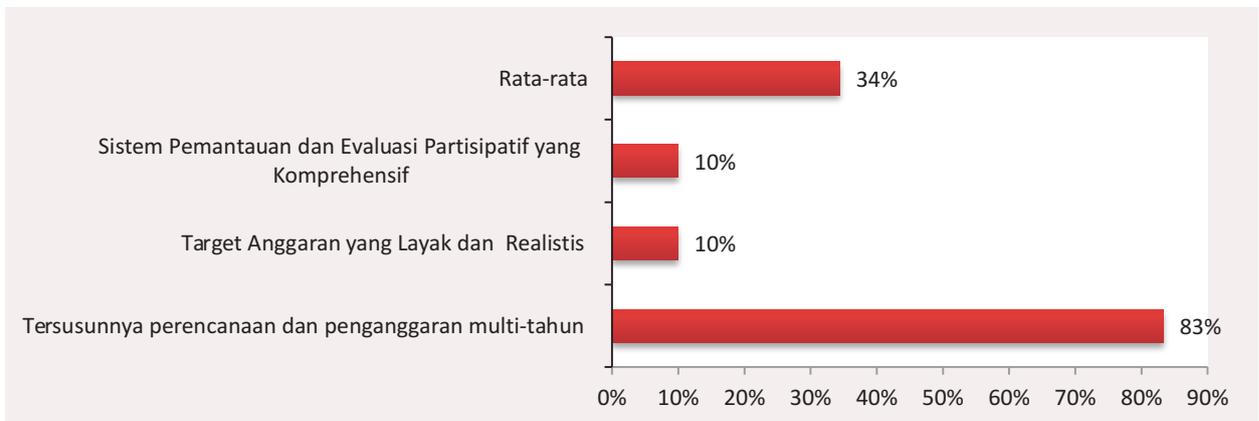
Gambar 2.2 Skor Penilaian Kerangka Peraturan Perundangan.



Sumber : Data Kuesioner PFM, data diolah (2013)

Target anggaran berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis belum diikuti oleh perencanaan dan penganggaran secara komprehensif. Penyusunan anggaran berdasarkan kinerja dapat dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar biaya serta SPM. Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dilakukan secara memadai sehingga kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA dan PPAS masih perlu diperbaiki. Demikian halnya dengan proses perencanaan tahunan yang belum sepenuhnya memperhatikan disparitas indikator sosial ekonomi dan peran gender. Proses evaluasi RKA-SKPD telah dilakukan, namun peran masyarakat belum secara terbuka disertakan, termasuk akses terhadap informasi tersebut sulit dilakukan.

Gambar 2.3 Skor Penilaian Perencanaan dan Penganggaran.



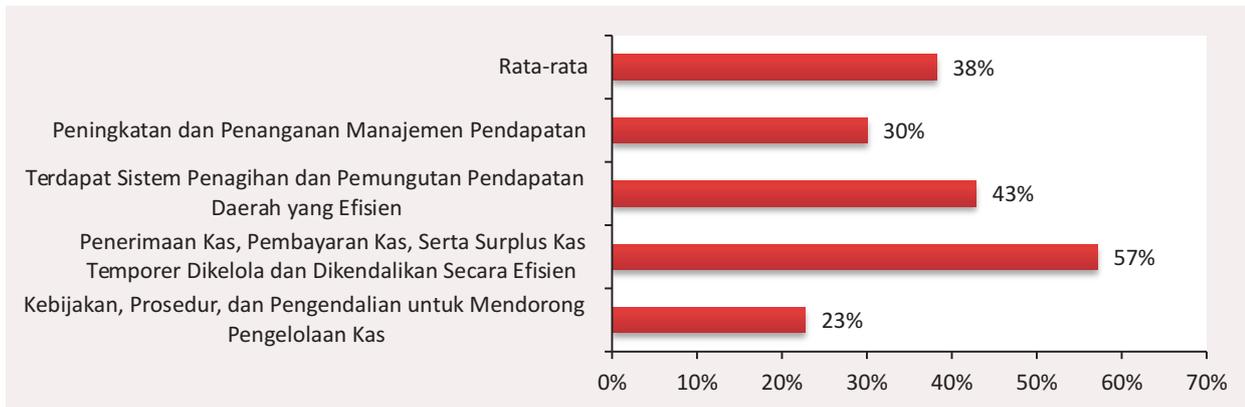
Sumber : Data Kuesioner PFM, data diolah (2013)

2.3. Analisis Pelaksanaan Anggaran: Manajemen Kas, Pengadaan, Manajemen Aset, Akuntansi dan Pelaporan

Pelaksanaan anggaran Kabupaten Manokwari termasuk dalam kategori belum baik. Terdapat 95 indikator untuk menilai apakah pelaksanaan anggaran telah berlangsung dengan baik atau belum. Berdasarkan tabulasi hasil penilaian, indikator yang dicapai baru 39 indikator atau 41 persen. Penilaian tersebut dilakukan terhadap aspek pengelolaan kas; pengadaan barang dan jasa; investasi, hibah dan hutang; akuntansi dan pelaporan; serta manajemen aset. Kondisi ini menyebabkan praktik pelaksanaan anggaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel belum dapat dipenuhi.

Penerimaan dan pembayaran kas serta surplus kas telah dikelola secara efisien, namun kebijakan, prosedur dan pengendalian pengelolaan kas yang efisien belum sepenuhnya terlaksana. Guna mencapai sistem dan manajemen pendapatan dan pembayaran yang optimal perlu dicapai 30 indikator, namun hanya 11 atau 37% yang dapat dicapai. Beberapa komponen dalam pengelolaan kas yang perlu di tingkatkan seperti: prosedur dan pengelolaan kas, serta peningkatan penanganan manajemen pendapatan.

Gambar 2.4 Skor Penilaian Pelaksanaan Anggaran



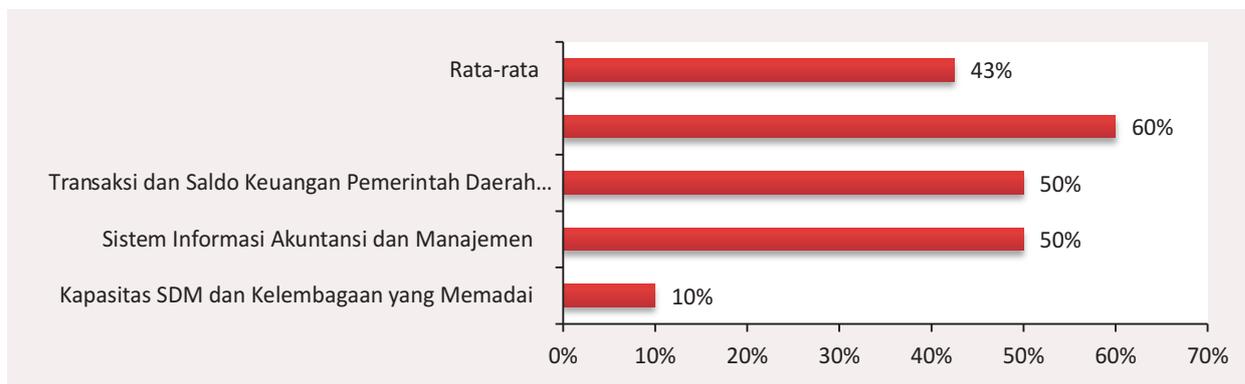
Sumber: Data Kuesioner PFM, data diolah (2013)

Rencana anggaran yang seharusnya dibuat berdasarkan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan belum dapat dipenuhi. Demikian juga Peraturan Bupati tentang prosedur/mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBD belum sesungguhnya berjalan dengan baik, serta ketentuan tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial dan hibah belum dijalankan. Peningkatan dan Penanganan Manajemen Pendapatan belum dilengkapi dengan analisis potensi PAD yang memadai, hanya dilakukan dengan memperkirakan perolehan PAD. Peningkatan kapasitas terhadap staf pengelola keuangan sudah dilakukan, namun belum disinkronkan dengan tupoksi yang ada. Sistem penetapan dan penagihan pendapatan daerah belum dilakukan secara efisien, karena ketersediaan unit layanan menanggapi pertanyaan pembayar pajak belum berfungsi bahkan sanksi tegas kepada wajib pajak/retribusi yang melanggar aturan belum nampak. Pengelolaan kas dapat menjadi efisien dengan menyusun anggaran kas yang memadai, sehingga dapat diketahui kapan dan untuk apa dana dikeluarkan serta kapan dan dari mana dana akan diterima. Manajemen kas yang belum memenuhi standar efisiensi akan berdampak pada arus dana masuk dan keluar.

Prosedur dan praktek-praktek pengadaan barang dan jasa yang mendukung good governance belum sepenuhnya terpenuhi. Target 16 indikator yang disyaratkan hanya mampu dipenuhi 10 atau 63 persen saja. Beberapa indikator yang belum terpenuhi seperti belum adanya sertifikat dari panitia pengadaan barang dan jasa; pengumuman tender yang belum sepenuhnya dilakukan melalui surat kabar lokal dan website PEMDA; belum dibuat daftar hitam rekanan yang nakal. Kendati pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai serta pengadaannya tepat waktu. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, adil, transparan dan akuntabel. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum transparan dan pengawasan yang belum optimal menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sistem akuntansi dan manajemen belum terintegrasi secara memadai sehingga belum menjamin terlaksananya akuntansi yang tepat. Semua transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, wajar, dan tepat waktu sehingga akan mencapai 19 indikator yang disyaratkan namun realitasnya hanya bisa dipenuhi 8 atau hanya mencapai 42 persen.

Gambar 2.5 Skor Penilaian Sistem Akuntansi dan Manajemen.



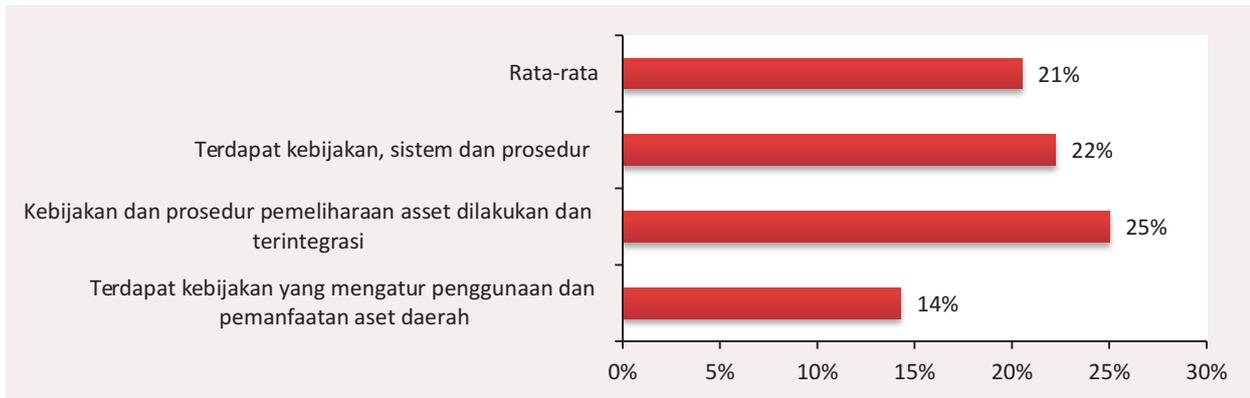
Sumber : Data Kuesioner PFM, data diolah (2013)

Kapasitas SDM dan kelembagaan yang memadai untuk fungsi akuntansi dan keuangan belum memadai. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD tidak memiliki latar belakang akuntansi dan kurang respons terhadap pelatihan akuntansi dan keuangan daerah yang dilakukan bahkan staf pendukung tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga kemampuannya hanya diperoleh melalui pelatihan-pelatihan. Kondisi seperti ini mengakibatkan, fungsi akuntansi dan keuangan SKPD tidak dapat dilakukan dengan baik serta staf penatausahaan akuntansi mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan regulasi teknis di bidang akuntansi, yang selanjutnya mengganggu akurasi data akuntansi bagi kepentingan pelaporan akuntansi. Akibatnya laporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya dapat memberikan gambaran keputusan dibidang keuangan dan penganggaran daerah.

Prosedur dan pengelolaan investasi daerah dan hibah belum didukung dengan kebijakan pengelolaan hutang dan investasi. Untuk memenuhi prosedur tersebut terdapat 10 indikator yang disyaratkan namun hanya mencapai 6 indikator atau 60 persen yang dapat terpenuhi. Prosedur dan pengendalian pinjaman dan investasi daerah telah dilaksanakan dengan memperhitungkan resiko, namun belum sesuai dengan kerangka kebijakan nasional. Transaksi pinjaman dan investasi ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disajikan dalam laporan keuangan dan persetujuan DPRD atas transaksi investasi tersebut telah dilakukan, namun belum didukung oleh bukti Perda Investasi Daerah yang mengacu pada PP No. 54 tahun 2005. Prosedur akuntansi dan pengelolaan penerimaan hibah yang dilakukan belum didukung dengan kebijakan dan transparansi penerimaan hibah. Dana pendampingan pelaksanaan hibah yang tercantum dalam DPA SKPD serta transaksi hibah yang dicatat dalam laporan realisasi anggaran dan berdasarkan dokumen belum didukung oleh peraturan mengenai penerimaan, pencatatan, pengelolaan dan pelaporan hibah, serta publikasi informasi terhadap penerimaan dan kegiatan yang dibiayai dari hibah sehingga azas transparansi belum dapat dipenuhi.

Peningkatan keefektifan pengelolaan aset daerah melalui perencanaan dan pengelolaan aset jangka panjang belum memadai. Peningkatan efektifitas dalam menjamin terciptanya layanan terbaik dalam mendukung kelancaran aktifitas pemerintahan dapat dipenuhi melalui 20 indikator yang disyaratkan, namun hanya 4 yang terpenuhi atau sebesar 20 persen. Hal ini karena kebijakan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, kebijakan dan prosedur pemeliharaan aset serta kebijakan, sistem, dan prosedur pencatatan, perolehan, penilaian, pemindahtanganan dan penghapusan dan pelaporan barang daerah belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menjadikan pemanfaatan aset bagi kepentingan pemerintah belum optimal sementara pengamanan terhadap aset tersebut kurang maksimal.

Gambar 2.6 Skor Penilaian Pengolahan Aset Daerah.



Sumber: Data Kuesioner PFM, data diolah (2013)

Kebijakan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan aset daerah belum sepenuhnya mendukung tertib pengelolaan aset daerah. Hasil pemanfaatan barang daerah disetor ke rekening kas daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mendukung status penggunaan barang dan sanksi terhadap pengelola aset yang merugikan Negara belum tersedia, begitu juga dengan pemanfaatan barang milik daerah belum dilaksanakan melalui proses tender. Belum dilakukan penilaian aset, tidak adanya pedoman penatausahaan dan tidak dilakukannya sosialisasi Perda pengelolaan barang ke seluruh SKPD menyebabkan nilai riil dari aset dan pengelolaan barang daerah belum dapat diketahui. Kebijakan dan prosedur pemeliharaan aset belum terintegrasi dengan proses perencanaan daerah guna memastikan kondisi aset dapat digunakan. Rencana tahunan kebutuhan pemeliharaan barang daerah, kartu inventaris ruangan dan bukti kepemilikan aset belum tersedia bahkan laporan tahunan hasil pemeliharaan barang pada setiap SKPD tidak tersedia sehingga tidak dapat diperoleh informasi mengenai pemeliharaan aset pada setiap SKPD. Kebijakan, sistem dan prosedur pencatatan, perolehan, penilaian, pemindahtanganan dan penghapusan barang belum dilakukan secara efektif. Pencatatan barang daerah dalam bentuk Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruang (KIR) belum dilakukan secara baik. Laporan aset pada bagian keuangan dan pada bagian perlengkapan belum sinkron sehingga nilai aset pada neraca tidak didasarkan pada laporan barang daerah. Hal ini disebabkan karena belum dilakukan penghapusan barang daerah, pengguna/pengelola barang belum melakukan inventarisasi barang, dan belum terdapat laporan barang pengguna semesteran dan tahunan, serta laporan barang yang disiapkan oleh pengelola barang daerah sesungguhnya merupakan sumber utama pelaporan aset dalam neraca daerah.

2.4. Analisis Oversight dan Accountability

Kinerja Oversight dan Accountability Pemkab Manokwari telah berjalan cukup efisien dan efektif. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, didukung dengan audit eksternal dan pengawasan yang efektif dan independen telah mencapai skor 65% (terpenuhi sebanyak 18 dari 28 indikator yang harus dipenuhi). Beberapa indikator yang masih harus diperbaiki antara lain: penyampaian laporan keuangan ke BPK secara tepat waktu, melakukan publikasi laporan keuangan, memberi ruang akses kepada masyarakat pada sidang-sidang pembahasan rencana dan pertanggungjawaban keuangan di DPRD, informasi LKPD dipublikasikan pada media massa setempat dan elektronik. Pihak inspektorat perlu mengusulkan penambahan staf yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan yang memiliki latar belakang akuntansi, program dan prosedur audit secara reguler perlu dikaji ulang dan direvisi.

Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) Kabupaten Manokwari pernah mencapai WDP di tahun 2009. Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh di tahun 2009 disebabkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diawali dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, sampai evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan. Meski demikian, pada tahun berikutnya hingga tahun 2012, kualitas PKD mengalami penurunan, sehingga opini yang diraih adalah *disclaimer opinion* (tidak memberikan pendapat).

Tabel 2.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Papua Barat, 2006-2011

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Opini BPK/Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01.	Prov. Papua Barat	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
02.	Kab. FakFak	TMP	TMP	WDP	TMP	TMP	TMP
03.	Kab. Manokwari	TMP	TMP	TMP	WDP	TMP	TMP
04.	Kab. Raja Ampat	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP	TMP
05.	Kab. Sorong Selatan	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP	TMP

Sumber :Ikhtisar hasil pemeriksaan LKPD BPK RI tahun 2012

2.5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perencanaan dan penganggaran daerah belum ditetapkan tepat waktu dan tidak didukung oleh tersedianya peraturan perundang-undangan daerah secara komprehensif. Peraturan daerah tentang penanaman modal dan standar harga belum disahkan, Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekomendasi yang diusulkan antara lain: 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang belum tersedia secara tepat waktu (RPJMD, Renstra, APBD); 2) Kerangka perundangan yang terkait dengan SPM, Peraturan daerah mengenai penanaman modal dan standar harga perlu disahkan; 3) Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Praktek pelaksanaan anggaran yang meliputi: pengelolaan kas, pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, investasi, akuntansi dan pelaporan, serta investasi, hutang dan hibah belum sepenuhnya efektif dan efisien. Hal ini dapat diamati dari: Ketersediaan regulasi terkait manajemen kas belum ada, anggaran kas yang disusun belum disesuaikan dengan DPA dan rencana waktu kegiatan, Surat Perintah untuk Membayar (SPUM) diterbitkan lebih dari dua hari, Belum ada regulasi tentang anggaran belanja bansos dan hibah, Tidak ada sanksi tegas bagi wajib pajak/retribusi yang melanggar, dan manajemen pendapatan belum dilakukan secara baik. Rekomendasi yang dapat diusulkan adalah: 1) Pembuatan regulasi pengelolaan kas yang efektif dan efisien, Anggaran kas perlu disesuaikan dengan DPA dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan, SPUM diterbitkan paling lama dua hari setelah diterimanya SPP, Pembuatan regulasi tentang anggaran belanja bansos dan hibah, Harus dibuat sanksi tegas bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar. manajemen aset belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang diindikasikan oleh: Tidak ada pedoman penatausahaan aset/ barang milik daerah dalam bentuk SK Kepala Daerah, Tidak ada rancangan tahunan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah di SKPD, belum ada Perda tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, penggunaan atau kuasa pengguna, penyimpanan dan pengurus barang yang karena perbuatannya merugikan daerah, Tidak dilakkan penilaian aset daerah. Rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain: Diterbitkan SK Kepala Daerah tentang pedoman penatausahaan aset/ barang milik daerah, Dibuat /disusun rancangan tahunan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah di SKPD, dibuat Perda tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, penggunaan atau kuasa pengguna, penyimpanan dan pengurus yang karena perbuatannya merugikan daerah, Dilakukan inventarisasi dan penilaian aset daerah dalam bentuk KIR dan KIB

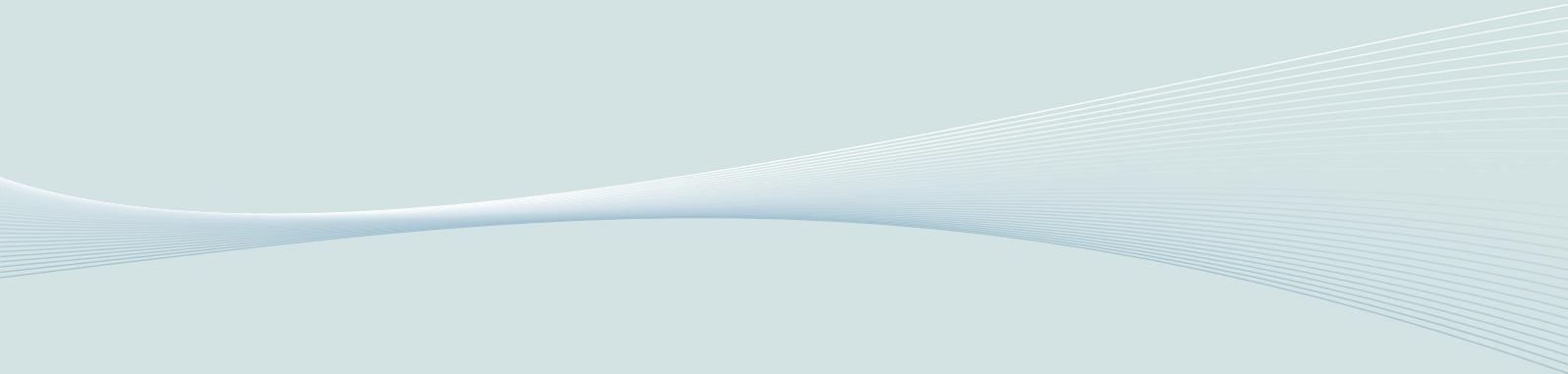
Pengadaan barang dan jasa belum didukung oleh Panitia pengadaan barang yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa yang diindikasikan oleh: Sistem pengawasan dan audit penanggungjawab anggaran atas pengadaan barang belum berjalan dengan baik. Rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain: Panitia pengadaan barang harus bersertifikat pengadaan barang dan jasa, perlu adanya pembenahan sistem pengawasan dan audit penanggungjawab anggaran atas pengadaan barang belum berjalan dengan baik

Akuntansi dan pelaporan belum didukung oleh kapasitas SDM dan kelembagaan yang memadai yang diindikasikan oleh: Kepala bidang atau bagian di SKPKD yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan: Staf BPKD berlatar belakang D3 akuntansi atau lebih tinggi belum mencukupi 10 persen, Pejabat penatausahaan keuangan tidak berlatar belakang akuntansi, Pelatihan akuntansi dan penatausahaan keuangan belum secara rutin dilakukan untuk staf keuangan SKPKD, Laporan keuangan dan laporan Kinerja belum sepenuhnya dihasilkan dari satu sistem, SKPD tidak menyusun Laporan Kinerja.

Rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain: Kepala bidang atau bagian di SKPKD harus berlatarbelakang pendidikan atau pengalaman akuntansi dan keuangan, Staf SKPKD berlatar belakang D3 akuntansi atau keuangan lebih tinggi dari 10 persen, Pejabat penatausahaan keuangan harus berlatar belakang akuntansi atau keuangan, Pelatihan akuntansi dan penatausahaan keuangan harus secara rutin diikuti staf keuangan SKPD, Laporan keuangan dan laporan Kinerja harus dihasilkan dari satu system, SKPD harus menyusun laporan Kinerja.

Pengelolaan Hutan Hibah dan Investasi publik belum didukung oleh lembaga legislatif yang diindikasikan oleh: total pinjaman yang telah melebihi 2,5 persen dari *debt services coverage ratio*, tidak terdapat peraturan mengenai penerimaan, pencatatan, pengelolaan dan pelaporan hibah. Tidak ada dana pendampingan hibah yang tercantum di DPA SKPD. tidak ada publikasi informasi terhadap penerimaan dan kegiatan yang dibiayai Hibah. Rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain : dibuat pedoman kebijakan tentang total pinjaman pemerintah daerah, dibuat peraturan mengenai penerimaan, pencatatan, pengelolaan dan pelaporan hibah, disediakan dana pendampingan hibah yang tercantum di DPA SKPD, dipublikasikan Informasi terhadap penerimaan dan kegiatan yang dibiayai hibah.

Pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui audit eksternal dan internal serta pengawasan yang efektif dan independen belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut dapat teridentifikasi dari: SDM inspektorat yang berlatar belakang Jabatan Fungsional Auditor kurang dari 20 persen, tidak dilakukan pelatihan secara rutin bagi auditor, sumberdaya pendukung /dana operasional inspektorat tidak cukup memadai, temuan audit belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain : SDM inspektorat yang berlatar belakang akuntansi ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang, Dilakukan pelatihan secara rutin bagi auditor, Alokasi dana operasional inspektorat minimal 2 persen dari APBD, dilakukan publikasi laporan keuangan, LPPD, LHP-BPK melalui media massa setempat, papan pengumuman atau website, masyarakat belum memiliki akses menghadiri sidang DPRD yang membahas pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. DPRD harus memasukkan dalam tatib tentang pelibatan masyarakat menghadiri sidang APBD yang membahas pertanggungjawaban dan hasil audit BPK.



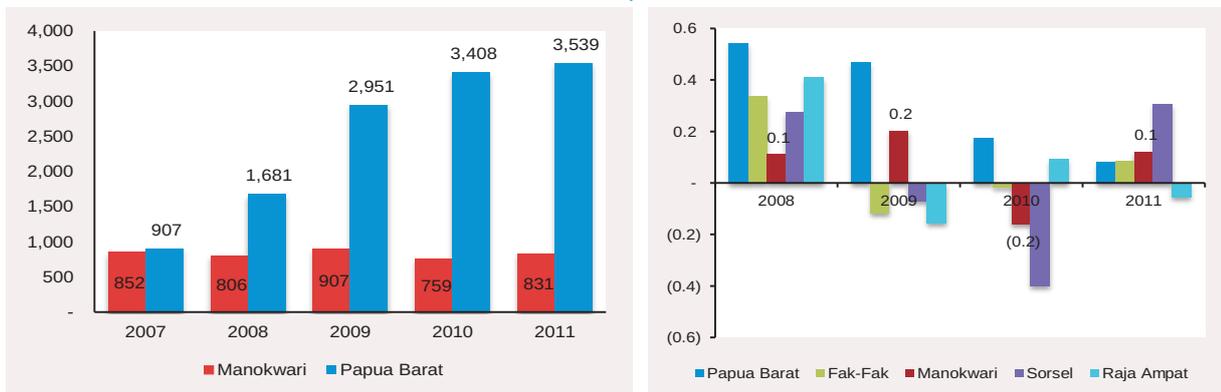
3 **PENDAPATAN
DAERAH**



3.1. Gambaran Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah riil Kabupaten Manokwari tidak mengalami perubahan berarti, bahkan cenderung menurun selama periode 2007-2011. Pendapatan daerah riil Kabupaten Manokwari bersifat fluktuatif, terlihat dari pertumbuhan pendapatan riil yang mengalami peningkatan hingga tahun 2009 sebesar 20 persen kemudian mengalami penurunan hingga 20 persen di tahun berikutnya dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sampai 10 persen. Hal ini disebabkan oleh sumber penerimaan dari dana perimbangan yang berfluktuasi karena dalam kurun waktu tersebut terjadi pemekaran wilayah atau penambahan daerah otonom baru baik provinsi maupun kabupaten di seluruh Indonesia sehingga mempengaruhi akan pengalokasian pendapatan di setiap daerah. Untuk itu kapasitas PAD perlu di perbesar sehingga dapat mengantisipasi kondisi fluktuatif dari dana perimbangan tersebut.

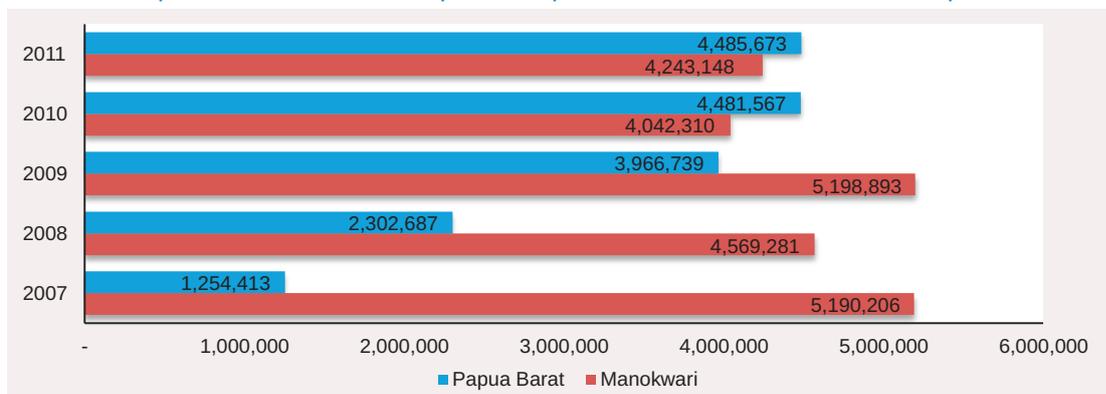
Gambar 3.1. Nilai dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Riil Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat



Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari, Fakfak, Sorsel, Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat, Tahun 2007-2011

Pendapatan daerah riil per kapita Kabupaten Manokwari mengalami fluktuatif selama lima tahun. Pendapatan riil perkapita Kabupaten Manokwari dari Rp 5.190.206 di tahun 2007 mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi Rp 4.243.148 dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat. Pada sisi lain, Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dari Rp 1.254.413 di tahun 2007 menjadi Rp 4.485.673 di tahun 2011. Distribusi pendapatan riil perkapita Kabupaten Manokwari cenderung stabil dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan riil Provinsi mengalami perbaikan dalam kurun waktu tersebut. Pendapatan riil perkapita Kabupaten Manokwari sesungguhnya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya arus migran yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun. Kendati secara nominal terjadi peningkatan perolehan pendapatan daerah namun dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka secara riil pendapatan yang diperoleh Kabupaten Manokwari mengalami penurunan. Untuk itu perlu bagi pemerintah daerah menata kembali arus migran dari luar daerah yang masuk di wilayah Manokwari sehingga dalam pengalokasian dana perimbangan komponen jumlah penduduk benar-benar riil diperhitungkan dalam formula.

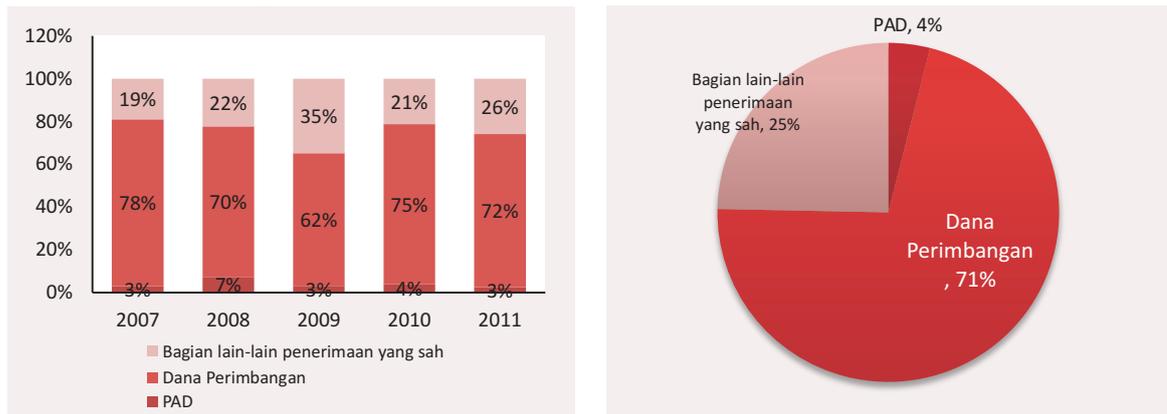
Gambar 3.2. Pendapatan Daerah Riil Perkapita Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011



Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari, dan Provinsi Papua Barat, Tahun 2007-2011

Postur pendapatan daerah Kabupaten Manokwari didominasi oleh dana perimbangan. Fakta ini menunjukkan besarnya ketergantungan fiskal daerah terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat selama periode 2007-2011. Proporsi dana perimbangan selama 5 tahun rata-rata mencapai 71 persen, sedangkan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah sangat kecil, hanya 4 persen. Persentase dana perimbangan menurun dari 78 persen (2007) menjadi 72 persen (2011). PAD berfluktuatif selama 5 tahun terakhir, hal serupa juga terjadi pada bagian lain-lain yang sah namun cenderung meningkat dari 19 persen menjadi 26 persen. Struktur pendapatan daerah seperti ini menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Peningkatan PAD perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan fiskal, melalui pembenahan fungsi kelembagaan dan regulasi, sehingga sumber-sumber penerimaan daerah dapat dilakukan.

Gambar 3.3. Perkembangan dan Postur Total Pendapatan Daerah Riil Kabupaten Manokwari, 2007-2011

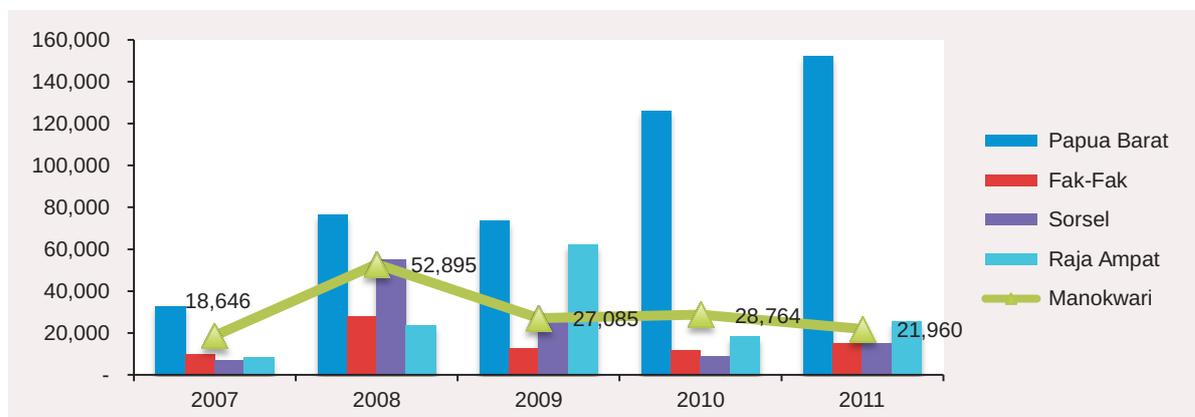


Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari 2007-2012

3.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari cenderung menurun selama kurun waktu 2007-2011. PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah selama lima tahun telah memberikan kontribusi rata-rata sebesar Rp 32,370 juta atau hanya 4 persen dari pendapatan riil daerah. Secara riil perolehan PAD tertinggi terjadi di tahun 2008 yang mencapai Rp 52,8 juta, namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan hingga mencapai Rp 21,9 juta. Penurunan ini disebabkan karena penanganan terhadap sumber-sumber PAD tersebut kurang memadai. Oleh karena itu perlu perbaikan terhadap penanganan sumber-sumber PAD tersebut mulai dari regulasi, kelembagaan, maupun personil.

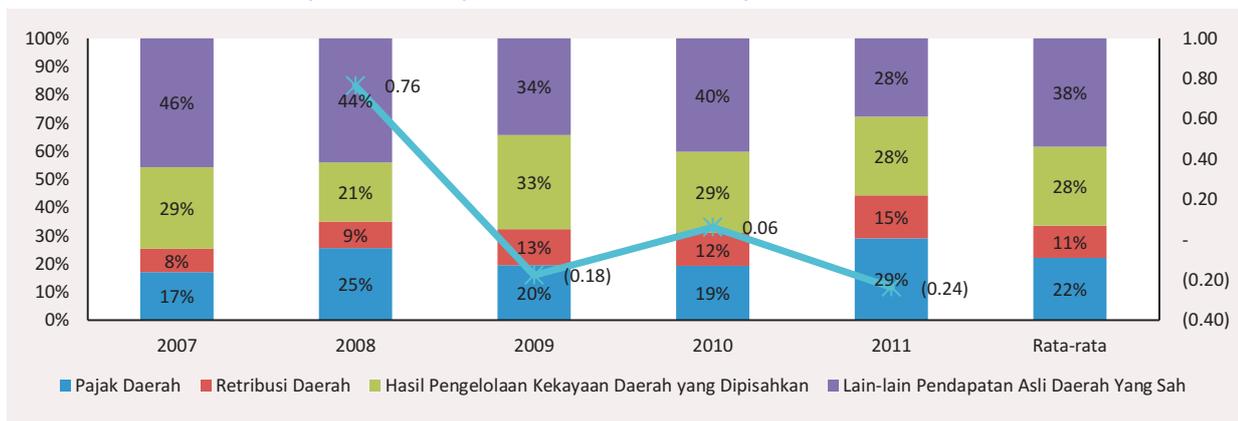
Gambar 3.4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari, Fakfak, Sorsel, Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011



Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari, Fakfak, Sorsel, Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat, Tahun 2007-2011

Postur PAD didominasi oleh lain-lain PAD yang sah dengan kecenderungan penurunan selama periode 2007-2011. Perolehan PAD sumber utamanya dari lain-lain PAD yang sah, dengan rata-rata sebesar 38 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah memiliki porsi yang berfluktuasi dengan rata-rata 28 persen. Selain itu, berasal dari hasil pengelolaan yang dipisahkan dengan rata-rata sebesar 28,15%. Peran pajak daerah dan retribusi daerah masih sangat kecil dalam pembentukan PAD dengan rata-rata 22 persen untuk pajak daerah dan 11 persen untuk retribusi daerah. Belum optimalnya perolehan pajak daerah dan retribusi daerah mengindikasikan bahwa potensi pendapatan daerah belum ditangani secara baik.

Gambar 3.5. Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011



Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari, 2007-2011

Komposisi pajak daerah didominasi oleh pajak hotel dan pajak reklame. Pajak daerah meningkat dari Rp 4.192 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 6.105 juta pada tahun 2011. Dominasi pajak reklame dan hotel selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan bahwa tamu-tamu dari luar Manokwari banyak yang berkunjung untuk berbagai kegiatan sehingga berdampak kepada reklame untuk berbagai kegiatan. Pada tahun 2011 pajak air tanah memberikan kontribusi yang cukup besar dari sumber pajak lainnya, sebab pada tahun tersebut peran kelembagaan pajak mulai diintensifkan karena semakin bertambahnya properti bagi pemukiman penduduk. Masih terdapat potensi-potensi pajak yang belum di gali seperti pajak parkir, pajak lingkungan, pajak badan usaha, pajak kebisingan dan-lain-lain.

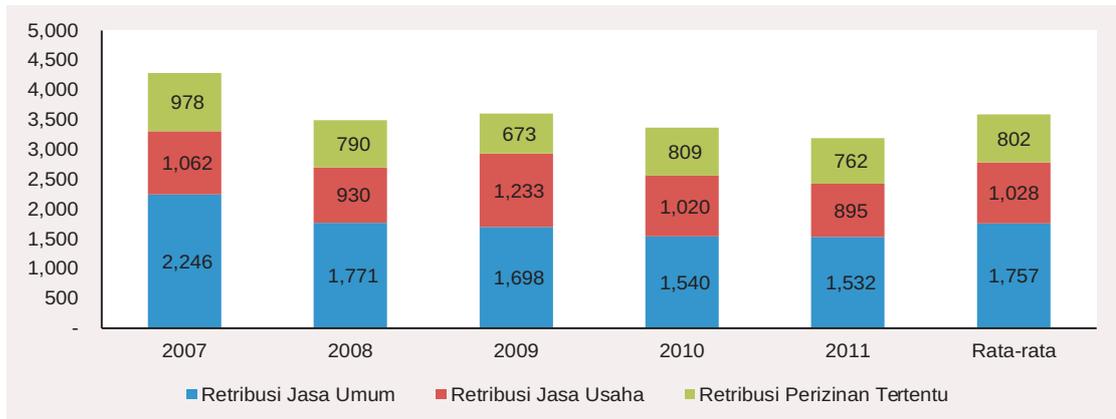
Tabel 3.1. Komposisi Pajak Daerah Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011

Sumber Pajak Daerah	Jumlah (dalam Rp Juta)					
	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
Pajak Hotel	838	1,121	1,106	1,128	1,354	1,109
Pajak Restoran	421	818	627	663	656	637
Pajak Hiburan	77	83	55	80	81	75
Pajak Reklame	1,349	1,267	1,719	1,548	1,456	1,468
Pajak Penerangan Jalan	779	592	837	1,277	902	877
Pajak Bahan Galian Golongan C	696	429	1,141	798	113	635
Pajak Air Tanah	32	27	38	36	1,544	335
Total	4,192	4,337	5,523	5,529	6,105	5,137

Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari, 2007-2011

Postur retribusi daerah Kabupaten Manokwari didominasi retribusi jasa umum selama periode 2007-2011. Walaupun komposisi retribusi didominasi oleh retribusi jasa umum namun selama lima tahun, komposisinya mengalami penurunan dari Rp 2,2 miliar di tahun 2007 menjadi Rp 1,5 miliar di tahun 2011. Retribusi jasa usaha berfluktuasi selama lima tahun, hal serupa juga terjadi pada retribusi perizinan. Penurunan komposisi dari retribusi daerah disebabkan penanganan terhadap retribusi tersebut belum dilakukan secara memadai sehingga perolehan yang pernah mencapai Rp 3,249 miliar di tahun 2007 seharusnya dapat terus ditingkatkan. Untuk itu, peran SKPD yang menangani retribusi tersebut perlu dibenahi sehingga potensi perolehan retribusi daerah mengalami peningkatan.

Gambar 3.6. Komposisi Sumber Retribusi Daerah Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011

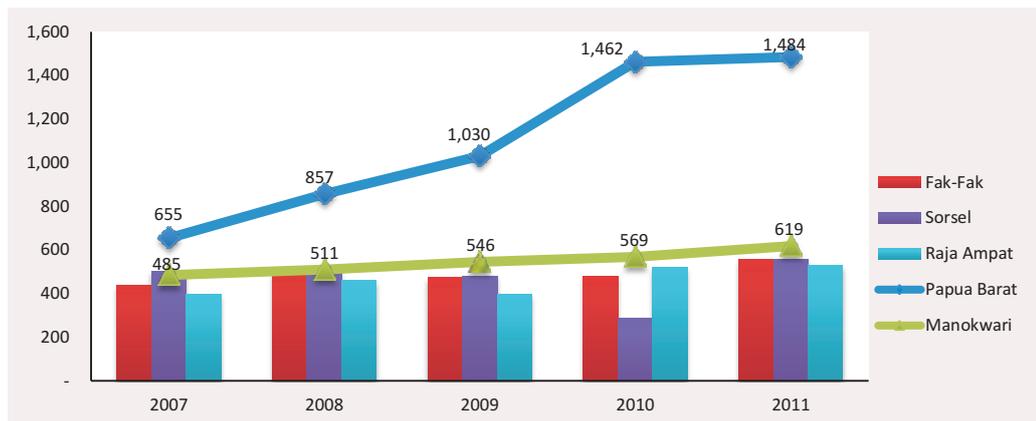


Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011

3.3. Dana Perimbangan

Perolehan dana transfer dalam bentuk dana perimbangan Kabupaten Manokwari selama lima tahun mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya, peningkatan dana perimbangan Kabupaten Manokwari cenderung stabil. Perolehan DAK untuk Kabupaten Manokwari meningkat dari Rp 50 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 60,7 miliar pada tahun 2011. Pendapatan dari DAU meningkat dari Rp 378,9 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 444 miliar pada tahun 2011. Sedangkan dana hasil bagi pajak dan bukan pajak meningkat Rp 105,7 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 334.1 miliar pada tahun 2011. Secara keseluruhan perolehan dana perimbangan Kabupaten Manokwari berada lebih tinggi dari Kabupaten lainnya. Bila dibandingkan dengan dana perimbangan Provinsi Papua Barat, dana perimbangan provinsi bukan hanya lebih tinggi, tapi juga dengan peningkatan yang tajam selama periode 2007-2011. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan ini diharapkan secara tepat dapat efektif untuk belanja penyelenggaraan pembangunan daerah sehingga perlu pengaturan yang lebih bijaksana untuk dapat mencapai visi Kabupaten Manokwari.

Gambar 3.7. Perolehan Dana Perimbangan Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011

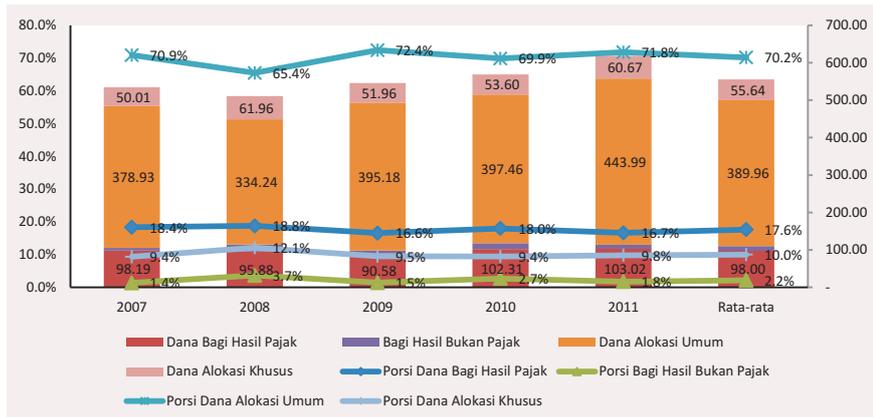


Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari, Fakfak, Sorsel, Raja Ampat, dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

Komposisi dana perimbangan selama lima tahun didominasi oleh Dana Alokasi Umum. Perolehan DAU Kabupaten Manokwari selama lima tahun mengalami fluktuasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 70,2 persen, sedangkan dana bagi hasil pajak rata-rata memberikan kontribusi sebesar 17,6 persen dan Dana Alokasi Khusus sebesar 10 persen serta dana bagi hasil sumberdaya alam sebesar 2 persen. Secara nominal peningkatan dana perimbangan disebabkan semakin meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari. Meningkatnya DAU Kabupaten Manokwari selama 5 tahun terakhir mengindikasikan bahwa DAU nasional mengalami peningkatan sedangkan celah fiskal kabupaten Manokwari belum mengalami perubahan, karena besarnya celah fiskal dipengaruhi oleh jumlah penduduk,

luas wilayah, tingkat kemahalan daerah dan output daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa meningkatnya celah fiskal disebabkan bertambahnya jumlah penduduk, dan tingkat kemahalan sehingga perhitungan DAU Kabupaten Manokwari porsinya terus mengalami peningkatan. Pemberlakuan kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan BPHTB dan PBB menjadi pajak daerah maka akan mengurangi porsi dana bagi hasil pajak, dan di aspek lain pemerintah daerah dapat lebih mengupayakan untuk meningkatkan pajak daerah sehingga ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat akan semakin berkurang. Untuk mengurangi ketergantungan Fiskal terhadap pemerintah pusat, maka perlu diapresiasi sumber penerimaan daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi, jaminan pemasaran dan membuka isolasi daerah.

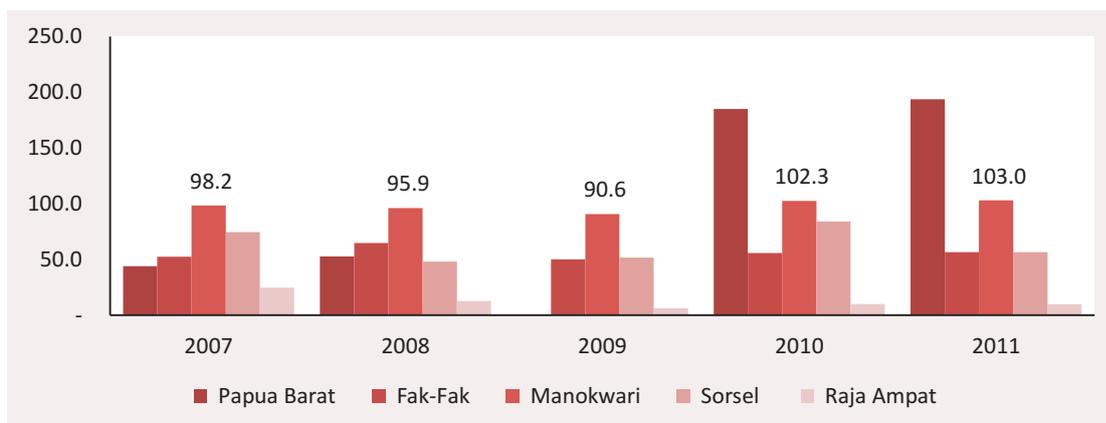
Gambar 3.8. Komposisi dan Porsi Dana Perimbangan Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011



Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari 2007-2011

Meskipun cenderung fluktuatif, dana bagi hasil pajak Kabupaten Manokwari tertinggi dibandingkan tiga kabupaten lainnya, tetapi bertumbuh lebih lambat dari dana bagi hasil pajak Provinsi Papua Barat. Walaupun perolehan bagi hasil pajak mengalami penurunan hingga tahun 2009, namun pada tahun berikutnya mulai mengalami peningkatan. Kondisi ini tentu lebih disebabkan adanya aktifitas perekonomian yang terus membaik selama 5 tahun terakhir dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Hal ini dimungkinkan karena Kabupaten Manokwari sejak menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Barat, maka aktivitas perekonomian mulai mengalami peningkatan yang ditandai dengan arus barang dan jasa keluar-masuk juga mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan ini dapat terus berlangsung melalui penataan iklim investasi yang lebih kondusif, sehingga sumber-sumber penerimaan dari obyek bagi hasil pajak juga diharapkan mengalami peningkatan secara berkesinambungan.

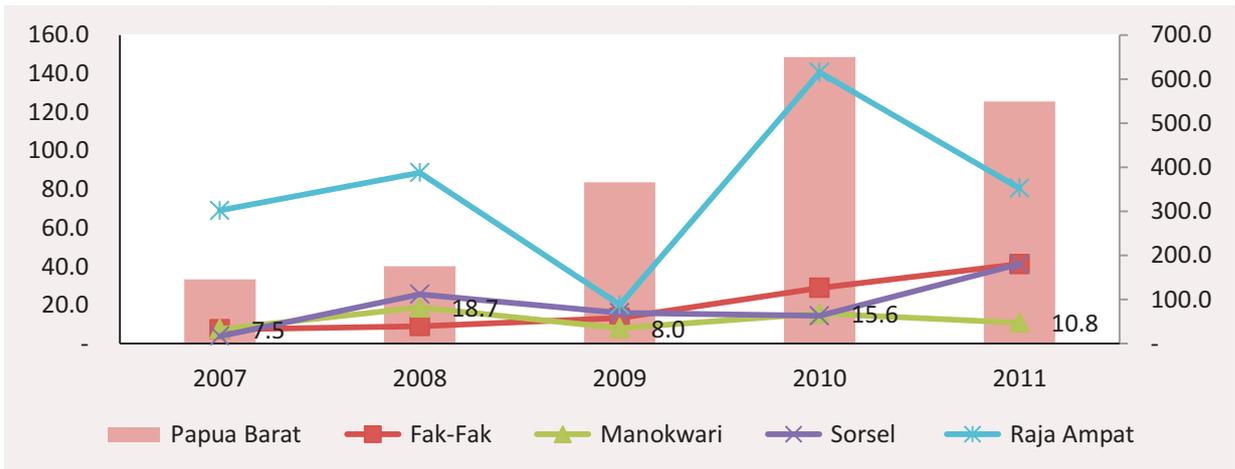
Gambar 3.9. Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011



Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari, Fakfak, Sorsel, Raja Ampat dan Provinsi Papua, 2007-2011

Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Manokwari, bukan hanya bertumbuh lambat, tapi juga yang terendah dibandingkan tiga kabupaten lainnya. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya penerimaan bagi hasil bukan pajak lebih kecil dengan rata-rata Rp 12,1 miliar, sedangkan Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan hingga tahun 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDA sebagai sumber utama dana bagi hasil bukan pajak berlangsung lambat. Dapat dikatakan bahwa pada daerah-daerah lainnya eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumberdaya alam telah berlangsung lama selama ini dan meningkat cukup tinggi pada tahun 2009 s.d 2011. Untuk mengatur tingkat eksploitasi SDA di Kabupaten Manokwari perlu ditinjau lagi beberapa sumberdaya alam yang dikelola seperti sektor kehutanan, dan kelautan sehingga pengelolannya dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Gambar 3.10. Perkembangan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011

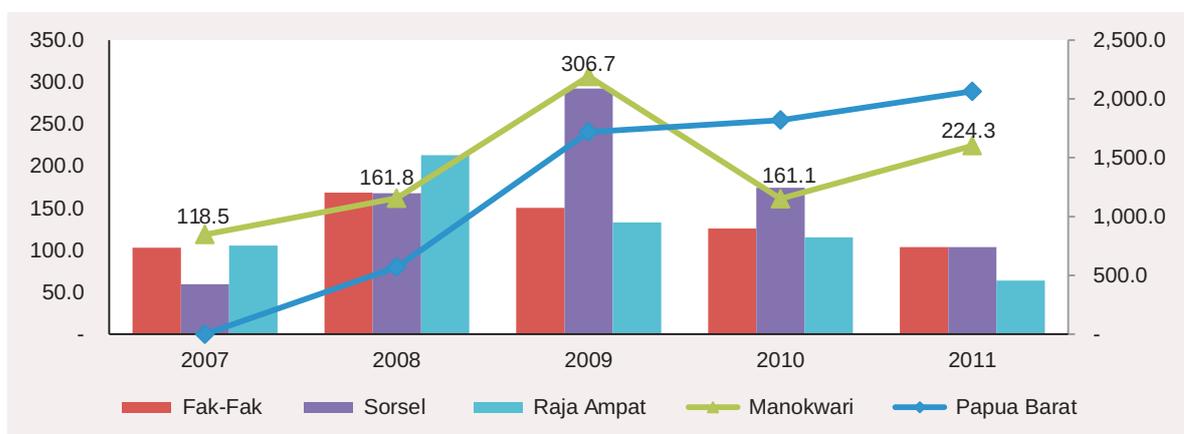


Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari, Fakfak, Sorsel, Raja Ampat, dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

3.4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Meskipun fluktuatif, pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Manokwari meningkat dua kali lipat dan lebih besar dari tiga kabupaten lainnya selama periode 2007-2011. Rata-rata perolehan dari sumber dana tersebut selama lima tahun sebesar Rp 195,5 miliar dan pendapatan dari pengembalian memiliki porsi yang terbesar dari komponen pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah yakni 20 persen. Dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, Kabupaten Manokwari memiliki nilai nominal terbesar.

Gambar 3.11. Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011

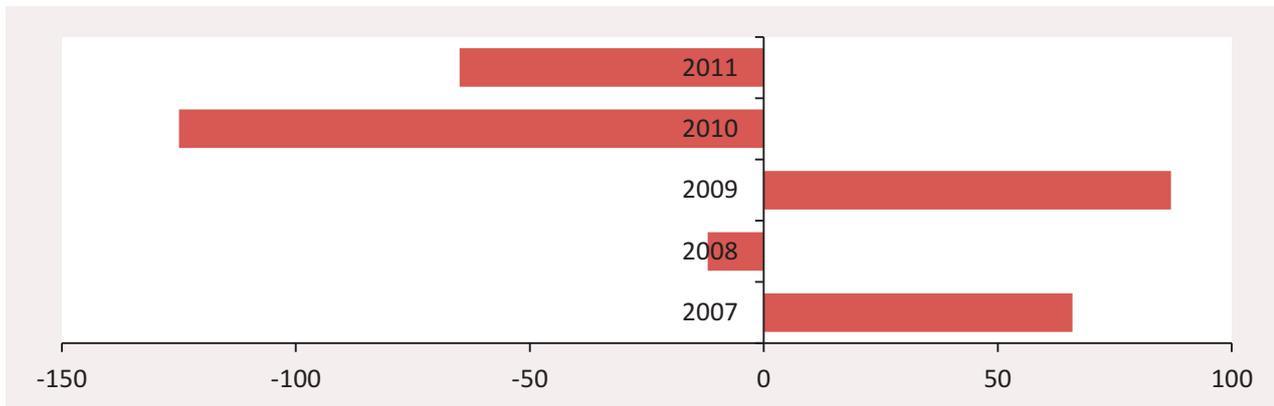


Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari, Fakfak, Sorsel, Raja Ampat, dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

3.5. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah riil Kabupaten Manokwari mengalami lebih dominan mengalami defisit selama periode 2007-2011. Defisit terbesar dialami pada tahun 2010, terutama karena rendahnya pencapaian realisasi pendapatan pada satu sisi, dan besarnya realisasi belanja pada sisi yang lain. Peningkatan belanja pemerintah daerah cukup signifikan seiring dengan peningkatan signifikan kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh satuan kerja perangkat daerah juga meningkat. Sumber pembiayaan defisit sebagian besar berasal dari SiLPA dan sumber-sumber lainnya. Nampaknya pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menyikapi defisit ini, terutama periode 2010-2011 besaran defisit telah melampaui ketentuan perundangan 3 persen dari APBD.

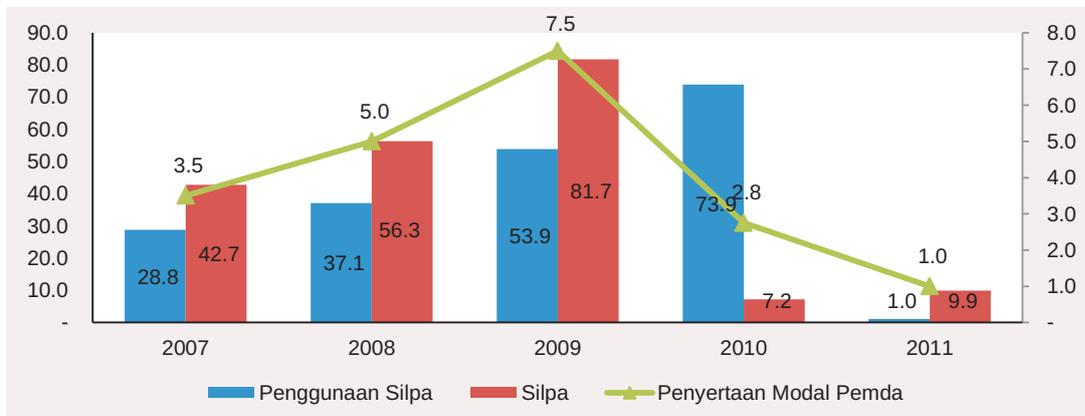
Gambar 3.12. Perkembangan Pembiayaan Daerah Riil (Surplus/Defisit) Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011 (dalam Rp miliar)



Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari, 2007-2011

Penerimaan pembiayaan sebagian besar berasal dari SiLPA dan cenderung meningkat hingga tahun 2010. Penggunaan SiLPA sejak tahun 2007 sampai 2009 lebih kecil dari SiLPA pada tahun tersebut, kemudian pada tahun berikutnya SiLPA mengalami penurunan. Adanya SiLPA mengindikasikan sejumlah kegiatan belanja tidak direalisasi. Sementara itu pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal, mengalami peningkatan hingga tahun 2009 mencapai Rp 7,2 miliar namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan. SiLPA dapat terjadi karena kurang baiknya perencanaan dan penganggaran, sementara pemanfaatannya untuk penyertaan modal tidak konsisten karena pemerintah belum memiliki rencana pemanfaatan surplus pembiayaan untuk kegiatan produktif. Akibatnya, pemerintah daerah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tambahan penerimaan. Untuk itu dilakukan pembenahan terhadap perencanaan penganggaran sehingga SiLPA yang terjadi dapat dikurangi.

Gambar 3.13. Perkembangan SiLPA dan Penggunaannya, serta Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011 (dalam Rp miliar)

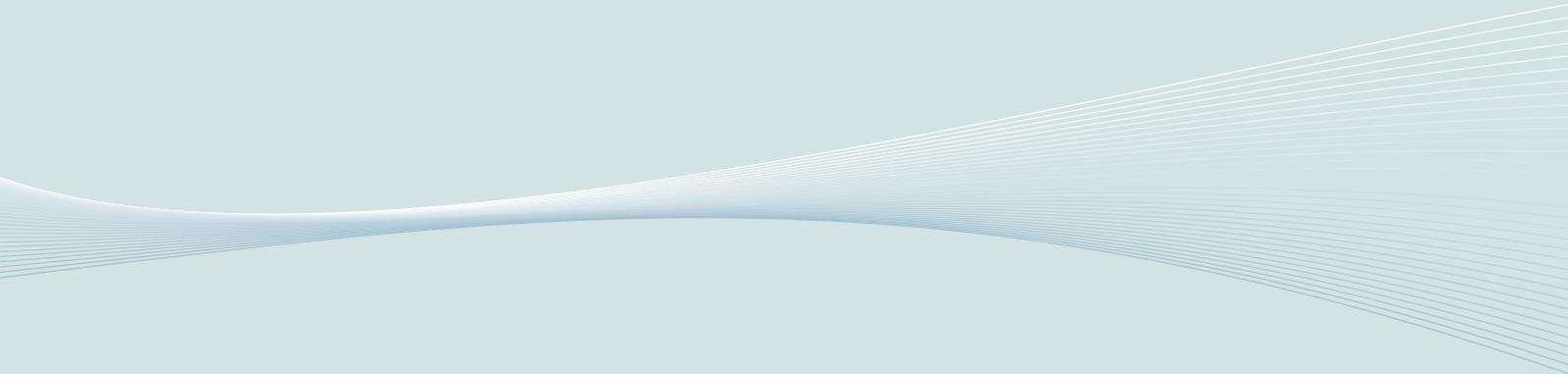


Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari, 2007-2011

3.6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Ketergantungan fiskal Kabupaten Manokwari masih sangat tinggi selama periode 2007-2011. Implikasinya, peningkatan sumber-sumber PAD untuk menyelaraskan tujuan otonomi daerah perlu diapresiasi. Rekomendasi pentingnya antara lain: (1) Perluasan basis penerimaan PAD melalui pembayar pajak/retribusi dan menjangkau wajib pajak/retribusi baru, meningkatkan basis data obyek pajak/retribusi, penilaian kembali (*appraisal*) atas obyek pajak/retribusi; (2) Pengendalian atas kebocoran pendapatan dari pajak dan retribusi melalui audit pendapatan baik rutin maupun insidental, perbaikan sistem akuntansi penerimaan daerah, peningkatan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pungutan liar; (3) Melakukan pengkajian akademik terhadap penyebab menurunnya penerimaan PAD; (4) Menindaklanjuti pemberlakuan secara efektif UU No. 28 Tahun 2009 dimana akan dilimpahkan kewenangan PBB (Perdesaan-Perkotaan) dan BPHTB ke kabupaten/kota, maka persiapan dari segi kelembagaan regulasi, SDM serta sarana dan prasarana perlu dipikirkan dengan baik, sehingga pelimpahan kewenangan pemungutan tersebut dapat meningkatkan PAD melalui pajak daerah; (5) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu dilakukan persiapan terkait dengan Sumber Daya manusia beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pengelolaan PBB tersebut dapat menjadi sumber potensial bagi pendapatan daerah.





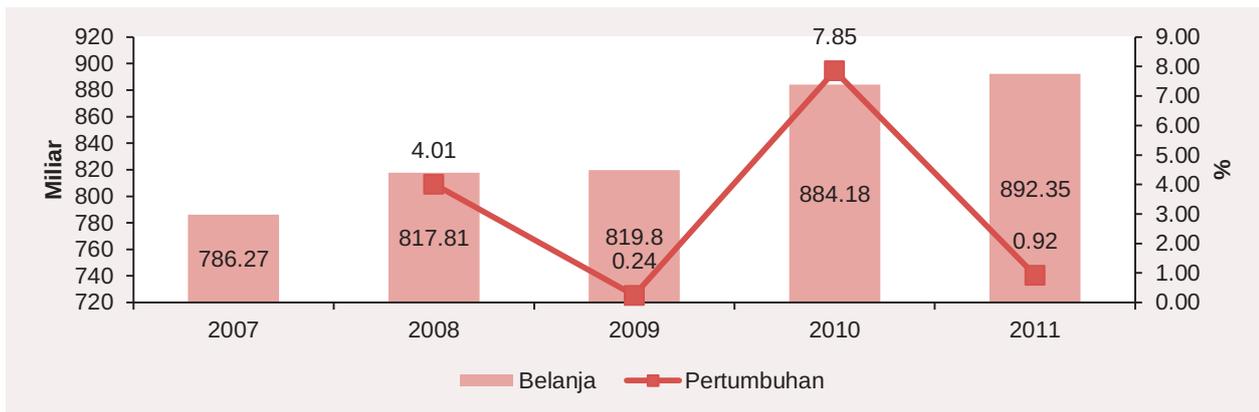
4 BELANJA
DAERAH



4.1. Gambaran Umum Belanja Daerah

Belanja riil Kabupaten Manokwari mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan yang cukup berfluktuasi. Pada tahun 2007, belanja riil sebesar Rp 786,27 miliar meningkat menjadi Rp 892,35 miliar pada tahun 2011 atau secara rata-rata sebesar Rp 840,08 miliar per tahun. Laju pertumbuhan pada tahun 2008 sebesar 4,01 persen kemudian menurun menjadi 0,24 persen pada tahun 2009, selanjutnya bertumbuh sangat tinggi mencapai 7,85 persen (Rp 884,18 miliar) pada tahun 2010. Belanja riil Kabupaten Manokwari lebih banyak disumbang oleh belanja langsung yaitu 64,6 persen per tahun atau Rp 543,11 miliar, sementara kontribusi belanja tidak langsung rata-rata 35,4 persen dari total belanja atau Rp 296,98 miliar per tahun.

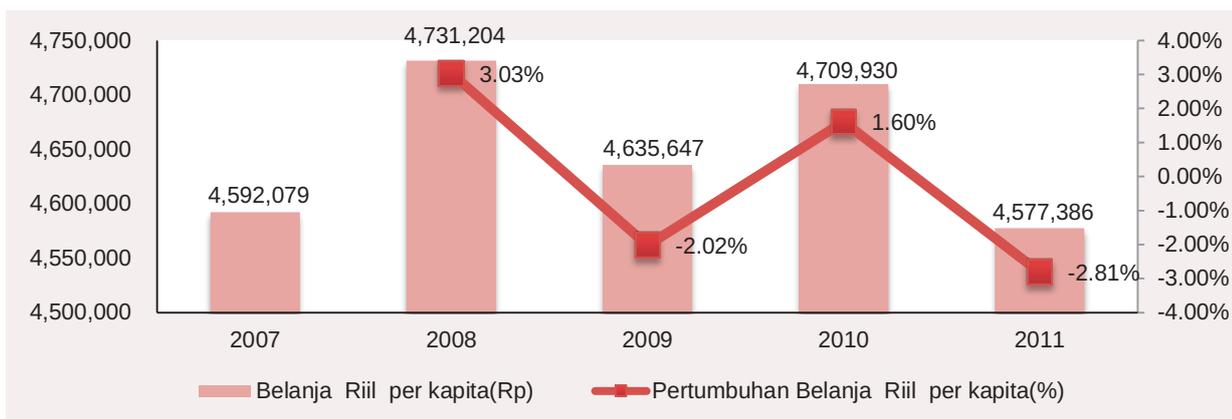
Gambar 4.1. Perkembangan Belanja Riil Kabupaten Manokwari, 2007-2011



Sumber: APBD Kabupaten Manokwari (data diolah).

Meskipun belanja daerah mengalami peningkatan, namun secara per kapita berfluktuasi setiap tahun. Selama 5 tahun pengamatan, belanja riil perkapita rata-rata sebesar Rp 4,663,542. Ini berarti setiap penduduk di Kabupaten Manokwari memperoleh alokasi belanja rata-rata setiap tahunnya Rp 4,66 juta. Bahkan pernah mencapai Rp 4,7 juta yaitu pada tahun 2008 dan 2010. Namun pada tahun 2011, setiap penduduk hanya memperoleh alokasi belanja sebesar Rp 4,58 juta atau bertumbuh negatif dibandingkan dari tahun 2010.

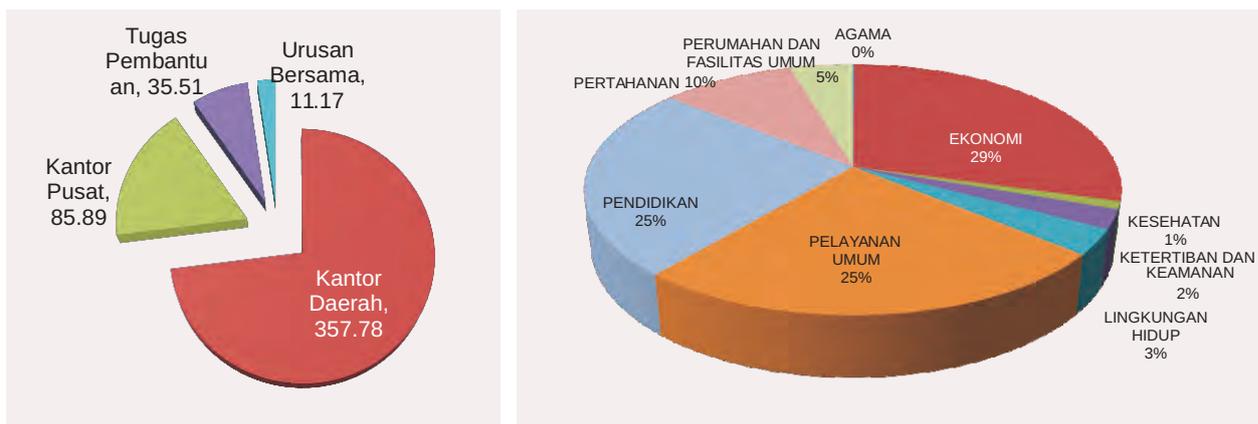
Gambar 4.2. Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Riil per Kapita Kabupaten Manokwari Tahun 2007-2011



Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari 2007-2011 (Data diolah dalam miliar rupiah dan persen)

Dana APBN yang dibelanjakan di Kabupaten Manokwari pada tahun 2011 sebesar Rp 490,35 miliar yang terdistribusi pada lembaga Kantor Daerah, Kantor Pusat, urusan bersama, dan tugas pembantuan. Jumlah dana APBN yang dikelola oleh Kantor Daerah di kabupaten ini sebesar Rp 357,78 miliar (73 persen dari total belanja pusat di Kabupaten Manokwari), kemudian disusul oleh Kantor Pusat sebesar Rp 85,89 miliar (18 persen) dan tugas pembantuan sebesar Rp 35,51 miliar. Proporsi belanja terbesar dialokasikan pada fungsi ekonomi sebesar 29 persen, kemudian fungsi pendidikan dan pelayanan umum masing-masing 25 persen. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong perkembangan sosial ekonomi di Kabupaten Manokwari.

Gambar 4.3. Dana APBN yang dibelanjakan di Kabupaten Manokwari, 2011

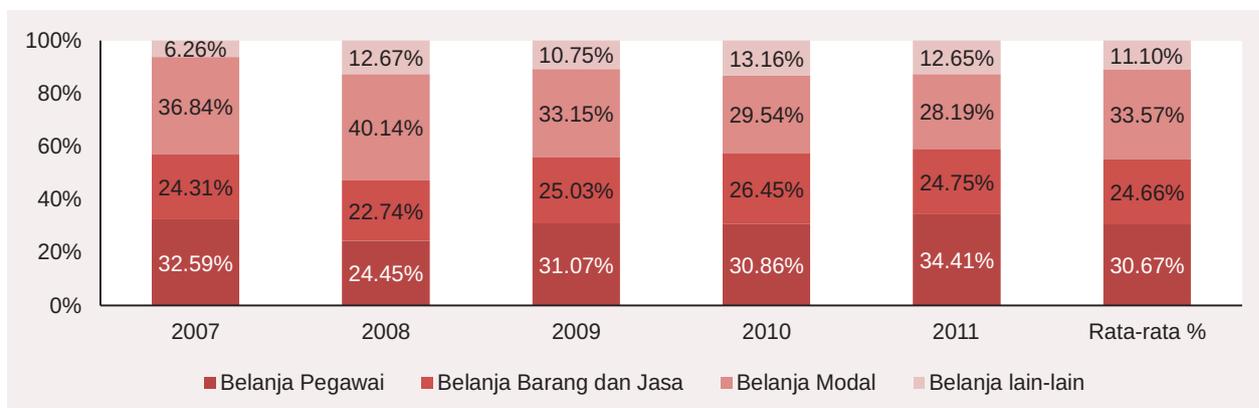


Sumber: Kementerian Keuangan, DJPK, 2013

4.2. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

Belanja pemerintah Kabupaten Manokwari menurut klasifikasi ekonomi didominasi oleh belanja modal. Selama periode 2007-2011, porsi belanja modal terhadap total belanja daerah 35 persen atau rata-rata Rp 280,5 miliar, kemudian belanja pegawai sebesar Rp 258,2 miliar atau 30,6 persen, sedangkan belanja barang dan jasa, dan lain-lain mencapai 24 persen dan 11 persen. Proporsi belanja modal cenderung menurun digantikan oleh proporsi belanja pegawai yang mencapai 34,41 persen pada tahun 2011. Peningkatan porsi belanja pegawai di tahun 2011 disamping dipengaruhi oleh pembayaran gaji pegawai negeri juga disebabkan oleh pembayaran honorarium yang terkait dengan sejumlah kegiatan yang dibelanjai oleh seluruh SKPD. Rata-rata proporsi belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanja daerah sebesar 24 persen dan rata-rata proporsi belanja pegawai terhadap total belanja langsung sebesar 7 persen.

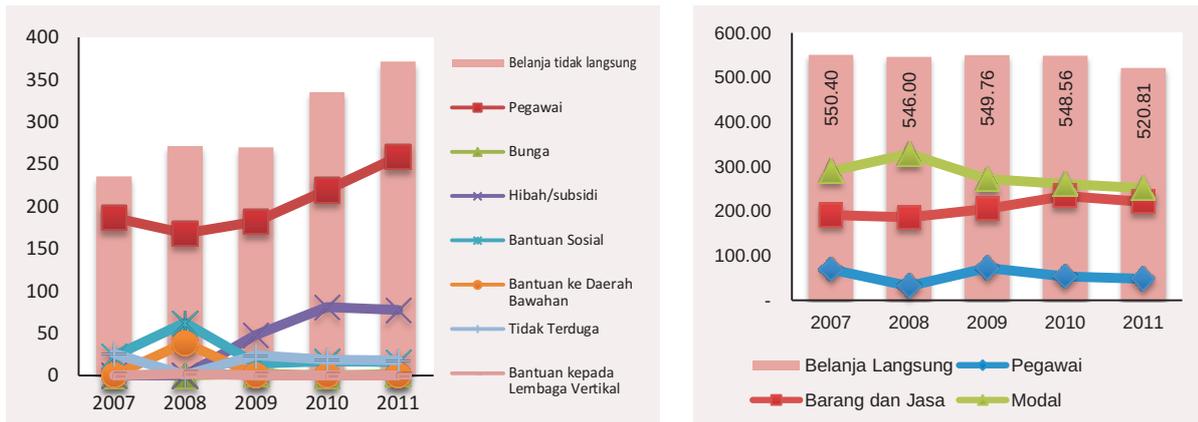
Gambar 4.4. Komposisi Belanja Riil Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Kabupaten Manokwari Tahun 2007-2011



Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari 2007-2011 (Data diolah dalam rasio)

Alokasi belanja terbesar pada belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, sementara pada belanja langsung adalah belanja modal. Selama 5 tahun terakhir, alokasi belanja pegawai pada belanja tidak langsung meningkat cukup signifikan dari Rp 186 miliar di tahun 2007 menjadi Rp 258 miliar di tahun 2011, kemudian disusul oleh peningkatan belanja hibah/subsidi. Komponen belanja lain seperti bantuan keuangan, dan bantuan sosial relative kecil. Untuk belanja langsung, alokasi belanja modal cenderung menurun dari Rp 289 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 251 miliar di tahun 2011 dan penurunan belanja pegawai dari Rp 69 miliar di tahun 2007 menjadi Rp 48 miliar di tahun 2011. Hanya belanja barang mengalami kenaikan dari Rp 191 miliar menjadi 220 miliar di tahun 2011.

Gambar 4.5. Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, 2007-2011



Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari 2007-2011 (Data Diolah dalam rasio)

4.3. Belanja Riil Menurut Klasifikasi Sektoral

Proporsi belanja terbesar menurut sektor ditempati oleh sektor pemerintahan umum dan sektor pendidikan menempati urutan terbesar kedua meskipun dengan alokasi belanja yang cukup berfluktuasi. Dalam kurun waktu 2007-2011, rata-rata proporsi belanja untuk sektor pemerintahan umum sebesar Rp 299,47 miliar atau rata-rata 35,6 persen per tahun. Sementara belanja untuk sektor pendidikan rata-rata Rp 169,33 miliar atau sekitar 20,2 persen per tahun. Hal ini berarti belanja sektor pendidikan telah memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tingginya porsi belanja untuk sektor pemerintahan umum menekan porsi belanja untuk sektor-sektor lainnya. Sektor-sektor lainnya secara umum memperoleh alokasi belanja dibawah dari 20 persen dan terendah adalah sektor pertanian rata-rata sekitar 2,9 persen. Sementara sektor infrastruktur yang diwakili oleh urusan pekerjaan umum hanya memperoleh alokasi belanja rata-rata 13,6 persen. Kondisi belanja sektoral seperti ini belum konsisten dengan prioritas pembangunan daerah, yang menempatkan pertanian sebagai *leading sector* dan pendidikan, kesehatan sebagai prioritas utama. Salah satu penyebab inkonsistensi tersebut adalah dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran yang belum konsisten.

Gambar 4.6. Komposisi dan Perkembangan Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Sektoral Kabupaten Manokwari



Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari 2007-2011 (Data Diolah)

Alokasi belanja sektor infrastruktur di Kabupaten Manokwari masih tergolong rendah dan berfluktuasi. Pada tahun 2007, alokasi belanja untuk sektor infrastruktur khususnya pekerjaan umum sebesar Rp 102,67 miliar, namun pada tahun 2011 menurun drastis hingga mencapai Rp 63,31 miliar. Pada satu sisi, keberadaan sektor infrastruktur di kabupaten ini masih sangat dibutuhkan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat disekitarnya. Penurunan yang tajam alokasi belanja sektor pekerjaan umum cukup berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Manokwari. Penurunan belanja sektor infrastruktur, pertanian dan kesehatan mengindikasikan penurunan peran pemerintah dari sisi penganggaran.

Tabel 4.1. Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Sektoral di Kabupaten Manokwari

Belanja Urusan	Belanja Sektoral (Rupiah miliar)					
	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
Pendidikan	143.27	157.47	154.96	184.69	206.25	169.33
Kesehatan	67.55	72.58	74.62	56.47	49.92	64.23
Pekerjaan Umum	102.67	95.65	178.31	132.12	63.31	114.41
Pertanian	30.34	19.13	22.63	26.26	22.81	24.24
Pemerintahan umum	295.43	269.50	278.78	350.47	303.15	299.47
Lain-lain	146.99	203.48	110.48	134.15	246.92	168.41
Total	786.27	817.81	819.80	884.18	892.35	840.08

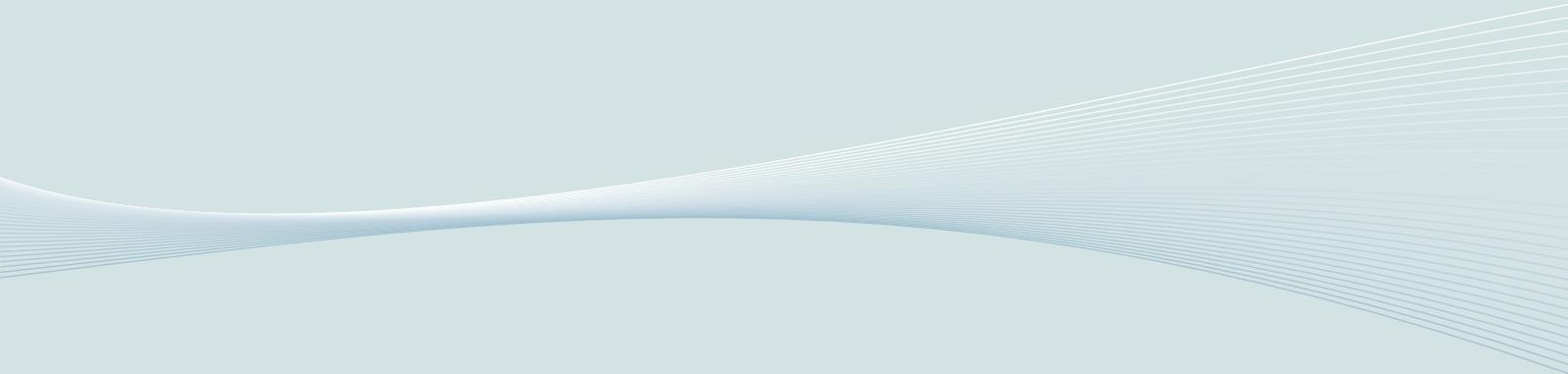
Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari 2007-2011 (Data diolah)

4.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Belanja daerah di Kabupaten Manokwari mengalami perkembangan yang cukup lambat dan cenderung berfluktuasi. Porsi belanja daerah terbesar adalah belanja langsung namun mengalami penurunan hingga tahun 2011, sementara porsi belanja tidak langsung cenderung meningkat. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, belanja modal menempati urutan terbesar tetapi bergeser ke arah yang lebih rendah pada beberapa tahun terakhir, sementara porsi belanja pegawai mengalami peningkatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persentase belanja untuk pembayaran gaji pegawai lebih besar daripada persentase belanja modal. Diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari agar ke depan: (i) tetap memperhatikan porsi belanja modal melalui penghematan belanja pada barang dan jasa, (ii) penyusunan perencanaan dan penganggaran secara konsisten dan disiplin perlu dikedepankan.

Berdasarkan klasifikasi sektor, alokasi belanja untuk pemerintahan umum lebih mendominasi dibandingkan dengan alokasi belanja untuk sektor lainnya. Sementara sektor-sektor strategis di Kabupaten Manokwari seperti sektor infrastruktur, pertanian, kesehatan memperoleh alokasi belanja yang relatif kecil. Di satu sisi, pembangunan sektor infrastruktur dan pembangunan bidang pertanian di kabupaten ini masing-masing sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar ke depan, pemerintah

daerah perlu memperhatikan pengembangan sektor infrastruktur dan pertanian melalui kegiatan-kegiatan berikut: (i) perlu dukungan kebijakan penganggaran untuk meningkatkan porsi belanja sektor infrastruktur dan sektor pertanian, (ii) perlu kerjasama dengan pihak swasta untuk mendorong pengembangan sektor infrastruktur, (iv) menciptakan iklim yang kondusif agar sektor swasta dapat berpartisipasi untuk melakukan investasi di berbagai bidang. (v) penyusunan perencanaan dan penganggaran secara konsisten terutama pada saat penyusunan renja dan RKA SKPD agar program dan kegiatan prioritas memperoleh alokasi belanja yang cukup memadai. (v) porsi belanja untuk pendidikan tetap dipertahankan sesuai dengan regulasi 20%.



5 SEKTOR-SEKTOR
STRATEGIS



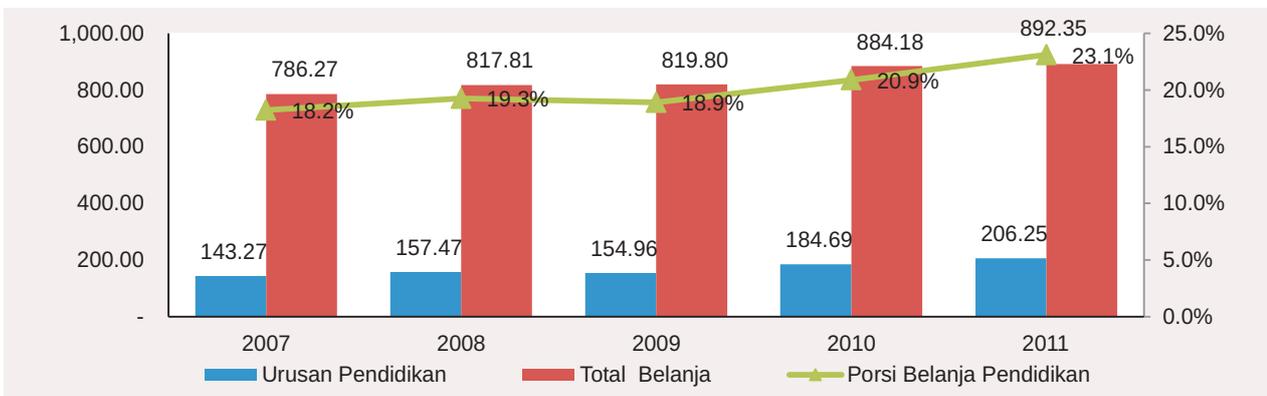
5.1. Sektor Pendidikan

Prioritas pembangunan pendidikan Kabupaten Manokwari adalah pemerataan pendidikan, penuntasan wajib belajar 9 tahun, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan peran masyarakat, dan peran pendidikan dalam pembangunan daerah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Renstra Pendidikan Kabupaten Manokwari tahun 2010-2015. Sedangkan program prioritas pendidikan berfokus pada peningkatan akses pendidikan murah dan bermutu.

5.1.1. Belanja Sektor Pendidikan

Proporsi belanja riil sektor pendidikan terhadap total belanja riil Kabupaten Manokwari selama kurun waktu tersebut sebesar 20,2% dengan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, proporsi belanja pendidikan terhadap total belanja daerah sebesar 18,2% dan sampai dengan tahun 2011 sudah mencapai 23,1%. Peningkatan belanja pendidikan yang cukup besar terjadi tahun 2010 ini, sebagian besar dialokasikan untuk program wajib belajar sembilan tahun. Hal ini menunjukkan fokus perhatian pemerintah untuk mensukseskan program wajib belajar tersebut sebagai prioritas utama.

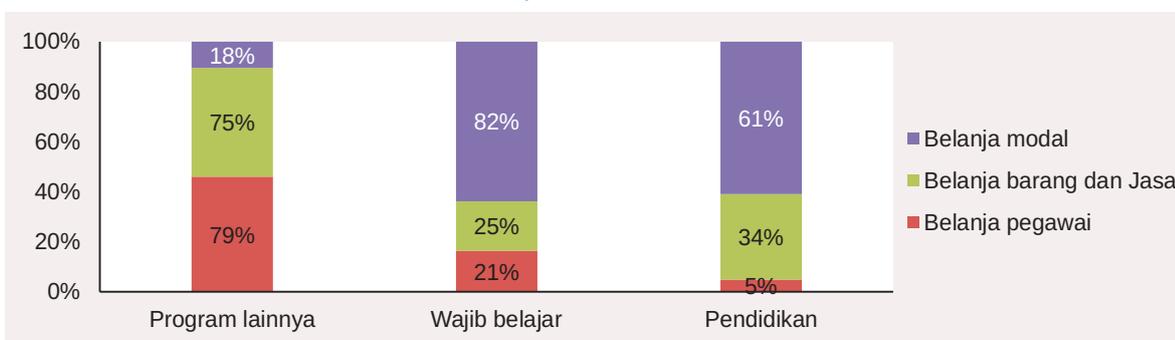
Gambar 5.1. Perbandingan Belanja Pendidikan dengan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari



Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari 2007-2011 (Data Diolah)

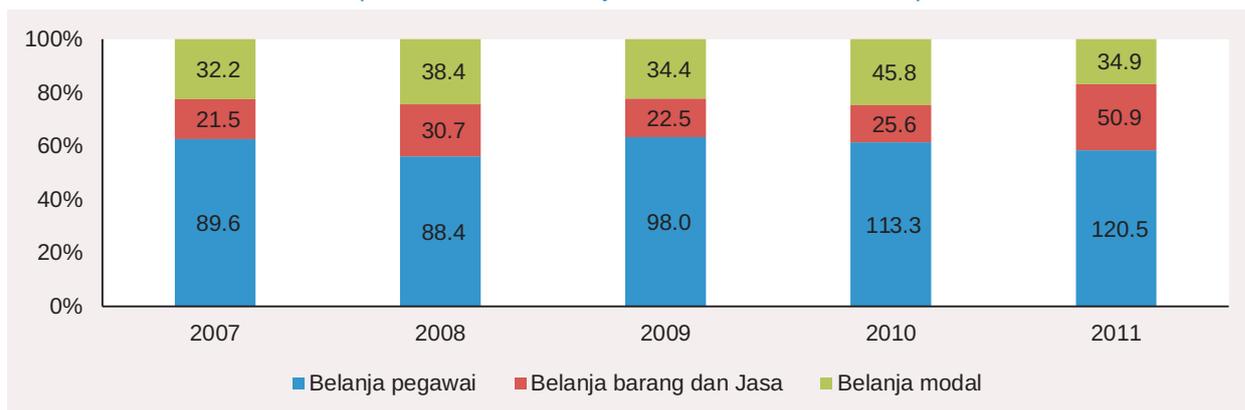
Program wajib belajar mendapatkan prioritas dengan alokasi belanja modal pendidikan sebesar 61% yang dialokasikan untuk wajib belajar sebesar 82%, sedangkan program lainnya hanya 18%. Belanja barang dan jasa sektor pendidikan sebesar 34% dialokasikan 25% untuk program wajib belajar, 75% untuk program lainnya dan 5% belanja pegawai sektor pendidikan dialokasikan 21% untuk wajib belajar dan 79% untuk program lainnya.

Gambar 5.2. Alokasi Belanja Pendidikan untuk Program Wajib belajar dan Program lainnya di Kabupaten Manokwari



Sebagian besar belanja pendidikan digunakan untuk belanja pegawai dan jumlahnya meningkat selama 5 tahun. Belanja pegawai tahun 2007 sebesar Rp 89,6 miliar naik menjadi 120,5 tahun 2011. Belanja modal dan belanja barang dan jasa merupakan sisa dari belanja pegawai dan perubahannya ditentukan oleh perubahan belanja pegawai dan secara nominal belanja riilnya mengalami peningkatan. Mengutamakan belanja pegawai dalam belanja pendidikan tersebut dapat dipahami, karena tenaga pendidikan merupakan salah satu komponen utama sektor pendidikan yang harus mendapatkan insentif yang lebih tinggi. Namun perlu diperhatikan bahwa tenaga kependidikan tersebut harus dilengkapi dengan pengembangan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Gambar 5.3. Komposisi Alokasi Belanja Riil Pendidikan di Kabupaten Manokwari



Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari 2007-2011 (Data diolah)

5.1.2. Kinerja Keluaran dan Hasil Sektor Pendidikan

Meningkatnya belanja riil pendidikan belum diikuti perbaikan sejumlah kinerja hasil sektor pendidikan. Rasio murid-sekolah (RMS) dan rasio murid-guru (RMG) cenderung menurun di semua tingkat pendidikan, selama periode tersebut. Wajib pendidikan anak usia dini mengalami peningkatan partisipasi anak dengan jumlah anak usia dini mencapai 2362 pada PAUD Formal dan 5062 pada PAUD non Formal.

Tabel 5.1 Pencapaian Indikator Urusan Wajib Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Manokwari

Uraian	2007	2008	2009	2010
1.PAUD Formal		48	50	52
APK	12,27	11,96	11,1	11,08
Guru		183	182	182
Murid		2.235		2.362
2.PAUD Non Formal		46	167	178
APK	1,55	6,96	20,4	22,43
Tutor				410
Murid				5062

Pada jenjang pendidikan sekolah dasar indikator yang dicapai selama tahun 2009 sampai 2010, belum memenuhi standar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Renstra Kementerian Pendidikan sehingga masih perlu dilakukan pembenahan terhadap kinerja keluaran di sektor pendidikan tersebut.

Tabel 5.2 Pencapaian Indikator Urusan Wajib Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Manokwari

Indikator	2009	2010	2011	SPM*
1. APM	88,40	88,44	*	96,00
2. APK	113,70	110,96	*	119,11
3. Partisipasi anak bersekolah (APS) 7-12	91,24	89,5	*	99,90
4. Angka putus sekolah		0,8	0,66	0,70
• Jumlah Siswa Putus Sekolah		262	237	
• Jumlah Siswa SD	31.968	32.010	35.912	
5. Kualifikasi guru berpendidikan S1 – D4		6	*	88
6. Prosentase Guru yang memiliki sertifikasi profesi		7,5	18,55	80
• Jumlah Guru Bersertifikat		79	201	
• Jumlah Guru SD	1.229	1.054	1.111	
7. Rasio Guru dan murid	27	31	32	36
8. Jumlah siswa per kelas	36	31	32	32
• Jumlah Ruang Kelas	551	1.019	1.108	
• Jumlah Siswa	31.968	32.010	35.912	
9. Rasio murid sekolah	678			97
10. Jumlah sekolah	202			

Pencapaian indikator pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya dicapai oleh indikator partisipasi anak bersekolah. Indikator lainnya belum mencapai standar yang ditetapkan sehingga kedepan perlu dilakukan pembenahan terhadap penanganan tersebut.

Tabel 5.3 Pencapaian Indikator Urusan Wajib Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manokwari, 2008-2011

Indikator	2008	2009	2010	2011	SPM*
1. APM			55,34	63,35	76,8
2. APK			68,07		110
3. Partisipasi anak bersekolah			90,84		76,8
4. Angka putus sekolah			0,74	0,75	1
• Jumlah Siswa Putus Sekolah			70	74	
5. Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis					
6. Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru				49,66	
7. Rasio Guru dengan murid		59	33	28	
8. Kualifikasi guru berpendidikan S1 – D4			53		99
9. Prosentase Guru yang memiliki sertifikasi profesi			23	53,82	90
• Jumlah Guru Bersertifikat			84	190	
• Jumlah Guru SMP			366	383	
10. Jumlah siswa per kelas			31	29	36
• Jumlah Siswa	8.550	9.133	9.471	9.857	
• Jumlah Ruang Kelas			307	333	
11. Rasio murid sekolah	222				

Pencapaian indikator pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Manokwari belum terpenuhi sehingga pembenahan terhadap indikator SMA perlu dilakukan agar di masa mendatang dapat diperoleh capaian sesuai dengan standar pendidikan. Pembenahan tersebut dilakukan terhadap kinerja guru baik secara kualitas maupun kuantitas, sarana pendukung dan luaran lulusan.

Tabel 5.4. Pencapaian Indikator Urusan Wajib Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manokwari

Indikator	2008	2009	2010	2011	SPM*
1. APM			51,26		
2. APK			84,48		85
3. Partisipasi anak bersekolah			68,69	50,73	
4. Angka putus sekolah (SMA/SMK)			1,38	0,19	
• Jumlah Siswa Putus Sekolah			107	16	
• Jumlah Siswa			7783	8006	
5. Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan					90
6. Rasio Guru dengan murid (SMA)			59	17	
• Jumlah Guru				307	
• Jumlah Siswa				5317	
7. Rasio Guru dengan murid (SMK)			59	28	
• Jumlah Guru			45	96	
• Jumlah Siswa			2670	2689	
8. Kualifikasi guru berpendidikan S1 – D4			84		98
9. Prosentase Guru yang memiliki sertifikasi profesi			27	44,05	90
• Jumlah Guru Bersertifikat				137	
• Jumlah Guru SMA/SMK				311	
10. Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa			0,7	20	
11. Jumlah siswa per kelas (SMA)			36	33	
• Jumlah Ruang			143	163	
• Jumlah Siswa			5107	5317	
12. Jumlah siswa per kelas (SMK)			33	37	
• Jumlah Ruang			80	75	
• Jumlah Siswa			2670	2689	
13. Jumlah lulusan yang melanjutkan ke PT yang terakreditasi				48,9	

Peningkatan belanja pendidikan berpengaruh terhadap semakin meningkatnya indikator hasil pendidikan. Peningkatan indikator hasil pendidikan Kabupaten Manokwari menunjukkan Angka Melek Huruf sebesar 87,9% pada tahun 2010 berada di atas indikator AMH Papua Barat dan rata-rata lama sekolah masih jauh berada di bawah rata-rata Papua Barat. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan IPM pendidikan Kabupaten Manokwari adalah dengan meningkatkan kinerja sektor pendidikan dalam indikator rata-rata lama sekolah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menyusun program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian tersebut. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mampu meningkatkan APS yang sasarannya sampai pada jenjang pendidikan tingkat SMP. Sementara itu, persentase APS penduduk usia SMA (16-18 tahun) Kabupaten Manokwari berada pada kisaran 68,69%. Angka ini menunjukkan program keberlanjutan pendidikan dari tingkat SMP ke SMA dan ketersediaan fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan di tingkat SMA yang mampu memudahkan akses penduduk pada semua jenjang pendidikan.

5.1.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Rasio murid dengan guru pada setiap tingkatan dapat dikatakan cukup ideal walaupun belum memenuhi standar indikator SPM. Rasio murid dengan guru menunjukkan arah perbaikan. Bantuan langsung untuk anak sekolah melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) bersumber dari (APBN) dan bantuan operasional pendidikan (BOP) bersumber dari (APBD) merupakan salah satu sarana yang mendorong peningkatan RMG. Dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dan menurunkan angka putus sekolah, maka capaian yang diperoleh sesuai target SPM, masih perlu dilakukan pembenahan pada semua jenjang pendidikan.

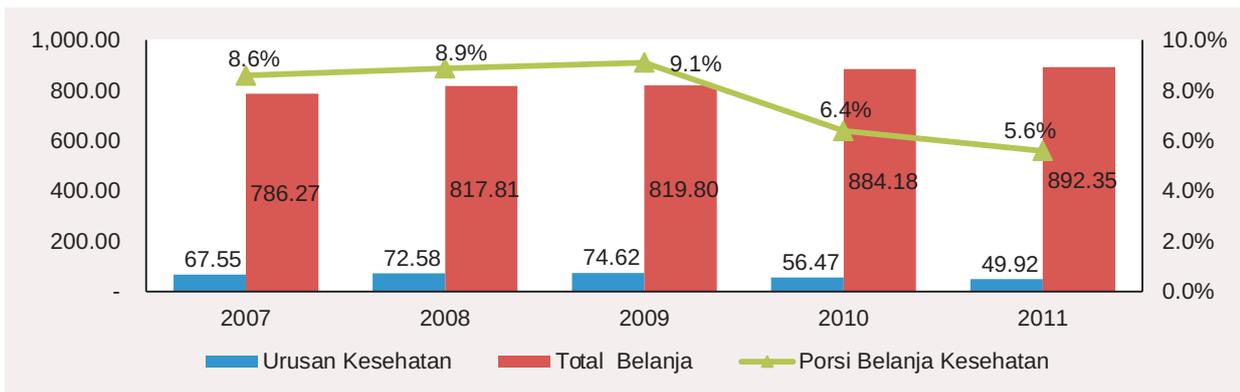
5.2. Sektor Kesehatan

Tujuan utama dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari tahun 2011-2015 adalah peningkatan indeks pembangunan kesehatan masyarakat dan peningkatan ketersediaan obat generik pada sarana pelayanan kesehatan dasar. Indikator kinerja sektor kesehatan memperlihatkan adanya kecenderungan peningkatan tenaga kesehatan dan akses fasilitas kesehatan bagi masyarakat, walaupun belum merata sampai ke distrik-distrik.

5.2.1. Belanja Sektor Kesehatan

Proporsi belanja sektor kesehatan terhadap total belanja daerah di Kabupaten Manokwari rata-rata mencapai 7,6 % setiap tahunnya. Porsi alokasi belanja kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2007 sampai 2009 hingga mencapai 9,1% dari belanja daerah, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan porsi belanja hingga 5,6% di tahun 2011. Berdasarkan pengalokasian tersebut program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu serta jaringannya mendapatkan kontribusi dana hingga 42,01% dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat mencapai 27,53%. Meskipun tidak terdapat program khusus untuk penurunan AKI dan AKB, namun dalam program upaya kesehatan masyarakat terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

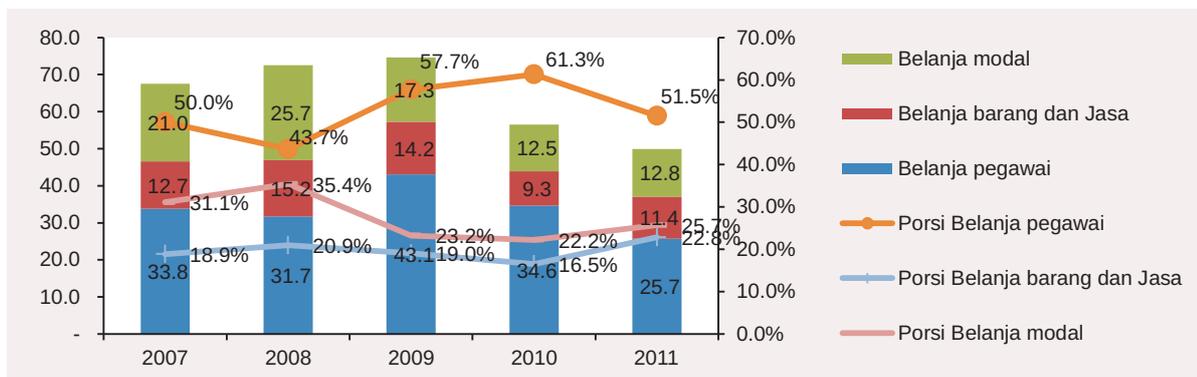
Gambar 5.4. Porsi Alokasi Belanja Riil Urusan Kesehatan di Kabupaten Manokwari



Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari 2007-2011 (Data diolah)

Sebagian besar belanja riil urusan kesehatan digunakan untuk belanja pegawai, yaitu mencapai 52,6%. Selama tahun 2007 sampai 2011 rata-rata alokasi untuk belanja modal mencapai 27,8% dan belanja barang dan jasa mencapai 19,6%. Pada kurun waktu tersebut alokasi untuk belanja modal mengalami penurunan hingga Rp 12,8 miliar pada tahun 2011, belanja barang dan jasa mengalami fluktuasi, begitu pula dengan belanja pegawai. Kondisi ini terjadi karena mekanisme perencanaan penganggaran yang dibuat kurang memadai.

Gambar 5.5. Komposisi Alokasi dan Porsi Belanja Riil Urusan Kesehatan di Kabupaten Manokwari



Sumber: Buku APBD Kabupaten Manokwari 2007-2011 (Data Diolah)

5.2.2. Kinerja Luaran dan Hasil Sektor Kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan mengalami perubahan, namun tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk. Selama periode 2007 hingga 2011, jumlah puskesmas hanya bertambah 6 unit, puskesmas pembantu hanya bertambah 2 unit. Pertambahan penduduk selama periode tersebut mengakibatkan daya tampung sarana kesehatan semakin terbatas sehingga perlu pembenahan perencanaan penganggaran untuk urusan kesehatan yang lebih memadai sehingga pelayanan kesehatan akan lebih optimal. Penurunan belanja modal dan belanja barang mengindikasikan bahwa perencanaan untuk penunjang fasilitas kesehatan kurang mendapat perhatian.

Tabel 5.5. Sarana Penunjang Urusan Kesehatan dan Penduduk di Kabupaten Manokwari

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
Puskesmas (unit)	16	16	22	22	22
Puskesmas Pembantu (unit)	86	84	84	86	88
Balai Pengobatan Pemerintah (unit)	2	0	1	1	0
Balai Pengobatan Swasta (unit)	3	6	5	10	3
Puskesmas Keliling Perahu (unit)	3	3	3	4	3
Puskesmas Keliling Mobil (unit)	16	20	18	20	25
Puskesmas Keliling Motor (unit)	121	145	141	141	125
Jumlah Penduduk (orang)	171222	172855	176847	187726	194948
Pertumbuhan penduduk (%)		1.0%	2.3%	6.2%	3.8%

Sumber : Lakip Dinas Kesehatan 2011

Selama dua tahun terakhir, rasio dokter dan paramedis terhadap penduduk mengalami penurunan. Tahun 2010 rasio dokter per satuan penduduk adalah 1: 7.689 dan menurun pada tahun 2011 yaitu 1: 7.509, artinya beban paramedis terhadap jumlah penduduk berkurang. Meski demikian, fakta menunjukkan bahwa tenaga kesehatan masih sangat kurang untuk melayani keperluan masyarakat di bidang kesehatan. Kondisi ini juga diperberat dengan jarak antara sarana kesehatan dan tenaga kesehatan menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil merupakan kesulitan tersendiri yang selama ini dialami di Kabupaten Manokwari. Untuk itu perlu penataan perencanaan terhadap ketersediaan tenaga kesehatan bagi masyarakat sehingga pelayanan terhadap masyarakat mengalami peningkatan.

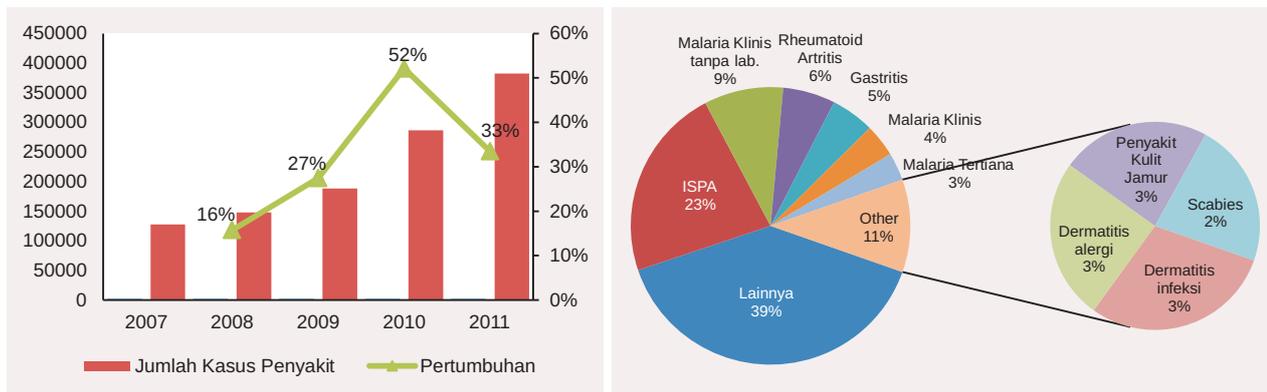
Tabel 5.6. Rasio Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan, 2010-2011

No	Uraian	2010	2011
1	Rasio Dokter per satuan penduduk	7.689	7.509
2	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	420	349
3	Rasio Bidan per satuan penduduk	1.637	1.219
4	Jumlah Posyandu per satuan Balita	220	272
5	Rasio Posyandu per satuan Balita	6	2,4

Sumber : Lakip Dinas Kesehatan 2011

Penanganan terhadap berbagai kasus penyakit dengan tenaga medis yang sangat kurang mengakibatkan penanganan tersebut kurang optimal. Selama periode tahun 2007 sampai 2011 jumlah kasus penyakit mengalami pertumbuhan dari 16% tahun 2008 menjadi 33% di tahun 2011. Hal ini tentunya membutuhkan penanganan kasus penyakit yang serius. Jenis penyakit yang banyak dijumpai di Kabupaten Manokwari adalah ISPA yang mencapai 23%, kemudian malaria klinis tanpa lab 9% sedangkan penyakit lainnya mencapai 39%. Banyaknya kasus penyakit yang terjadi disebabkan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan yang masih sangat kurang sehingga bentuk-bentuk penyuluhan tentang pencegahan penyakit dan upaya meningkatkan derajat kesehatan sesungguhnya merupakan program yang secara terus-menerus dilakukan sehingga penanganan terhadap dampak dari kebiasaan hidup yang kurang sehat dapat dikurangi.

Gambar 5.6. Pertumbuhan Jumlah Kasus Penyakit dan Komposisinya di Kabupaten Manokwari



Sumber : Lakip Dinas Kesehatan 2011

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Manokwari mengalami peningkatan meskipun masih lebih rendah dari rata-rata AHH Propinsi Papua Barat. Selama periode tersebut Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) cukup tinggi terutama di wilayah pedalaman walaupun mengalami penurunan. Cakupan pelayanan mengalami penurunan sehingga perlu penataan perencanaan pelayanan bagi masyarakat secara komprehensif guna memenuhi standar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/VII/2008 dan Perpres Nomor 5 Tahun 2010.

Tabel 5.7. Indikator Capaian Pelayanan Kesehatan Tahun 2010-2011 di Kabupaten Manokwari

No	Indikator	2010	2011
1.	Angka Harapan hidup		
	Manokwari	68,00	68,29
	Papua Barat	68,51	68,81
2	Angka kematian Ibu per 100 Kelahiran	16	4
3	Angka kematian Bayi per 1.000 Kelahiran	45	19
4	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	-*	43,32
5	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	-*	1,01
6	Angka kasus Anemia Gizi besi pada ibu hamil	72,5	48,02
7	Prosentase Kasus Balita Gizi Buruk yang terjadi	5,43	2,48
8	% Penanganan Balita Gizi Buruk	14,63	48,39
9	Cakupan Pelayanan Imunisasi Polio 4	98,1	83,05
10	Cakupan Pelayanan Imunisasi BCG	91,9	87,37
11	Cakupan Pelayanan Imunisasi DPT/HB3	91,7	76,37
12	Cakupan Pelayanan Imunisasi Campak	107,9	79,98

Sumber : RPMJD Kabupaten Manokwari

5.2.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Program, kegiatan dan alokasi anggaran secara umum belum mampu meningkatkan kinerja luaran dan hasil di sektor kesehatan. Kondisi ini diperburuk oleh alokasi belanja yang mengalami penurunan. Program perbaikan sarana dan prasarana pendukung kesehatan belum mampu mengimbangi jumlah penduduk dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan penduduk. Kendati ada upaya perbaikan kesehatan bagi masyarakat secara umum melalui peningkatan kinerja terutama ditinjau dari pelayanan terhadap kesehatan Ibu dan anak. Perlu dirancang program dan kegiatan yang secara efektif dan terfokus bagi upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang berfokus pada kesehatan Ibu dan Anak. Meskipun sudah ada upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKI dan AKB, yang di antaranya dapat disinergikan dengan upaya pengentasan kemiskinan, namun cakupan pelayanan kesehatan mengalami penurunan peran dan fungsi. Keberlanjutan program kegiatan menjadi penting sehingga berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

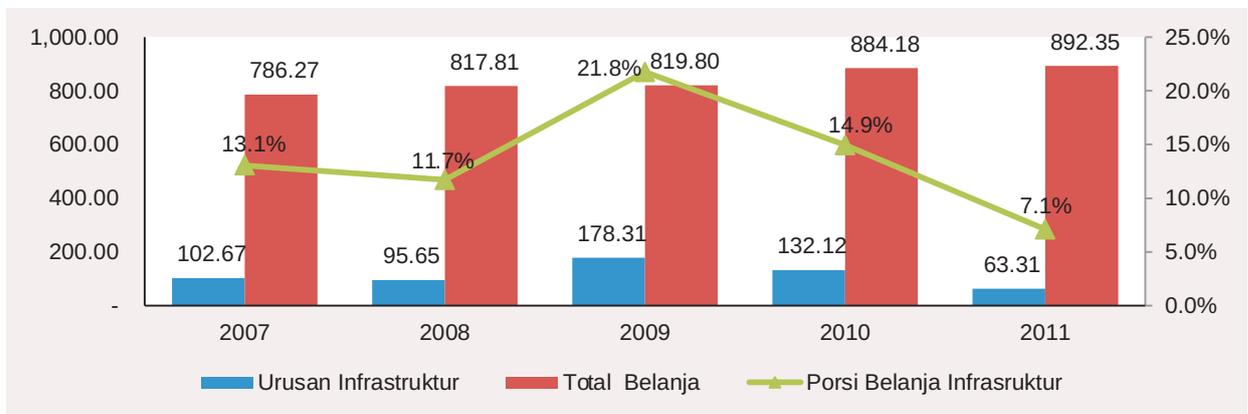
5.3. Sektor Infrastruktur

Sektor infrastruktur membahas mengenai keterkaitan antara perencanaan, anggaran dan belanja infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan pengairan dengan kinerja keluaran dan hasil sektor tersebut. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mengelola infrastruktur Kabupaten Manokwari adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo).

5.3.1. Belanja Sektor Infrastruktur

Realisasi belanja sektor infrastruktur menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Peningkatan peran belanja infrastruktur mencapai 21,8% pada tahun 2009, namun mengalami penurunan hingga 7% dari total belanja daerah. Walaupun belanja daerah mengalami peningkatan namun alokasi untuk belanja infrastruktur mengalami penurunan. Peran sentral infrastruktur bagi pembangunan ekonomi daerah mengimplikasikan pentingnya melakukan perencanaan secara terintegrasi dengan sektor lainnya guna pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

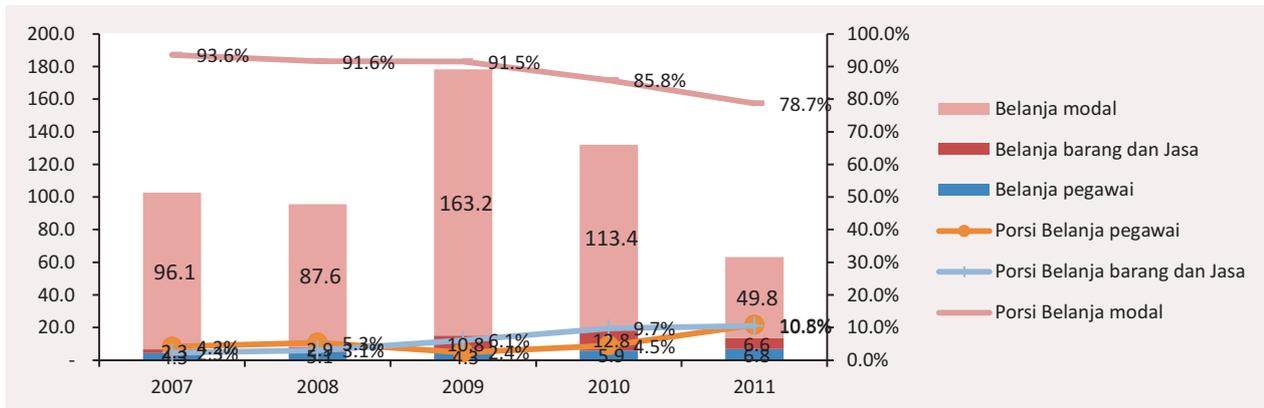
Gambar 5.7. Belanja Riil Infrastruktur dan Belanja Riil Daerah di Kabupaten Manokwari



Sumber : Buku APBD Kabupaten Manokwari Tahun 2007- 2011

Proporsi belanja modal relatif lebih besar dibandingkan proporsi belanja lainnya namun mengalami penurunan. Porsi belanja modal mengalami penurunan dari 93,6% di tahun 2007 menjadi 78,7 di tahun 2011, walaupun belanja infrastruktur mengalami peningkatan tertinggi di tahun 2009 kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2011. Pada tahun 2007 dengan porsi belanja 13,1% dapat dialokasikan 93,6% untuk belanja modal namun ketika porsi belanja mencapai 21,8% di tahun 2009, maka porsi belanja modal berkurang menjadi 91,5%. Jadi berfluktuasinya belanja infrastruktur hanya menurunkan porsi belanja modal. Perubahan proporsi belanja infrastruktur sesungguhnya lebih diutamakan pada belanja modal agar dapat mendukung penyediaan infrastruktur yang lebih berkualitas sehingga kegiatan ekonomi daerah dapat berkembang dengan baik. Kondisi riil yang terjadi diantara tahun 2007 hingga 2011, kurang memberi porsi yang cukup pada belanja modal sehingga peningkatan aktivitas ekonomi kurang dipenuhi. Meskipun dengan proporsi belanja modal infrastruktur selama 5 tahun yang fluktuatif, namun secara umum belanja sektor infrastruktur digunakan untuk program pembangunan, rehabilitasi maupun pengelolaan jalan, jembatan, irigasi, rawa dan jaringan pengairan. Dibandingkan dengan belanja pegawai yang cenderung stabil menunjukkan bahwa walaupun dengan porsi belanja modal dan barang dan jasa yang kecil tidak mengurangi alokasi terhadap belanja pegawai. Oleh karena itu, *assesment* lebih jauh sangat diperlukan untuk mengidentifikasi faktor resiko terhadap pembangunan infrastruktur bagi pembangunan ekonomi daerah. Melalui *assesment* yang memadai, maka prioritas pembangunan infrastruktur dapat disusun dengan baik dan perubahan proporsi belanjanya dapat dianalisis mengenai dampaknya terutama pada rencana strategis daerah, terkait dengan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Gambar 5.8. Komposisi dan Porsi Komponen Belanja Riil Infrastruktur di Kabupaten Manokwari

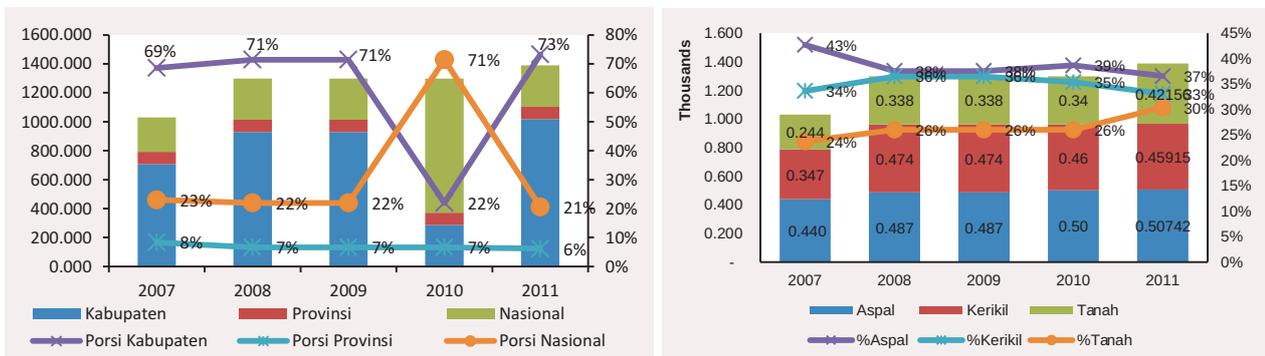


Sumber : Buku APBD Kabupaten manokwari Tahun 2007- 2011

5.3.2. Kinerja Luaran dan Hasil Sektor Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur prasarana jalan di Kabupaten Manokwari mengalami peningkatan hingga Tahun 2011. Panjang jalan menurut kewenangan kabupaten menunjukkan jumlah yang paling besar bila dibandingkan dengan panjang jalan provinsi dan jalan negara, kecuali pada tahun 2010. Berdasarkan jenis permukaan menunjukkan bahwa secara proporsional jenis aspal mengalami penurunan sedangkan jenis tanah mengalami peningkatan serta jenis kerikil cenderung stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah panjang jalan permukaan tanah makin bertambah, namun tidak diikuti penambahan jenis aspal yang sesuai.

Gambar 5.9. Komposisi dan Porsi Komponen Kewenangan terhadap Jalan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Manokwari



Meskipun belanja riil komponen belanja modal mengalami penurunan, namun panjang jalan terus mengalami penambahan termasuk jenis jalan dengan permukaan tanah. Jadi belanja infrastruktur mengalami penurunan secara nominal tidak diikuti oleh belanja pegawai. Oleh karena itu, perlu penataan perencanaan sektor infrastruktur melalui sinkronisasi dengan sumber-sumber aktivitas ekonomi masyarakat sehingga akan dapat menunjang perekonomian daerah.

5.3.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pembangunan infrastruktur jalan mengalami peningkatan kualitas berdasarkan kewenangan nasional maupun provinsi sedangkan kewenangan kabupaten terjadi peningkatan dari sisi kuantitas karena difokuskan pada jalan-jalan di tingkat distrik. Secara umum kondisi jalan di Kabupaten Manokwari berdasarkan kewenangan Pemda Manokwari belum menunjukkan kondisi perbaikan, hal ini perlu mendapat perhatian khusus agar pembukaan jalan dengan permukaan tanah senantiasa dapat menunjang akan perekonomian masyarakat secara merata. Sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah, maka diperlukan perencanaan dan metode valuasi yang lebih memadai mengenai seberapa besar belanja yang harus dialokasikan (misalnya irigasi dan jalan menuju sentra produksi pertanian dan pemasaran) untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas sektoral lainnya seperti pertanian yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Manokwari.

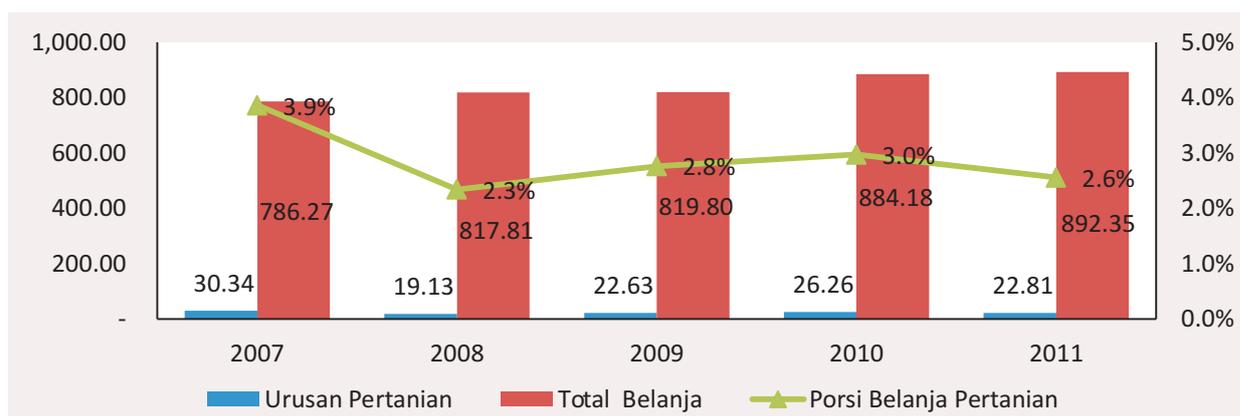
5.4. Sektor Pertanian

5.4.1. Belanja Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian kabupaten Manokwari. Walaupun kontribusi sektor pertanian yang terhadap PDRB mengalami penurunan hingga 31%, namun sektor ini sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat, pengentasan kemiskinan, penciptaan ketahanan pangan dan penyedia bahan baku dan pasar yang potensial bagi sektor industri pengolahan hasil pertanian. Prioritas sasaran pembangunan sektor pertanian antara lain adalah peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai untuk mendukung kemantapan ketahanan pangan, peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak, dan peningkatan kesejahteraan petani seperti yang tertuang dalam Renstra sektor Pertanian Kabupaten Manokwari 2011-2015.

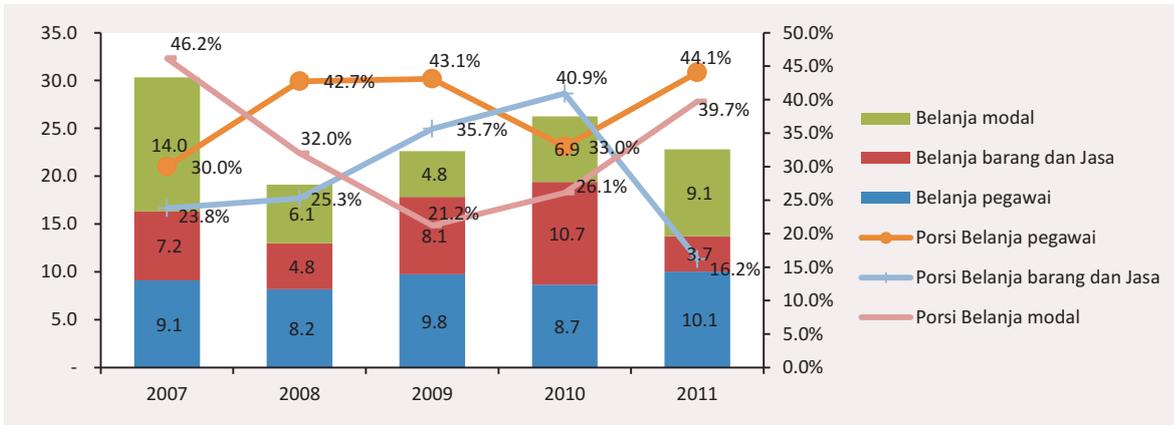
Proporsi belanja sektor pertanian terhadap total belanja kabupaten Manokwari selama periode 2007-2011 mengalami penurunan dari 3,9% menjadi 2,6%. Kontribusi belanja riil mengalami penurunan drastis pada tahun 2008 menjadi 2,3% dari belanja daerah kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2010, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan hingga 2,6%. Walaupun alokasi belanja daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun alokasi untuk sektor strategis ini kurang mendapat kontribusi pembiayaan. Untuk itu sangat diperlukan suatu perencanaan penganggaran yang lebih efektif sehingga sektor strategis ini dapat memberikan output yang memadai terutama bagi sebagian besar penduduk pedesaan yang mengandalkan sektor tersebut.

Gambar 5.10. Porsi Belanja Sektor Pertanian Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Manokwari



Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja sektor pertanian di Kabupaten Manokwari masih mendominasi dibandingkan dengan belanja modal dan belanja barang dan jasa. Secara rata-rata, belanja pegawai mencapai 37,8%, dan menunjukkan tren yang berfluktuatif walaupun secara nominal nilainya berkisar antara Rp 8,7 miliar sampai Rp 10,1 miliar. Belanja barang dan jasa dan belanja modal nilai nominalnya berfluktuatif sepanjang tahun dengan rata-rata kontribusi sebesar 28,5% dan 33,7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran untuk sektor ini perlu dibenahi sehingga sebagai sektor andalan Kabupaten Manokwari, akan dapat mendukung output daerah. Pembinaan perencanaan difokuskan pada daerah-daerah yang potensial untuk dikembangkan komoditi pertanian.

Gambar 5.11. Komposisi dan Porsi Komponen Belanja Riil Sektor Pertanian di Kabupaten Manokwari



Fokus utama dari sektor pertanian adalah pada program pertanian tanaman pangan yang mencapai 83,8%. Sedangkan alokasi belanja sektor pertanian untuk program peternakan, perikanan dan kelautan dan program ketahanan pangan hanya memperoleh alokasi sebesar 6,3% dan 9,9%. Pada program pertanian tanaman pangan peningkatan ketahanan pangan memperoleh alokasi hingga 58,8% sedangkan produksi pertanian hanya 21,3%.

Tabel 5.8. Proporsi Alokasi Belanja pada Program Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Manokwari

No	Uraian Program Pertanian Tanaman Pangan	Porsi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.4%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.6%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	0.1%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.0%
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.9%
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	58.8%
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	0.3%
8	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	0.3%
9	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	21.3%
10	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	0.6%
11	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit	0.3%
12	Program peningkatan produksi hasil	3.4%
13	Program peningkatan pemasaran hasil produksi	0.5%
14	Program peningkatan penerapan teknologi	0.0%

Sumber : Buku APBD tahun 2007-2011

Alokasi 9,9% dari belanja sektor pertanian untuk peternakan, perikanan dan kelautan diperoleh 58,1% untuk peningkatan produksi hasil peternakan sedangkan perikanan dan pengembangan pesisir pantai tidak mencapai 1% padahal sektor perikanan dan kelautan sangat potensial untuk dikembangkan.

Tabel 5.9. Proporsi Alokasi Belanja pada Program Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Manokwari

No	Uraian Program Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Porsi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.9%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.2%
3	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	6.8%
4	Program peningkatan produksi hasil peternakan	58.1%
5	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	2.4%
6	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	0.2%
7	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	0.6%

Sumber : Buku APBD tahun 2007-2011

Alokasi belanja ketahanan pangan sebesar 6,3% dari sektor pertanian lebih banyak digunakan untuk kegiatan penyuluhan yang mencapai 32,7%, kemudian disiplin aparatur sebesar 23,2%.

Tabel 5.10. Proporsi Alokasi Belanja pada Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Manokwari

No	Uraian Program Ketahanan Pangan	Porsi
1	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	32.7%
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.4%
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	16.5%
4	Program peningkatan disiplin aparatur	23.2%
5	Program Pendidikan Kedinasan	2.9%
6	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	12.4%

Sumber : APBD tahun 2007-2011

Alokasi belanja pertanian sebesar 2,9% dari belanja daerah, menunjukkan bahwa sektor ini sebagai *leading sector* kurang mendapatkan kontribusi belanja yang memadai, terlebih dengan banyaknya program yang dilakukan, namun kurang memberikan respons terhadap peningkatan output pertanian karena selama 5 tahun terakhir menunjukkan kontribusi dari sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan perencanaan penganggaran terutama pada program peningkatan produksi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat lokal sehingga dari sisi pendapatan akan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan pada sisi output akan memberikan kontribusi terhadap *intermediate input* bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Pada aspek lainnya akan mengurangi impor komoditi pertanian di Kabupaten Manokwari, bahkan berpeluang ekspor sehingga akan memperbesar kontribusi nilai tambah terhadap output daerah.

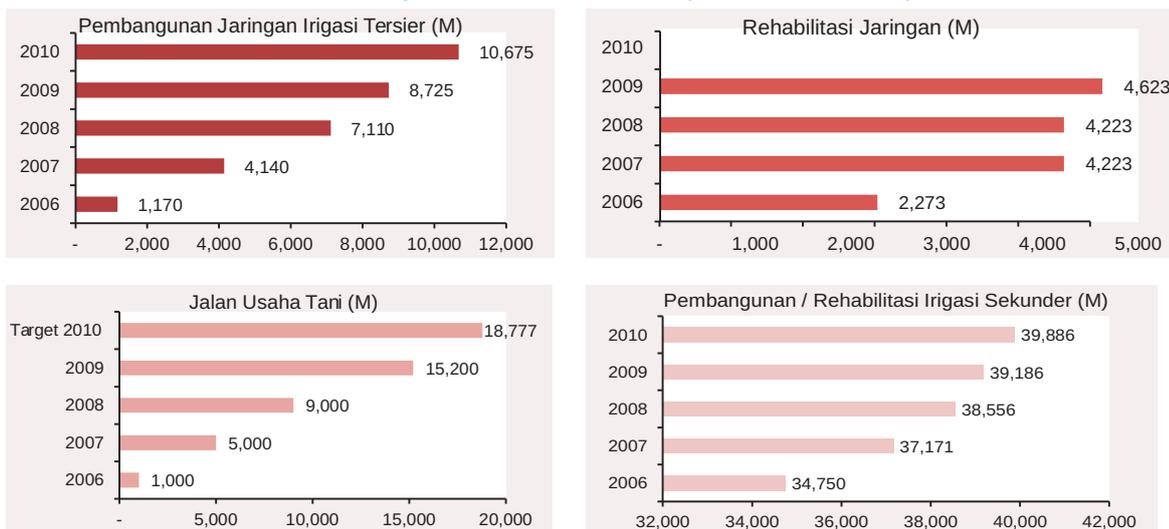
5.4.2. Kinerja Luaran dan Hasil Sektor Pertanian

Indikator keluaran sektor pertanian untuk produksi hasil peternakan dan tanaman pangan cenderung meningkat, baik dalam jumlah maupun tren perkembangan produksi. Produksi hasil pertanian yaitu padi cenderung meningkat dari produksi padi sebesar 15.218 ton pada tahun 2007 menjadi 21.532 ton pada tahun 2011. Ubi kayu merupakan komoditi tanaman pangan yang produktivitasnya tertinggi dan produksi tanaman ubi kayu sekitar 10,81 ton/ha. Produktivitas tertinggi kedua adalah tanaman ubi jalar, dengan tingkat produktivitas 10,18 ton/ha. Sedangkan produktivitas tanaman pangan lainnya seperti padi, jagung, dan kedelai masing-masing sebesar 3,63; 1,68; dan 1,06 ton/ha.

Secara umum, penurunan belanja sektor pertanian berdampak pada semakin menurunnya indikator hasil (*outcome*) pertanian berupa Indeks Nilai Tukar Petani (NTP). NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di 8 (delapan) Kabupaten di Provinsi Papua Barat pada bulan November 2011, menunjukkan bahwa NTP Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan. Nilai belanja yang relatif besar dalam mendukung implementasi program-program untuk mencapai sasaran prioritas tersebut. Di samping isu peningkatan produktivitas, tantangan utama sektor pertanian lainnya di Kabupaten Manokwari adalah bagaimana peningkatan produktivitas ini dapat diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani yang tercermin melalui Nilai Tukar Petani.

Seiring dengan peningkatan berbagai produk pertanian, beras merupakan komoditi strategis telah mengalami peningkatan produksi. Rata - rata luas panen dalam 5 tahun terakhir adalah 4.432 ha dengan panen mencapai 16.399 ton Gabah Kering Giling (GKG). Hasil gabah tersebut, dapat disetarakan dengan 13.119 ton beras. Dengan jumlah penduduk sebesar 187.591 jiwa dan asumsi konsumsi beras perkapita per tahun sebesar 118 kg, maka kebutuhan untuk konsumsi beras penduduk Kabupaten Manokwari setahun mencapai 22.135 ton beras. Dengan demikian masih terdapat kekurangan pasokan beras sebesar 9.016 ton.

Gambar 5.12. Perkembangan infrastruktur sektor pertanian di Kabupaten Manokwari



5.4.3. Kesimpulan dan Rekomendasi Sektor Pertanian

Pertanian masih menjadi sektor unggulan di Kabupaten Manokwari. Namun, rata-rata alokasi belanja untuk sektor pertanian mengalami penurunan selama 5 tahun. Ubi kayu merupakan komoditi tanaman pangan yang produktivitasnya tertinggi di Kabupaten Manokwari. Produktivitas tertinggi kedua adalah tanaman ubi jalar sedangkan posisi selanjutnya adalah produktivitas tanaman pangan lainnya seperti padi, jagung, dan kedelai. Dengan demikian kebijakan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan alokasi belanja untuk sektor-sektor ekonomi unggulan tersebut, namun sektor-sektor unggulan tersebut kurang mendapat dukungan sehingga output sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi. Pembinaan perencanaan penganggaran perlu dilakukan berdasarkan sentra-sentra produksi pertanian bahkan pada setiap distrik perlu dikembangkan spesialisasi produksi pertanian yang sesuai dengan kondisi distrik tersebut. Untuk itu pengembangan kelembagaan lokal masyarakat atau petani perlu dibina teristimewa masyarakat lokal yang orientasi produksinya bukan padi sehingga masyarakat tersebut akan memperoleh tambahan pendapatan dari aktivitas usahatani yang diusahakan.

Beberapa rekomendasi kebijakan pembangunan di sektor pertanian yang bisa dilakukan agar belanja pemerintah daerah lebih tepat sasaran adalah program peningkatan nilai tambah sektor pertaniandan kualitas produk untuk meningkatkan daya saing produk pertanian. Program tersebut dapat dilakukan antara lain melalui: 1) adanya *roadmap* tentang komoditas unggulan kabupaten Manokwari sebagai pedoman perencanaan dan pengembangan sektor pertanian seperti peningkatan daya saing produk pertanian, 2) peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan melalui pendampingan dan penyuluhan kepada petani, dan sekolah lapang untuk petani maupun pelaku agribisnis, 3) peningkatan industri hilir pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian, 4) perbaikan akses petani terhadap permodalan dan pemasaran hasil untuk meningkatkan posisi tawar petani, 5) penjaminan harga pasar hasil pertanian yang memadai dan kelembagaan tataniaga sehingga petani memiliki jaminan terhadap produksi yang dihasilkan.



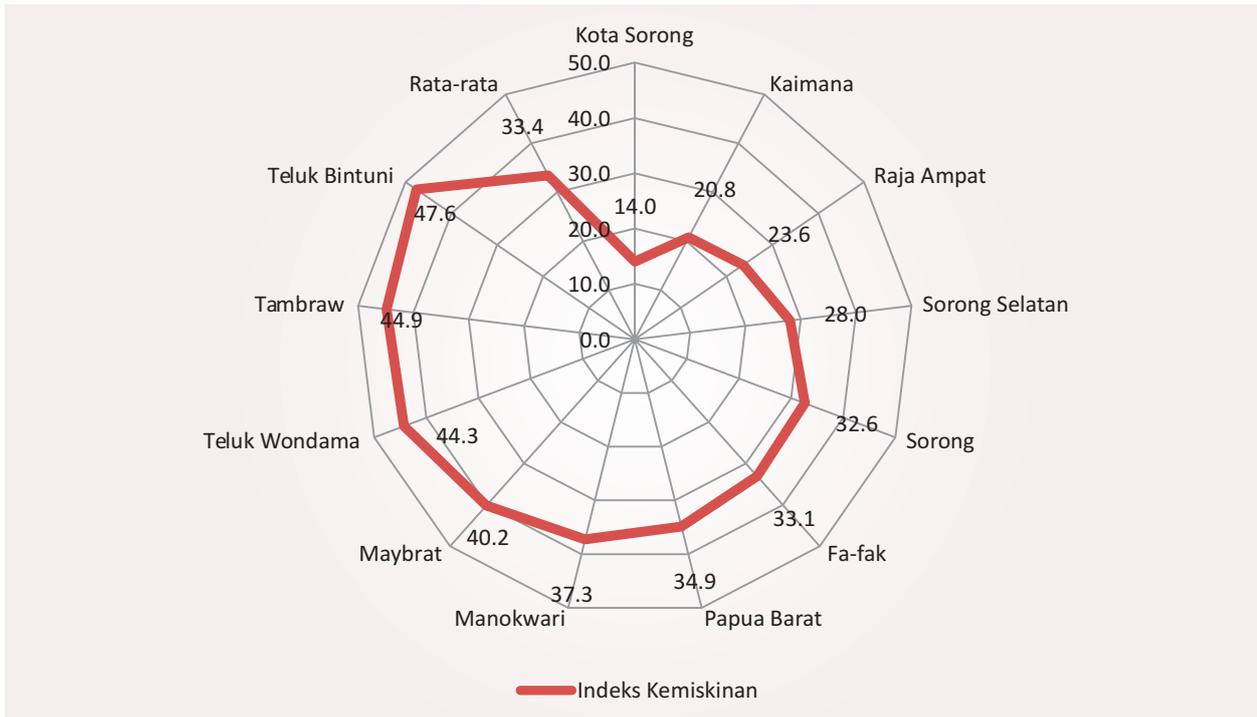
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH



6.1. Isu Kemiskinan

Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Manokwari relatif tinggi, bahkan lebih tinggi dari persentase penduduk Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2011, Persentase penduduk miskin di Kabupaten Manokwari mencapai 37,28 persen lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat yang hanya 34,9 persen, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota se Provinsi Papua Barat. Fakta ini mengindikasikan masih lemahnya capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Manokwari, meskipun selama lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan indeks kemiskinan.

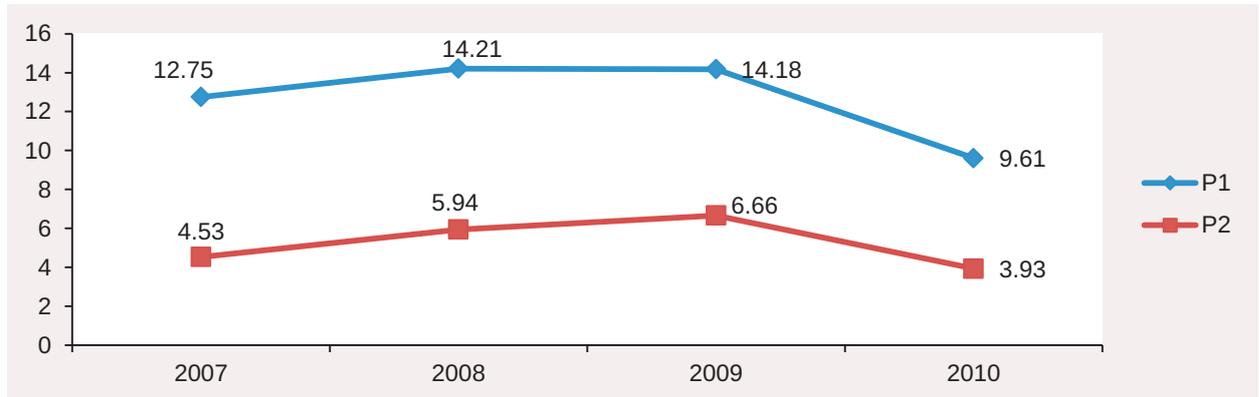
Gambar 6.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2007-2012

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan tren negatif sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memiliki tren positif selama periode 2007-2010. Dalam kurun waktu 4 tahun (2007-2010) rata-rata pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar -6,99 persen. Artinya, setiap tahun jurang/gap antara rata-rata pengeluaran penduduk dengan garis kemiskinan semakin dekat. Sedangkan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,75 persen. Artinya, ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin lebar setiap tahunnya. Kedua hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah Kabupaten Manokwari dalam pengentasan kemiskinan belum menyentuh semua lapisan masyarakat miskin, namun sudah ada upaya mengurangi permasalahan kemiskinan yang ada.

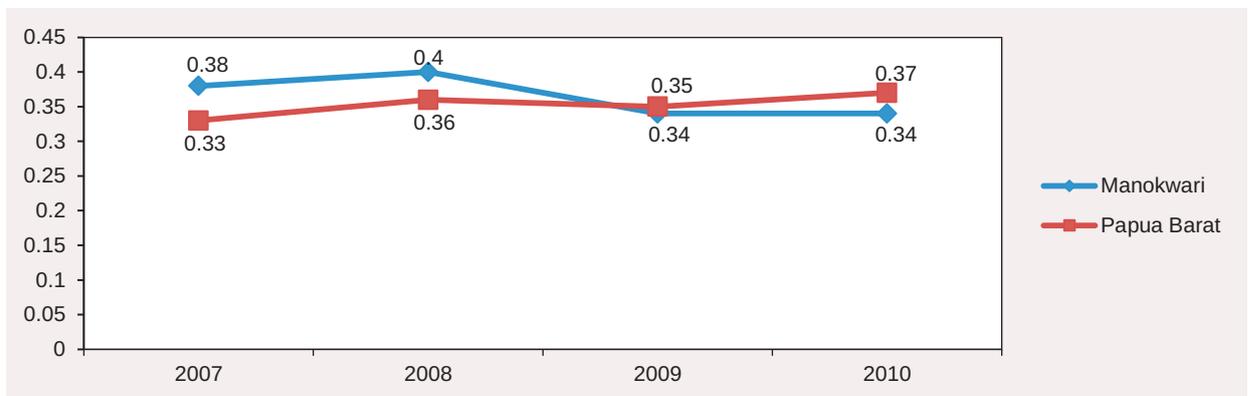
Gambar 6.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Manokwari Tahun 2007-2010



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2007-2012

Ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Manokwari semakin menurun selama periode 2007-2010. Hal ini pada rasio gini yang semakin mengecil, dari 0,4 pada tahun 2008 menjadi hanya 0,34 pada tahun 2010. Fakta ini menunjukkan arah tingkat ketimpangan dari kategori sedang menjadi kategori rendah hanya dalam tempo tiga tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dicapai Kabupaten Manokwari diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan Gini Rasio Provinsi Papua Barat, dimana pada level provinsi, Gini Rasio meningkat dari 0,33 pada tahun 2007 menjadi 0,37 pada tahun 2010. Meskipun masih dalam kategori ketimpangan rendah, tetapi dengan kecenderungan gini rasio yang meningkat, mengindikasikan semakin meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat Provinsi Papua Barat secara keseluruhan seiring dengan intensitas pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin tinggi.

Gambar 6.3. Gini Rasio Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, Tahun 2007-2010



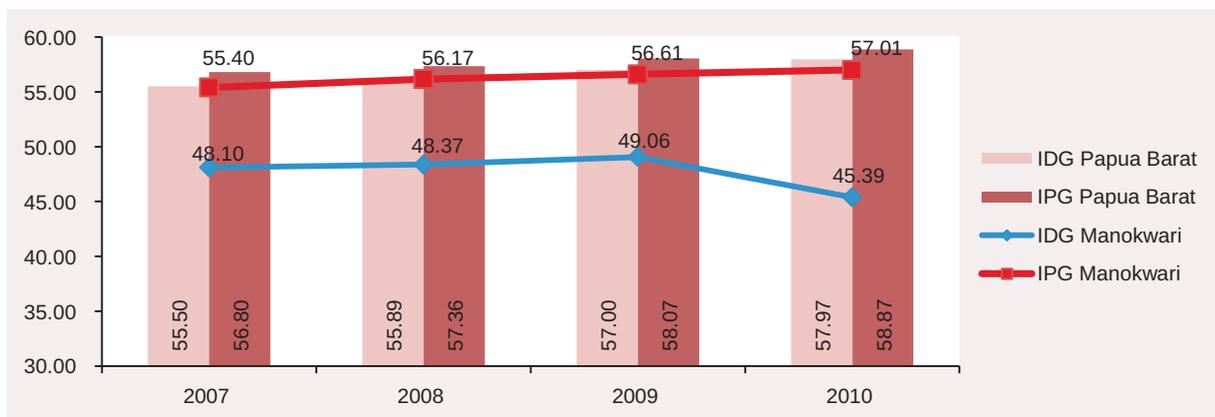
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2007-2012

Upaya pengentasan kemiskinan di Manokwari masih bertumpu pada program-program yang diimplementasikan oleh pemerintah secara nasional, terutama melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jika diamati, program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah dilakukan melalui dua skema utama, yaitu *pertama*, menurunkan atau memperkecil beban pengeluaran penduduk miskin. Skema ini muncul dalam bentuk pembebasan biaya (misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis), dan pemberian subsidi (misalnya, pupuk dan sarana produksi lainnya). *Kedua*, meningkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk miskin. Skema ini muncul terutama dalam bentuk pembangunan infrastruktur perdesaan (misalnya irigasi, pasar, jalan desa), penyediaan skim bantuan modal usaha. Inisiatif program pengentasan kemiskinan secara lokal oleh pemerintah daerah masih sangat terbatas. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui pembentukan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah pada tahun 2012 dan kegiatan tim ini masih dalam tahap penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Manokwari.

6.2. Analisis Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) maupun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Manokwari memiliki tren yang positif, kecuali IDG yang mengalami penurunan pada tahun 2010. Rata-rata pertumbuhan IDG selama periode 2007-2010 sebesar -1,83 persen per tahun. Artinya, keterwakilan perempuan di parlemen, sebagai angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non pertanian mengalami penurunan. Sebaliknya, pada level provinsi, nilai IDG mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 1,46 persen per tahun. Artinya, angka harapan hidup, tingkat melek aksara, angka partisipasi sekolah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan pendapatan untuk kaum perempuan mengalami peningkatan secara *aggregate*. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi, Kabupaten Manokwari relatif masih lebih rendah.

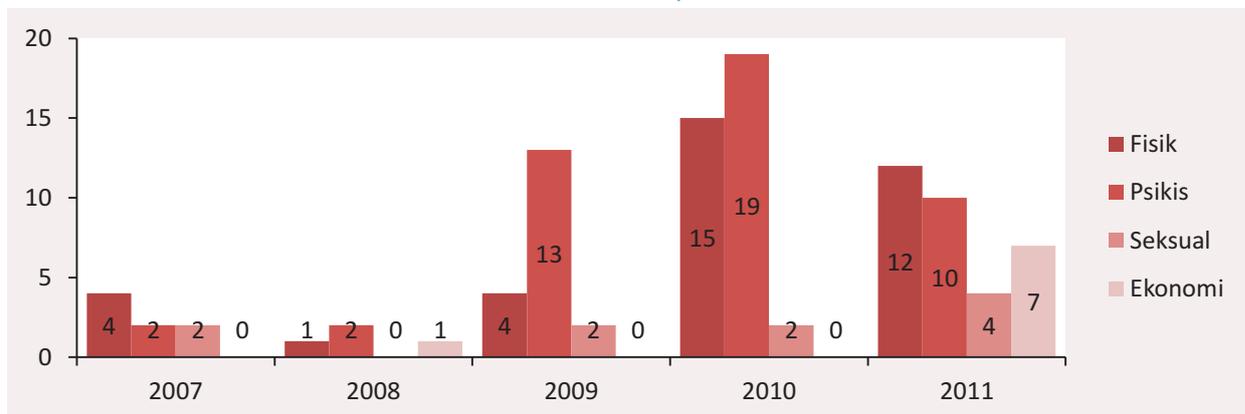
Gambar 6.4. Indeks Pemberdayaan dan Pembangunan Gender Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat tahun 2007-2010



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2007-2012

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan tajam selama periode 2009-2011. Jenis KDRT yang paling banyak terjadi adalah kekerasan psikis sebesar 46,00 persen dan kekerasan fisik sebesar 36,00 persen. Jika dipilah berdasarkan sebaran korban dan pelaku, maka 100 persen korban adalah perempuan dengan 100 persen pelaku adalah laki-laki. Kemudian jika dirinci berdasarkan usia, maka sebagai korban sebanyak 80,76 persen dan sebagai pelaku sebanyak 100 persen berada pada usia di atas 18 tahun. Apabila dikaitkan dengan status pernikahan, maka 73,08 persen korban berstatus sudah menikah, dan 26,92 persen hidup bersama (tanpa pernikahan). Sebaran korban menurut tingkat pendidikan, 35,3 persen korban adalah sarjana yang telah menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi, 29,4 persen SMA, SD 23, 5 persen dan 5,9 persen SLTP dan tidak sekolah. Ini mengindikasikan justru korban yang berpendidikan tinggi masih dominan adanya diskriminasi terkait akses, peran dan kontrol perempuan dari laki-laki sebagai pelaku. Jika dilihat dari tempat kejadian 88,3 persen kasus kekerasan terjadi di dalam rumah tangga dan 11,7 persen di luar rumah tangga. Bila dilihat dari pekerjaannya 53 persen korban adalah PNS, 35,4 persen ibu rumah tangga, 5,9 persen mahasiswa dan tidak bekerja. Bentuk tingkat penanganan yang dilakukan oleh para korban adalah konseling (45,36), pendampingan (35,05%), rekam medis (9,28%), proses hukum (7,22%) dan rumah aman (3,09%).

Gambar 6.5. Jumlah Kasus KDRT di Kabupaten Manokwari Tahun 2007-2011



Sumber: Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Manokwari, 2007-2011

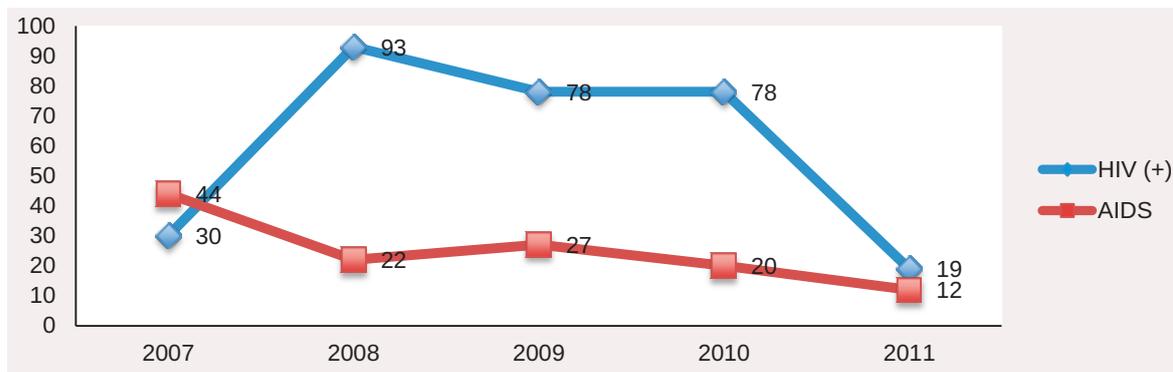
6.3. Analisis HIV/AIDS

Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Manokwari setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan tren pertumbuhan yang melambat. Kasus HIV/AIDS di Papua Barat terdapat di tiga kabupaten dan satu kota yaitu Fakfak, Manokwari, Sorong dan Kota Sorong. Berdasarkan data BPS provinsi, tahun 2010 jumlah kasus AIDS Manokwari tertinggi (192 kasus) dari kabupaten lainnya. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 202 kasus dan meningkat menjadi 217 kasus pada tahun 2012. Tercatat sampai Mei 2012 kasus HIV berjumlah 475 kasus dan AIDS berjumlah 217 kasus. Totalnya 692 kasus sampai pertengahan tahun 2012. Berdasarkan faktor resiko heteroseks merupakan kasus tertinggi yaitu HIV 64,9 persen dan AIDS 28,5 persen selanjutnya TP/Perinatal 3 persen, tidak diketahui 2,6 persen, homobiseks 0,9 persen kasus dan IUD 0,1 persen.

Pengidap HIV/AIDS terbanyak adalah perempuan yang berstatus ibu rumah tangga. Berdasarkan jenis kelamin, dari kumulatif kasus, perempuan pengidap HIV 39,6 persen lebih besar dari laki-laki 29,1 persen, sedangkan pengidap AIDS laki-laki 17,2 persen lebih besar dari perempuan 14,2 persen. Banyaknya perempuan pengidap HIV dan AIDS adalah ibu rumah tangga. Ini mengindikasikan potensi bertambahnya kasus di masa mendatang apabila pemerintah mengabaikan masalah ini dapat saja semakin besar bila tidak ditangani secara tepat.

Kelompok umur produktif merupakan kelompok yang rawan mengidap HIV/AIDS. Berdasarkan kelompok umur, jumlah terbesar pada kelompok umur produktif 15-60 tahun (96,1 persen). Ini mengindikasikan produktivitas kerja pengidap HIV dan AIDS pada usia ini dapat menurun, seiring penurunan daya tahan tubuh seperti profesi sebagai PNS, Ibu Rumah Tangga, Buruh dan lainnya dan secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dalam keluarga. Berdasarkan jenis pekerjaan, dari kumulatif kasus, pengidap dengan pekerjaan lainnya 25,3 persen, selanjutnya ibu rumah tangga 24,9 persen. PSK 14,2 persen, PNS 12,0 persen, buruh 8,5 persen, swasta 7,7 persen, pelajar/siswa 4 persen dan yang terendah mahasiswa 3 persen.

Gambar 6.6. Tren Pertumbuhan Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Manokwari Tahun 2007-2011



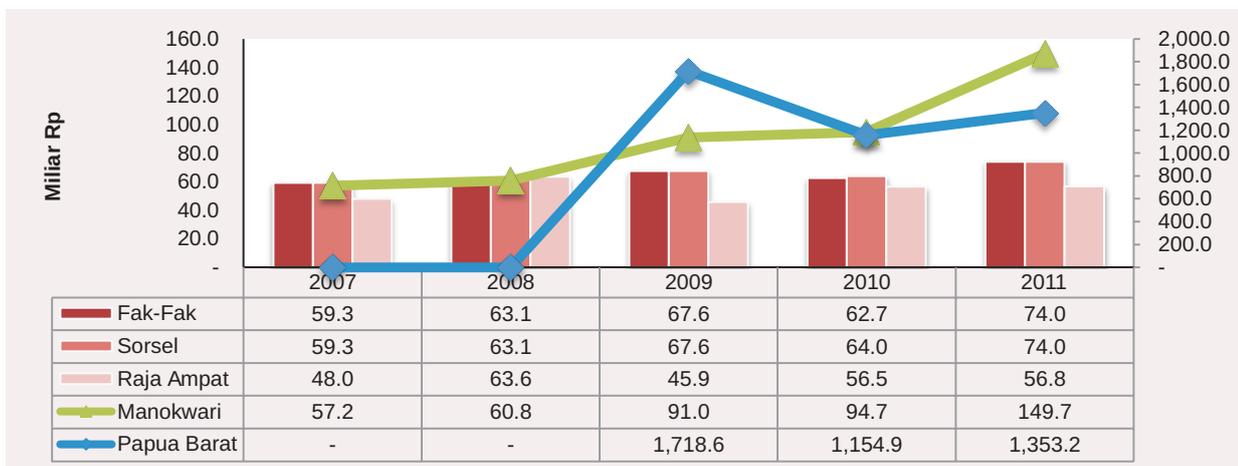
Sumber: Dinas Kesehatan dan Satuan Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Manokwari, 2007-2012

Upaya pemerintah daerah dalam pemberantasan kasus HIV/AIDS telah menunjukkan perbaikan walau belum optimal. Kasus HIV dan AIDS memiliki tren pertumbuhan tertinggi pada tahun 2008 dan berkurang pada tahun 2009 hingga 2011, ini disebabkan karena kasus ini pada tahun 2009 menjadi bagian dari prioritas pemerintah Kabupaten Manokwari dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pemerintah dalam rencananya yaitu pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan prioritas pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Upaya yang dilakukan dalam rangka pemberantasan penyakit HIV/AIDS di samping ditunjukkan pada penanganan penderita yang ditemukan, diarahkan pada upaya pencegahan melalui skrining HIV/AIDS terhadap darah donor dan upaya pemantauan dan pengobatan penyakit juga upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang HIV dan AIDS.

6.4. Dana Otonomi Khusus

Alokasi dana otonomi khusus di Kabupaten Manokwari telah terealisasi sejak tahun 2002 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, menyebabkan pengelolaan dana otonomi khusus tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua tetapi juga oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Metode pembagian dana otonomi khusus yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat adalah 60:40. Artinya 60 persen dana otonomi khusus dikelola oleh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat dan 40% dikelola oleh pemerintah provinsi. Provinsi Papua Barat mulai mengelolah dana otsus sejak tahun 2009 hingga saat ini. Secara umum Dana Otsus Papua mengalami peningkatan alokasi pada setiap tahun di masing-masing Kabupaten dan Provinsi Papua Barat. Peningkatan Alokasi Dana Otsus ini disebabkan karena setiap tahunnya DAU Nasional meningkat, yang merupakan sumber atau porsi dari Dana Otsus. Besarnya Dana Otsus yang dialokasikan di Wilayah Papua sebesar 2 persen dari DAU Nasional. Kebijakan pemerintah untuk Dana Otsus Papua disalurkan untuk menopang 4 pilar utama yaitu Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Perekonomian Rakyat.

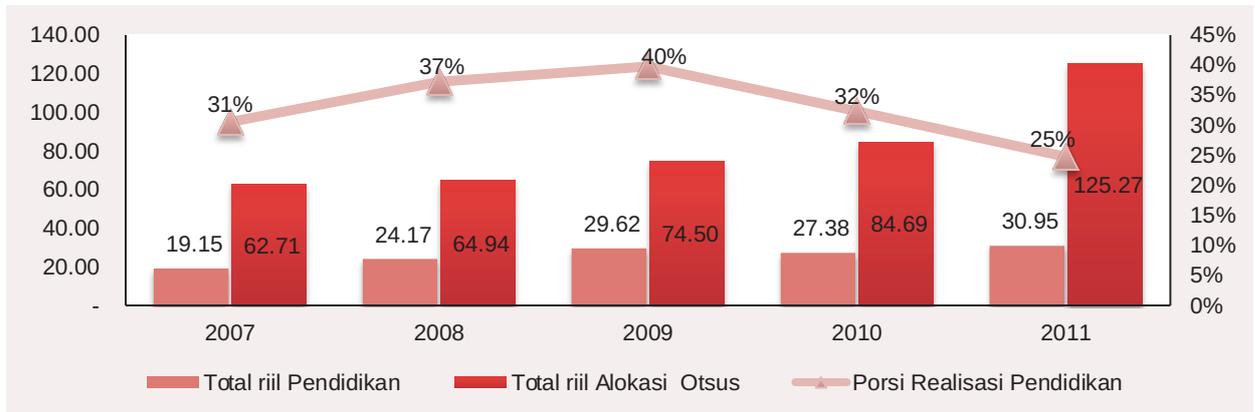
Gambar 6.7. Jumlah Dana Otonomi Khusus yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, Fakfak, Sorsel, Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat, Tahun 2007-2011



Sumber: APBD Kabupaten Manokwari, Fakfak, Sorsel, Raja Ampat dan Provinsi di Papua Barat 2007-2011

Peningkatan alokasi dana otsus untuk pendidikan tidak sebanding dengan proporsi belanja untuk pendidikan selama lima tahun. Secara nominal alokasi Dana Otsus sektor pendidikan untuk Kabupaten Manokwari selama tahun 2007 sampai 2011, mengalami peningkatan namun porsi terhadap Pendidikan hanya meningkat sampai tahun 2009 kemudian tahun berikutnya mengalami penurunan, dengan rata-rata alokasi sektor pendidikan sebesar 33 persen atau 26 miliar rupiah. Nilai ini dijabarkan dalam program-program pendidikan yang dialokasikan untuk program pendidikan dasar, pendidikan dasar dan prasekolah dan pendidikan menengah dan kebudayaan.

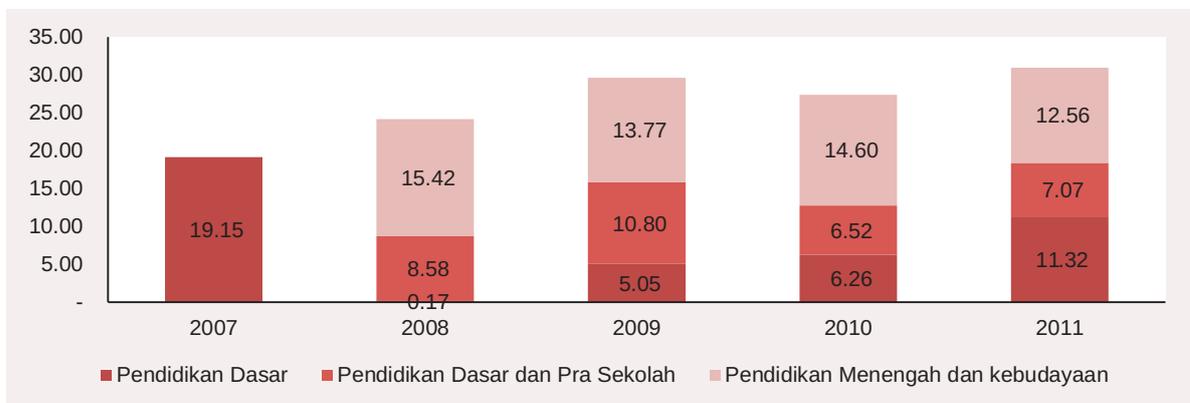
Gambar 6.8. Porsi Realisasi Dana Otsus Untuk Pendidikan di Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011



Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

Fokus utama alokasi dana otsus untuk Pendidikan sebesar 43 persen untuk Pendidikan Menengah dan Kebudayaan. Pendidikan dasar pra sekolah dan pendidikan menengah masing-masing memperoleh 32 persen dan 25 persen dari alokasi untuk pendidikan dasar. Berdasarkan alokasi tersebut bantuan pendidikan sebesar 10 persen, peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan sebesar 24 persen, manajemen pendidikan sebesar 21 persen dan sisanya untuk program lainnya di lingkup pendidikan dasar. Pendidikan dasar dan pra sekolah mencapai 81 persen belanja dialokasikan untuk program Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun dan program Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun sebesar 6 persen dan sisanya untuk pengadaan buku dan sarana penunjang lainnya. Untuk pendidikan menengah dan kebudayaan dialokasikan untuk program pendidikan menengah sebesar 65 persen dan program pendidikan tinggi sebesar 21 persen sedangkan sisanya untuk pendidikan non formal dan sarana penunjang.

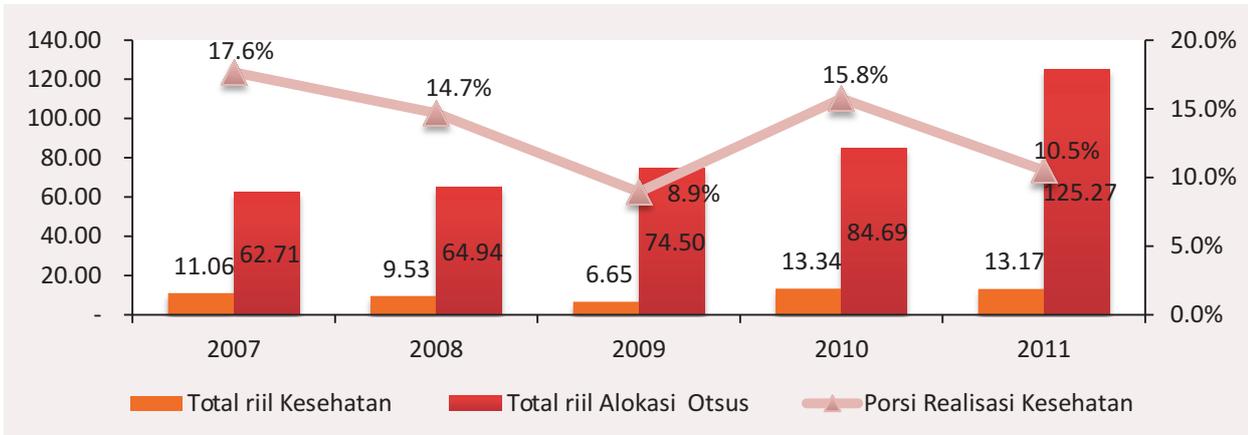
Gambar 6.9. Realisasi Dana Otsus untuk Berbagai Program Pendidikan di Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011



Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

Alokasi Dana Otsus Sektor Kesehatan selama 5 tahun tidak seiring dengan peningkatan alokasi Otsus di Kabupaten Manokwari. Rata-rata perolehan sektor kesehatan selama 5 tahun mencapai 14 persen dari total dana otsus yang diterima. Selama kurun waktu tersebut walaupun penerimaan dana otsus meningkat namun porsi untuk kesehatan mengalami penurunan dari 17,6 persen tahun 2007 menjadi 8,9 di tahun 2009 dan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga 15,8 persen dan di tahun 2011 kembali mengalami penurunan hingga 10,5 persen. Penurunan ini disebabkan belum konsistennya perencanaan penganggaran yang dilakukan sehingga porsinya berfluktuatif.

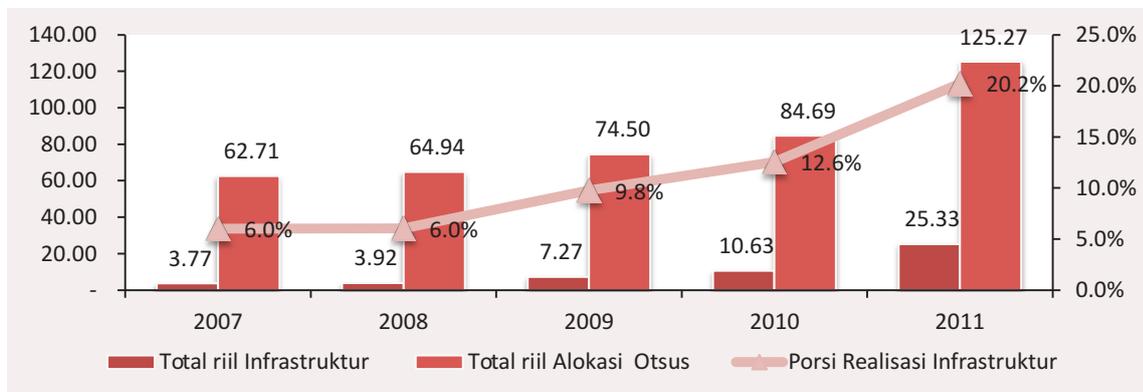
Gambar 6.10. Nilai nominal dan Proporsi Dana Otsus Sektor Kesehatan di Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011



Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

Alokasi dana untuk Infrastruktur mengalami peningkatan selama tahun 2007 hingga 2011 dengan rata-rata alokasi sebesar 10,9 persen dari total dana otsus Kabupaten Manokwari. Peningkatan alokasi dana Otsus cenderung meningkat seiring dengan peningkatan alokasi Otsus untuk Kabupaten Manokwari. Peningkatan ini dimaksudkan untuk memenuhi rencana strategis kegiatan yang berkesinambungan yang terukur dalam kurun waktu tertentu atau dalam jangka menengah, maupun jangka panjang. Wujud dari program yang dilakukan yaitu untuk menghubungkan distrik-distrik yang ada di wilayah Manokwari yang difokuskan pada sentra-sentra aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga akan memudahkan masyarakat untuk mengakses pasar.

Gambar 6.11. Nilai Nominal dan Porsi Dana Otsus Untuk Sektor Infrastruktur di Kabupaten Manokwari Tahun 2007-2011



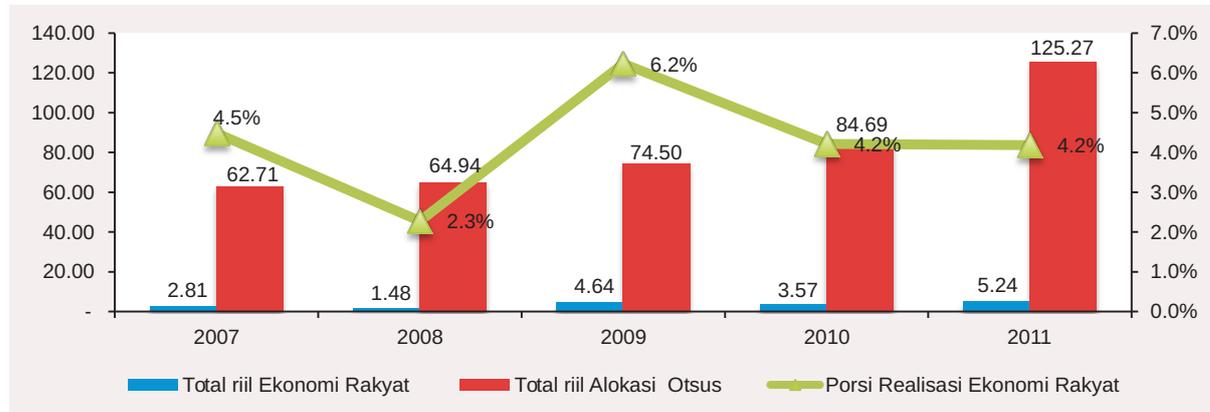
Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

Program yang memperoleh dukungan dana terbesar yaitu program pembangunan jalan dan jembatan yang mencapai 61,2 persen. Program ini menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah dalam rangka menghubungkan atau menjangkau daerah-daerah *periphery* yang sulit dijangkau. Program selanjutnya yang menjadi prioritas adalah program pembangunan listrik perdesaan yang mendapat alokasi belanja sebesar 10,7 persen dan program pembangunan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya yang mencapai 8,8 persen. Ketiga program tersebut menjadi prioritas pembiayaan yang bersumber dari dana otsus sehingga secara tidak langsung masyarakat yang menerima manfaat akan memperoleh manfaat dalam menunjang perolehan pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan.

Alokasi dana untuk perekonomian rakyat selama lima tahun mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar Rp 3,55 miliar. Meningkatnya perolehan dana Otsus Kabupaten tidak diikuti dengan peningkatan alokasi untuk perolehan pendapatan bagi masyarakat, sehingga kontribusi selama 5 tahun rata-rata hanya sebesar 4 persen dari belanja Otsus Kabupaten Manokwari. Sesungguhnya peningkatan perekonomian

masyarakat berpeluang untuk ditingkatkan melalui program perekonomian yang tepat sasaran, namun karena perencanaan yang kurang berorientasi pada produksi usahatani, maka peluang tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Gambar 6.12. Nilai Nominal dan Porsi Dana Otsus untuk Ekonomi Rakyat di Kabupaten Manokwari, Tahun 2007-2011

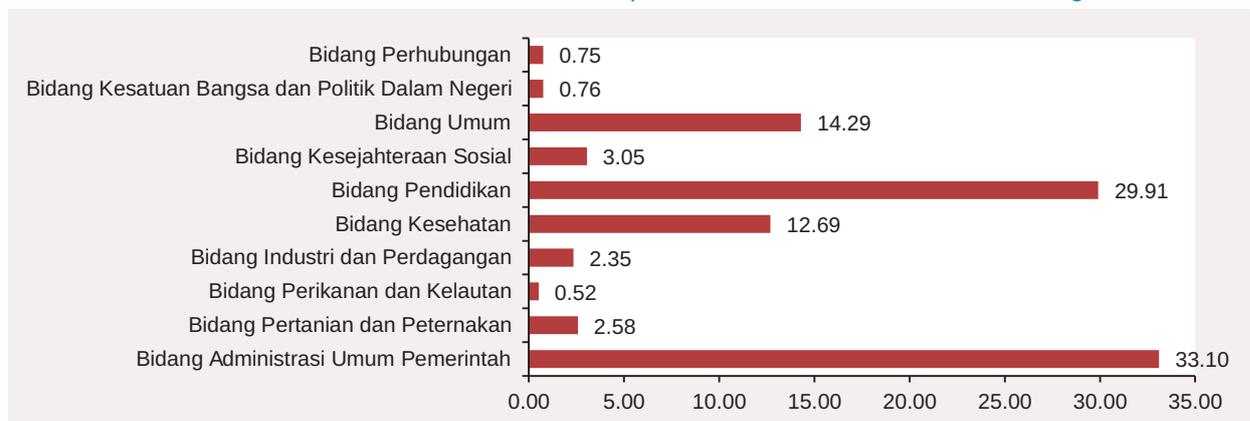


Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

Melalui alokasi dana otsus terhadap perekonomian rakyat sebesar 4 persen atau sekitar Rp 3,4 miliar sesungguhnya belum mampu memberikan kontribusi yang merata bagi masyarakat. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Manokwari yang mencapai 37,8 persen atau sebanyak lebih kurang 70.300 jiwa maka rata-rata setiap penduduk miskin hanya memperoleh alokasi sekitar Rp 50.000 per tahun. Kondisi ini sesungguhnya perlu dibenahi melalui perbaikan didalam perencanaan penganggaran program pemberdayaan bagi penduduk miskin di Kabupaten Manokwari. Program perekonomian rakyat yang sudah dilakukan lebih difokuskan sektor pertanian. Pada program peningkatan ketahanan pangan dialokasikan belanja sebesar 24 persen. Program lainnya yang menunjang perekonomian rakyat yaitu perlindungan konsumen dan keragaman perdagangan yang mencapai 18 persen, peningkatan produksi hasil peternakan mencapai 11 persen dan terdapat beberapa program lainnya bidang pertanian dengan alokasi di bawah 10 persen. Program pemberdayaan masyarakat ini perlu dievaluasi untuk melihat capaian ekonomi masyarakat sehingga dapat menjadi masukan bagi perencanaan peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Manokwari.

Pembenahan perencanaan penganggaran yang mengacu pada amanat UU Otsus Papua belum dilakukan. Berdasarkan realisasi penggunaan dana Otsus pada tahun 2012, bidang Administrasi Umum Pemerintahan mendapatkan alokasi yang tertinggi yaitu 33,09 persen dan yang terendah pada bidang Perikanan dan Kelautan sebesar 0,52 persen. Sedangkan untuk bidang Kesehatan hanya mencapai 12,69 persen dari 15 pautan yang diamanatkan oleh undang-undang otonomi khusus, sedangkan Pendidikan mencapai 30 persen.

Gambar 6.13. Alokasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten Manokwari Berdasarkan Bidang, Tahun 2012



Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten Manokwari, 2012

6.5. Kesimpulan dan Rekomendasi

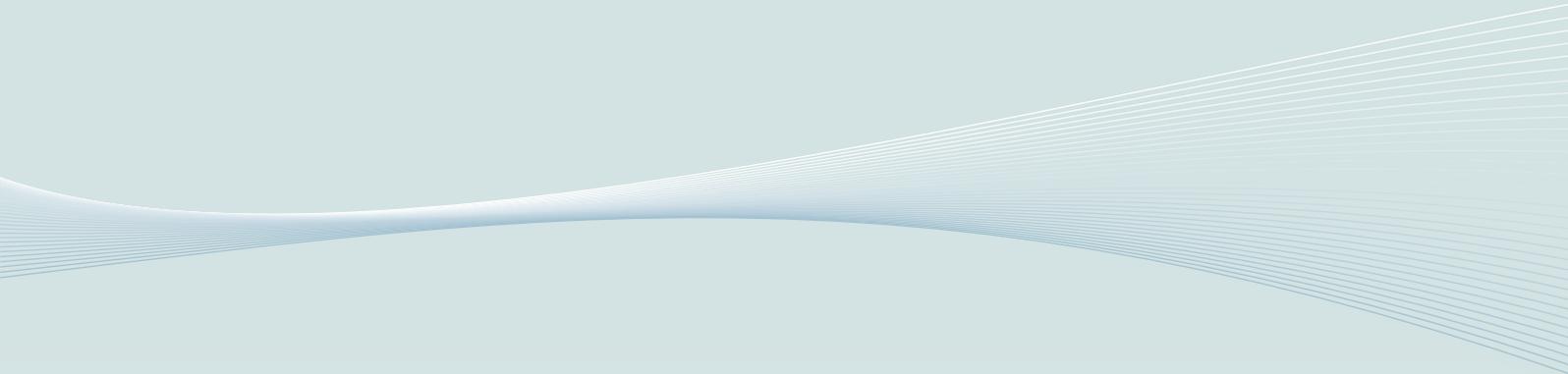
Tingkat kemiskinan masih sangat tinggi, kasus KDRT tinggi dan terus menunjukkan peningkatan, serta kasus HIV/AIDS tidak menunjukkan arah perbaikan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada aspek lainnya tingkat keterlibatan perempuan mengalami penurunan walaupun terjadi peningkatan kualitas di tahun 2011. Seiring dengan itu tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perempuan merupakan korban utama dari tindakan KDRT dan mereka sebagian besar adalah ibu rumah tangga ditambah pula kasus HIV/AIDS merupakan permasalahan sosial yang menjadi ancaman karena dalam kurun waktu tiga tahun (2010-2012), rata-rata pertumbuhan kasus HIV/AIDS sebesar 6,32 persen per tahun dan resiko tertinggi dialami oleh ibu rumah tangga. Hal-hal yang perlu dilakukan ke depan, antara lain: (1) penyusunan *masterplan* pengentasan kemiskinan, masterplan pencegahan dan penanggulangan KDRT, masterplan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Manokwari; (2) Intensifkan koordinasi kebijakan, implementasi dan monitoring program pengentasan kemiskinan, pencegahan/penanggulangan KDRT, dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Manokwari; (3) Perlu adanya upaya serius untuk memberikan konseling rumah tangga kepada keluarga yang mengalami KDRT. Pendekatan secara *persuasive* kepada keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak maupun melalui pendekatan kekeluargaan dan keagamaan perlu dilakukan agar tidak memberikan dampak terhadap perkembangan anak; (4) Pemberian pemahaman tentang deteksi dini HIV/AIDS perlu untuk dilakukan agar mata rantai penyebarannya dapat dikurangi. Berbagai obat telah ditemukan dan telah tersedia di berbagai apotik, puskesmas maupun rumah sakit baik yang bersumber dari pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat serta NGO. Sehingga diharapkan rantai HIV/AIDS dapat dikurangi bahkan dihentikan.

Dana otonomi khusus belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat melalui empat pilar pembangunan daerah. Akibatnya, program-program pendidikan dan kesehatan serta ekonomi kerakyatan belum mampu menyentuh sarannya sehingga tambahan dana Otsus belum berperan signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi yang diajukan, khususnya prioritas alokasi otonomi khusus tetap harus dipertahankan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, namun perlu digiatkan untuk pembukaan wilayah yang terisolir. Wilayah terisolir dan terpencil di Kabupaten Manokwari hingga saat ini masih ada yang belum dapat terjangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Sehingga dengan adanya otonomi khusus maka keterisolasian wilayah dapat terbuka dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dapat bertumbuh.

Daftar Pustaka

APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2007, Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2007
APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2008, Peraturan Daerah No. 41 Tahun 2007
APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2008, Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2009
APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2009, Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2010
APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2010, Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2010
APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2010, Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2011
APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2011, Peraturan Daerah No. Tahun 2011
BPS, Kabupaten Manokwari Dalam Angka, Tahun 2008 – 2012
BPS, Provinsi Papua Barat Dalam Angka, Tahun 2008 – 2012
Ikhtisar Hasil pemeriksaan LKPD BPK RI, Tahun 2012
IPM Provinsi Papua Barat, Tahun 2009 – 2012
Laporan Pemeriksaan BPK, Tahun 2012
Laporan Realisasi Dana Otsus Provinsi Papua Barat dan Kabupaten , Tahun 2007 – 2011
Lakip Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari , Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Manokwari 2012





Lampiran

Lampiran A: Matriks Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab Pendahuluan	
Kesimpulan	Rekomendasi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari yang melambat dalam beberapa tahun terakhir telah berdampak terhadap peningkatan tingkat pengangguran terbuka.	Pemerintah Kabupaten Manokwari perlu memberi perhatian sungguh-sungguh terhadap pengembangan sektor pertanian dan memfasilitasi pengembangan industri pengolahan terutama hasil produksi pertanian.
Kualitas sumberdaya manusia masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan Kabupaten Manokwari	Posisi Kabupaten Manokwari sebagai ibukota provinsi dan pusat pertumbuhan ekonomi mengharuskan pemerintah Kabupaten Manokwari untuk memberi perhatian terhadap masalah kualitas SDM. <ol style="list-style-type: none"> a). Perhatian perlu difokuskan pada upaya pemberantasan buta huruf dan perluasan lapangan kerja b). Peningkatan program akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama bagi masyarakat kurang mampu. c). Mengembangkan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah terutama industri rumah tangga.
Bab Keuangan Daerah	
Perencanaan dan penganggaran daerah belum ditetapkan tepat waktu dan tidak didukung oleh tersedianya peraturan perundang-undangan daerah secara komprehensif	<ol style="list-style-type: none"> a) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang belum tersedia secara tepat waktu (RPJMD, Renstra, APBD). b) Kerangka perundangan yang terkait dengan standar pelayanan dasar, peraturan daerah mengenai penanaman modal dan standar harga perlu disahkan. c) Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Praktik pelaksanaan anggaran yang meliputi: pengelolaan kas, pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, investasi, akuntansi dan pelaporan, serta investasi, hutang dan hibah belum sepenuhnya efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> a) Diterbitkan SK Kepala Daerah tentang pedoman penatausahaan aset/ barang milik daerah. b) Dibuat /disusun rencana tahunan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah di SKPD. c) Dibuat Perda tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna atau kuasa pengguna, penyimpan dan pengurus yang karena perbuatannya merugikan daerah. d) Dilakukan inventarisasi dan penilaian aset daerah dalam bentuk KIR dan KIB. e) Peningkatan kualitas SDM pemerintah daerah dalam praktik pelaksanaan anggaran
Pengadaan barang dan jasa belum didukung oleh Panitia pengadaan barang yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> a) Panitia pengadaan barang harus bersertifikat pengadaan barang dan jasa b) Perlu adanya pembenahan sistem pengawasan dan audit penanggung jawab anggaran atas pengadaan barang belum berjalan dengan baik.
Akuntansi dan pelaporan belum didukung oleh kapasitas SDM dan kelembagaan yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> a) Kepala bidang atau bagian di SKPKD harus berlatarbelakang pendidikan atau pengalaman akuntansi dan keuangan. b) Staf SKPKD berlatar belakang D3 akuntansi atau keuangan lebih tinggi dari 10 persen. c) Pejabat penatausahaan keuangan harus berlatar belakang akuntansi atau keuangan. d) Pelatihan akuntansi dan penatausahaan keuangan harus dilakukan rutin diikuti staf keuangan SKPD. e) Laporan keuangan dan laporan Kinerja harus dihasilkan dari satu sistem dimana SKPD harus menyusun laporan Kinerja. f) Staf baru wajib mengikuti pelatihan pengenalan sistem perencanaan dan penganggaran keuangan daerah.

Kesimpulan	Rekomendasi
Pengelolaan Hutan Hibah dan Investasi publik belum didukung oleh lembaga legislatif	<ul style="list-style-type: none"> a) Dibuat pedoman kebijakan tentang total pinjaman pemerintah daerah. b) Dibuat peraturan mengenai penerimaan, pencatatan, pengelolaan dan pelaporan hibah. c) Disediakan dana pendampingan hibah yang tercantum di DPA SKPD. d) Dipublikasikan Informasi terhadap penerimaan dan kegiatan yang dibiayai Hibah.
Pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui audit eksternal dan internal serta pengawasan yang efektif dan independen belum sepenuhnya terwujud	<ul style="list-style-type: none"> a) SDM inspektorat yang berlatar belakang akuntansi ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang. b) Dilakukan pelatihan secara rutin bagi auditor, Alokasi dana operasional inspektorat minimal 2 persen dari APBD. c) Dilakukan publikasi laporan keuangan, LPPD, LHP-BPK melalui media massa setempat, papan pengumuman atau website. d) DPRD harus memasukkan dalam tatib tentang pelibatan masyarakat menghadiri sidang APBD yang membahas pertanggungjawaban dan hasil audit BPK.
Bab Pendapatan Daerah	
Ketergantungan fiskal Kabupaten Manokwari masih sangat tinggi selama periode 2007-2011	<ul style="list-style-type: none"> a) Perluasan basis penerimaan PAD melalui pembayar pajak/retribusi dan menajaring wajib pajak/retribusi baru, peningkatan basis data obyek pajak/retribusi, penilaian kembali (appraisal) atas obyek pajak/retribusi. b) Pengendalian atas kebocoran pendapatan dari pajak dan retribusi melalui audit pendapatan baik rutin maupun insidental, perbaikan sistem akuntansi penerimaan daerah, peningkatan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pungutan liar. c) Melakukan pengkajian akademik terhadap penyebab menurunnya penerimaan PAD. d) Menindaklanjuti pemberlakuan secara efektif UU No. 28 Tahun 2009 dimana akan dilimpahkan kewenangan PBB (Perdesaan-Perkotaan) dan BPHTB ke kabupaten/kota, maka persiapan dari segi kelembagaan regulasi, SDM serta sarana dan prasarana perlu dipikirkan dengan baik, sehingga pelimpahan kewenangan pemungutan tersebut dapat meningkatkan PAD melalui pajak daerah. e) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu dilakukan persiapan terkait dengan Sumber Daya manusia beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Bab Belanja Daerah	
Belanja daerah di Kabupaten Manokwari mengalami perkembangan yang cukup lambat dan cenderung berfluktuasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Tetap memperhatikan porsi belanja modal melalui penghematan belanja pada barang dan jasa. b) Penyusunan perencanaan dan penganggaran secara konsisten dan disiplin perlu dikedepankan, lebih berbasis pada data, dan disinkronisasikan sesuai dengan target pencapaian dalam RPJMD

Kesimpulan	Rekomendasi
Berdasarkan klasifikasi sektor, alokasi belanja untuk pemerintahan umum lebih mendominasi dibandingkan dengan alokasi belanja untuk sektor lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a) Kebijakan peningkatan porsi belanja sektor infrastruktur dan sektor pertanian. b) Perlu kerjasama dengan pihak swasta untuk mendorong pengembangan sektor infrastruktur. c) Menciptakan iklim yang kondusif agar sektor swasta dapat berpartisipasi untuk melakukan investasi di berbagai bidang. d) Penyusunan perencanaan dan penganggaran secara konsisten terutama pada saat penyusunan renja dan RKA SKPD agar program dan kegiatan prioritas memperoleh alokasi belanja yang cukup memadai. e) Porsi belanja untuk pendidikan tetap dipertahankan sesuai dengan regulasi 20%
Bab Sektor Strategis	
Sektor Pendidikan	
Rasio murid dengan guru pada setiap tingkatan dapat dikatakan cukup ideal walaupun belum memenuhi standar indikator SPM	Dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dan menurunkan angka putus sekolah, sehingga capaian yang diperoleh sesuai target target SPM (Standar Pelayanan Minimum), maka perlu dilakukan pembenahan pada semua jenjang pendidikan terutama dalam distribusi dan kompetensi guru serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Sektor Kesehatan	
Program, kegiatan dan alokasi anggaran secara umum belum mampu meningkatkan kinerja luaran dan hasil di sektor kesehatan. Kondisi ini diperburuk oleh alokasi belanja yang mengalami penurunan. Program perbaikan sarana dan prasarana pendukung kesehatan belum mampu mengimbangi jumlah penduduk dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan alokasi kesehatan terutama untuk mendukung program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pelayanan terutama sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. b) Perencanaan dan penganggaran alokasi belanja sektor kesehatan berbasis data untuk pencapaian target prioritas sesuai dengan RPJMD. c) Peningkatan program pengadaan obat-obatan dan peralatan kesehatan terutama untuk penanganan HIV/AIDS.
Sektor Infrastruktur	
Secara umum kondisi jalan di Kabupaten Manokwari berdasarkan kewenangan Pemda Manokwari belum menunjukkan kondisi perbaikan, hal ini perlu mendapat perhatian khusus agar pembukaan jalan dengan permukaan tanah senantiasa dapat menunjang akan perekonomian masyarakat secara merata.	Diperlukan perencanaan dan metode valuasi yang lebih memadai mengenai seberapa besar belanja yang harus dialokasikan (misalnya irigasi dan jalan menuju sentra produksi pertanian dan pemasaran) untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas sektoral lainnya seperti pertanian yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Manokwari.
Sektor Pertanian	
Pertanian masih menjadi sektor unggulan di Kabupaten Manokwari. Rata-rata belanja untuk sektor pertanian mengalami penurunan selama 5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan alokasi belanja untuk sektor-sektor ekonomi unggulan di sektor pertanian. b) Pembenahan perencanaan penganggaran perlu dilakukan berdasarkan sentra-sentra produksi pertanian bahkan pada setiap distrik perlu dikembangkan spesialisasi produksi pertanian yang sesuai dengan kondisi distrik tersebut. c) Program peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan kualitas produk dari sisi permodalan, produksi, manajemen, maupun pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk pertanian

Kesimpulan	Rekomendasi
	Bab Isu-isu Strategis
Tingkat kemiskinan masih sangat tinggi, kasus KDRT tinggi dan terus menunjukkan peningkatan, serta kasus HIV/AIDS tidak menunjukkan arah perbaikan signifikan dalam lima tahun terakhir	<p>a) Penyusunan masterplan pengentasan kemiskinan, masterplan pencegahan dan penanggulangan KDRT, masterplan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Manokwari.</p> <p>b) Intensifkan koordinasi kebijakan, implementasi dan monitoring program pengentasan kemiskinan, pencegahan/penanggulangan KDRT, dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Manokwari.</p> <p>c) Perlu adanya upaya serius untuk memberikan konseling rumah tangga kepada keluarga yang mengalami KDRT. Pendekatan secara persuasif kepada keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak maupun melalui pendekatan kekeluargaan dan keagamaan perlu dilakukan agar tidak memberikan dampak terhadap perkembangan anak.</p> <p>d) Pemberian pemahaman tentang deteksi dini HIV/AIDS perlu untuk dilakukan agar mata rantainya penyebarannya dapat dikurangi.</p>
Dana otonomi khusus belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat melalui empat pilar pembangunan daerah	Prioritas alokasi otonomi khusus tetap harus dipertahankan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, namun perlu digiatkan untuk pembukaan wilayah yang terisolir

Lampiran B: Master Tabel

B1. Pendapatan Berdasarkan Sumber (juta rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011
PENERIMAAN					
PAD	20,352.40	28,386.19	27,085.40	28,763.97	21,959.99
Pajak Daerah	3,176.81	3,877.14	5,283.16	5,529.08	6,382.07
Pajak Hotel	635.41	1,002.45	1,057.75	1,127.57	1,414.99
Pajak Restoran	318.78	730.95	599.69	663.29	685.26
Pajak Hiburan	58.02	74.45	52.70	79.62	84.66
Pajak Reklame	1,022.13	1,132.91	1,644.46	1,547.81	1,522.39
Pajak Penerangan Jalan	590.74	529.10	800.73	1,276.98	942.50
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	527.73	383.27	1,091.83	797.81	117.74
Pajak Parkir	-	-	-	-	-
Pajak Air Tanah	24.00	24.00	36.00	36.00	1,614.52
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
Pajak Lingkungan	-	-	-	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Bangunan	-	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	-	-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Retribusi Daerah	3,249.08	3,121.33	3,447.34	3,368.21	3,333.86
Retribusi Jasa Umum	1,702.53	1,582.92	1,624.70	1,539.87	1,601.74
Retribusi Jasa Usaha	805.14	831.88	1,179.26	1,019.82	935.91

	2007	2008	2009	2010	2011
Retribusi Perizinan Tertentu	741.41	706.53	643.38	808.52	796.22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,397.71	6,870.79	9,061.85	8,295.11	6,131.11
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	5,397.71	6,870.79	9,061.85	8,295.11	6,131.11
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	-	-	-	-	-
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8,528.80	14,516.94	9,293.05	11,571.57	6,112.95
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1,333.56	1,370.39	1,340.09	655.00	491.90
Jasa Giro	897.05	907.55	1,342.68	652.34	493.73
Pendapatan Bunga Deposito	1,604.12	1,555.71	2,210.38	1,585.18	28.40
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	-	-	-	-	-
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	361.15	1,551.08	1,002.66	715.76	462.76
Pendapatan Denda Pajak	-	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	0.95	-	-
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	-	-	-	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian	4,072.80	8,912.22	3,197.66	7,870.05	4,547.15
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	260.13	219.98	198.64	93.25	89.00
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	-	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	913,580.48	-	-	-	-
Pendapatan lain-lain	-	-	-	-	-
Penerimaan dari unit kerja	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan	484,637.87	510,759.87	545,727.75	568,964.84	618,521.74
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	105,705.27	114,553.27	98,583.94	117,911.37	113,860.32
Dana Bagi Hasil Pajak	98,193.19	95,884.75	90,580.12	102,309.42	103,020.62
Bagi Hasil Bukan Pajak	7,512.08	18,668.53	8,003.83	15,601.95	10,839.70
Dana Alokasi Umum	378,932.60	334,244.60	395,180.81	397,456.97	443,987.82
Dana Alokasi Khusus	50,010.00	61,962.00	51,963.00	53,596.50	60,673.60
BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	118,539.99	166,986.28	306,679.57	161,117.94	224,253.89
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	47,527.54
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	-	-	-	46,757.23
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri	-	-	-	-	770.31
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	-	-	-	-	-

	2007	2008	2009	2010	2011
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12,870.13	5,234.01	5,630.38	-	7,560.10
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	175.00	5,234.01	5,630.38	-	7,560.10
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3)	12,695.13	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3)	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 3)	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	105,669.86	128,272.32	145,104.03	140,308.74	149,691.82
Dana Penyesuaian	48,500.00	67,454.35	54,152.23	45,649.16	-
Dana Otonomi Khusus	57,169.86	60,817.96	90,951.80	94,659.58	149,691.82
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	33,479.95	155,945.16	20,809.20	19,474.42
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	-	33,479.95	155,945.16	20,809.20	19,474.42
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Dari Kota	-	-	-	-	-
lainnya	-	-	-	-	-
TOTAL	623,530.26	706,132.34	879,492.72	758,846.76	864,735.61

B2. Belanja Berdasarkan Urusan Wajib (juta rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011
Urusan Pendidikan	108,587.61	124,433.75	148,237.00	184,694.13	82,783.06
Urusan Kesehatan	51,199.46	64,888.31	71,383.03	56,472.73	72,626.95
Urusan Pekerjaan Umum	77,818.60	85,512.67	156,747.05	132,123.62	36,416.60
Urusan Perumahan Rakyat	-	-	-	9,040.99	-
Urusan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
Urusan Perencanaan Pembangunan	11,560.04	11,926.65	13,970.47	9,137.99	5,808.99
Urusan Perhubungan	7,171.15	8,268.52	7,560.88	4,589.45	3,974.30
Urusan Lingkungan Hidup	-	-	2,531.04	4,543.62	3,952.39
Urusan Pertanahan	-	-	-	-	-
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	6,700.51	8,121.12	3,911.01	3,060.89	2,914.34
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,009.57	1,993.70	6,180.03	5,870.00	8,153.55
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	-	-	-	-
Urusan Sosial	21,845.57	16,902.67	17,803.76	36,560.73	4,807.99
Urusan Ketenagakerjaan	5,366.67	4,231.56	4,328.36	6,396.35	2,665.82
Urusan Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-
Urusan Penanaman Modal	-	-	-	-	-
Urusan Kebudayaan	-	-	3,726.63	5,102.67	3,858.83
Urusan Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-

	2007	2008	2009	2010	2011
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	6,710.56	7,753.75	6,277.83	9,856.93	8,239.97
Urusan Pemerintahan Umum	223,911.35	240,940.33	266,676.54	350,474.91	245,895.05
Urusan Kepegawaian	11,691.76	11,982.22	12,935.53	15,673.00	11,431.47
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	2,510.35	2,972.11	14,360.83
Urusan Statistik	-	-	-	-	-
Urusan Kearsipan	-	-	-	-	-
Urusan Komunikasi dan Informatika	2,640.14	2,205.89	-	-	-
Perpustakaan	-	-	-	-	-
Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-
Total	539,213.00	589,161.14	724,779.52	836,570.14	507,890.12

B3. Belanja Berdasarkan Urusan Pilihan (juta rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011
Urusan Pertanian	22,996.49	17,104.89	21,652.01	26,264.62	25,901.48
Urusan Kehutanan	19,493.40	19,783.24	7,642.64	3,261.98	8,127.90
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-
Urusan Pariwisata	-	-	-	-	-
Urusan Kelautan dan Perikanan	9,687.64	16,458.71	18,746.89	10,158.25	7,319.08
Urusan Perdagangan	-	-	-	-	-
Urusan Industri	4,530.02	3,629.62	5,215.08	7,921.31	5,827.90
Urusan Ketransmigrasian	-	-	-	-	-
Total	56,707.54	56,976.47	53,256.62	47,606.16	47,176.35

B4. Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (juta rupiah)

Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi	2007	2008	2009	2010	2011
Belanja tidak langsung	178,764.58	218,010.74	258,315.15	335,618.13	212,882.38
Pegawai	141,437.41	158,982.33	174,046.64	219,291.42	174,404.66
Bunga	-	-	2,058.38	-	4,484.28
Hibah/subsidi	150.00	32,676.14	45,878.59	80,942.74	24,956.44
Bantuan Sosial	17,501.29	11,864.87	13,431.57	16,775.00	9,025.00
Bagi Hasil ke Daerah Bawahan	-	-	-	-	-
Bantuan ke Daerah Bawahan	-	-	-	-	-
Tidak Terduga	19,675.88	14,487.40	22,899.96	18,608.98	12.00
Bantuan kepada Lembaga Vertikal	-	-	-	-	-
Belanja langsung	417,155.97	428,126.87	519,721.00	548,558.17	342,184.09
Pegawai	52,792.55	48,263.04	63,434.09	53,522.02	46,306.61
Barang dan Jasa	144,849.35	160,829.11	196,315.66	233,873.54	201,854.63
Modal	219,514.07	219,034.71	259,971.25	261,162.61	94,022.86
Total	595,920.55	646,137.61	778,036.15	884,176.30	555,066.47

Lampiran C : Catatan Metodologi PERA

Laporan studi *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) terbagi atas 6 (enam) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan; Bab II Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah (PFM); Bab III Analisis Pendapatan Daerah; Bab IV Analisis Belanja Daerah; Bab V Analisis Sektor Strategis, Bab VI Analisis Isu Lokal. Setiap bab ditutup dengan sub-bab kesimpulan dan rekomendasi. Khusus untuk analisis sektor strategis, masing-masing sektor dilengkapi dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Data yang digunakan untuk analisis studi PERA secara umum dibagi atas dua kategori, yaitu (i) Data Fiskal (Keuangan Daerah), (ii) Data Non-Fiskal. Data Fiskal meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok, APBD Perubahan, dan APBD Realisasi (Pertanggungjawaban Kepala Daerah). Sementara data Non-Fiskal meliputi data makro ekonomi daerah, indikator pembangunan sosial, data kinerja *output* dan *outcome* sektor-sektor strategis (infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian), dan data pembangunan gender, serta data dokumen perencanaan.

Data Fiskal (APBD)

Seluruh data APBD diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota yang menjadi wilayah studi PERA pada lima Provinsi di Indonesia (Jawa Timur, NTB, NTT, Papua, dan Papua Barat) dalam bentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Rentang waktu data tahun 2007 hingga 2011 dengan tiga kategori data, yaitu APBD Pokok, APBD Perubahan dan APBD Realisasi. Selain itu, data rincian objek PAD diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah masing-masing kabupaten.

Data pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah seluruhnya dinyatakan dalam angka/nilai riil dengan menggunakan tahun dasar (*base-year*) 2010. Artinya, angka tersebut telah dideflator berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2010 (2010=100) atau inflasi 2010. Cara ini dilakukan untuk mengamati dan mengukur perkembangan anggaran secara riil dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2007-2011.

Bagi kabupaten studi PERA yang tidak memiliki angka inflasi, ada dua alternatif yang dapat dilakukan untuk menghitung data keuangan secara riil yaitu: (i) menggunakan angka inflasi yang terdekat dengan kabupaten tersebut, (ii) menghitung melalui PDRB deflator.

Data APBD dipergunakan untuk menganalisis 3 bab dalam struktur Laporan PERA yaitu: (i) Bab III Pendapatan daerah yang meliputi gambaran pendapatan pendapatan daerah kabupaten PERA, Struktur pendapatan daerah dan analisis pembiayaan daerah, (II) Bab IV Belanja daerah yang meliputi Gambaran umum perkembangan belanja daerah, belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi, dan belanja daerah berdasarkan sektor, (iii) Bab V Isu Strategis khususnya menganalisis besaran alokasi belanja untuk masing-masing sektor-sektor strategis.

Analisis belanja untuk sektor strategis meliputi sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Data belanja sektor infrastruktur merupakan penggabungan atau penjumlahan belanja urusan pekerjaan umum, urusan permukiman, dan urusan perhubungan; Data belanja sektor pendidikan merupakan penjumlahan belanja urusan pendidikan, urusan kebudayaan dan urusan perpustakaan; Data belanja sektor kesehatan adalah belanja urusan kesehatan; dan data belanja sektor pertanian merupakan penjumlahan dari belanja urusan pertanian dan urusan ketahanan pangan. Selain itu, beberapa kabupaten menganalisis belanja pembangunan gender yang diproxy dari belanja urusan pemberdayaan perempuan dan urusan buruh migran; dan belanja pada urusan Kesbangpolinmas terkait dengan mitigasi bencana.

Selain data APBD, data APBN juga dianalisis terutama pada bagian belanja daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran besaran dana APBN yang dibelanjakan di masing-masing kabupaten yang menjadi studi PERA, baik berdasarkan organisasi, maupun berdasarkan fungsi.

Khusus untuk Pengelolaan Keuangan Daerah (PFM) dianalisis dengan menggunakan hasil survey. Penilaian keuangan daerah mencakup aspek: (1) kerangka peraturan perundang-undangan; (2) perencanaan dan penganggaran; (3) pengelolaan kas; (4) pengadaan barang dan jasa; (5) akuntansi dan pelaporan; (6) pengawasan internal; (7) hutang dan investasi publik; (8) pengelolaan aset; dan (9) audit dan pengawasan eksternal. Kesembilan aspek tersebut dikelompokkan menjadi ke dalam tiga (3) bidang strategis, yakni: (1) perencanaan dan penganggaran; (2) pelaksanaan anggaran; dan (3) *oversight* dan akuntabilitas. Setiap bidang terdiri atas beberapa sub-bidang strategis dan setiap sub-bidang strategis terdiri atas beberapa pertanyaan (indikator penilaian).

Bidang Strategis	Sub-Bidang Strategis	Indikator
Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> Apakah tersedia perencanaan dan penganggaran multi tahun, RPJMD, Renstra, dan Renja SKPD? Apakah target anggaran disusun realistis? Apakah terdapat sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif?
	TAPD dan Tupoksinya	<ul style="list-style-type: none"> Apakah setiap elemen dalam TAPD menjalankan tupoksinya? Apakah terdapat evaluasi terhadap tupoksi? Bagaimana kapasitas perencanaan dan penganggaran di SKPD? Apakah koordinasi antar unit kerja sudah efektif?
	Pembahasan APBD di DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana proses pembahasan? Bagaimana ketepatan waktu pembahasan APBD-APBD P? Bagaimana ketepatan waktu pengesahan APBD-APBDP? Apakah target anggaran disusun secara realistis? Permasalahan apa yang ditemukan?
	Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Apakah dokumen perencanaan dan penganggaran, terutama APBD, dapat diakses oleh publik? Apakah disusun anggaran kas sebagai mekanisme pengendalian dan pengukuran kinerja? Apakah ada MIS yang digunakan? Bagaimana keterkaitannya dengan MIS lain? Apakah ada konsistensi antara RPJMD- RPKD dan RPKD-APBD?
Pelaksanaan Anggaran	Institusi PKAD	<ul style="list-style-type: none"> Apakah sudah terbentuk SKPD Pengelola Keuangan dan aset daerah? Bagaimana struktur institusi PKD? Apakah terdapat kerangka transparansi dan keterlibatan publik
	Kondisi SDM Pengelola Keuangan Daerah (PKD)	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana kondisi SDM PKD, baik di SKPKD dan SKPD? Apakah SDM PKD telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis secara terencana dan memadai?
	Kerangka Regulasi PKD	<ul style="list-style-type: none"> Apakah kerangka regulasi daerah untuk PKD sudah tersedia? Apakah terdapat kebijakan, prosedur dan pengendalian untuk pengelolaan kas yang efisien dan efektif?
	Optimalisasi PAD	<ul style="list-style-type: none"> Apakah terdapat sistem penagihan dan pemungutan PAD yang efisien? Apakah PAD sudah dikumpulkan secara optimal berdasarkan potensi daerah? Bagaimana dengan penerapan UU 28/ 2009?
	E-Procurement	<ul style="list-style-type: none"> Apakah Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sudah terbentuk dan berfungsi?
	Sistem Informasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> Apakah ada SIM yang digunakan? Bagaimana keterkaitannya dengan SIM lain? Bagaimana pencatatan sebuah aset dan cara menilai aset? Apakah transaksi keuangan pemerintah tercatat secara akurat dan disajikan tepat waktu? Apakah laporan keuangan dan informasi manajemen dapat diandalkan?
Oversight dan Accountability	Struktur dan Kondisi SDM Pemeriksa	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana struktur dan kondisi SDM Inspektorat?
	Standar dan proses audit internal	<ul style="list-style-type: none"> Apakah Inspektorat mempunyai SOP dan bisa menjalankan tugasnya secara efektif? Apakah Standar dan proses audit internal dapat diaplikasikan dengan baik? Apakah program audit secara reguler dikaji dan direvisi? Apakah ada temuan signifikan dari internal audit?
	Audit Eksternal dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Apa saja temuan penting pada LHP LKPD beberapa tahun terakhir? Bagaimana tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut? Bagaimana status opini LHP LKPD selama 5 tahun terakhir?
	Akses Publik atas LKPD dan LHP	<ul style="list-style-type: none"> Apakah Publik dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan audit? Apakah LKPD dan LHP LKPD dipublikasikan ke masyarakat?
	Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Apakah terdapat kebijakan, prosedur serta pengendalian pinjaman dan investasi daerah?

Para responden diminta untuk menjawab “Ya” atau “Tidak” untuk setiap pertanyaan yang diwakili oleh masing-masing indikator. Skor dihitung berdasarkan presentase jawaban “Ya”. Jawaban “Ya” diberi score 1 dan 0 untuk jawaban “Tidak”. Untuk menjamin akurasi data, maka setiap jawaban “Ya” harus didukung oleh kelengkapan dokumen terkait dan atau diperiksa silang dengan responden tambahan. Tidak semua sub-bidang strategis memiliki jumlah indikator yang sama, sehingga berimplikasi terhadap bobot penilaian.

Responden PFM meliputi SKPD seperti Bappeda, Bagian Hukum Setda, bagian Keuangan Setda, bagian Humas Dinas Komunikasi dan Informasi, Seketaris DPRD, Bagian Akuntansi, Pembukuan dan Verifikasi BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengawasan Daerah, Inspektorat Daerah, dan beberapa lainnya. Bukti-bukti dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran seperti RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, APBD, dan dokumen lainnya. Interpretasi hasil analisis PFM dalam studi PERA menggunakan dua metode yaitu metode perbandingan dan metode pengkategorian yang telah dilakukan oleh Word Bank. Metode perbandingan relatif yang dimaksud adalah interpretasi hasil yang didasarkan pada perbandingan relatif dari capaian skor antar sub-bidang strategis dalam setiap bidang strategis.

Metode pengkategorian adalah interpretasi hasil yang mengacu pada standar Bank Dunia dengan pemberian nilai sebagai berikut:

80 – 100	kategori sempurna/dapat diterima sepenuhnya
60 - 79	kategori sangat baik
40 - 59	kategori baik
20 - 39	kategori sedang/cukup
0 - 19	kategori kurang/tidak dapat diterima

Beberapa laporan studi PERA menggunakan metode perbandingan relatif dan beberapa lainnya menggunakan metode yang dikembangkan Bank Dunia.

Data Non-Fiskal

Data non-fiskal digunakan untuk menganalisis Bab I Pendahuluan terkait dengan gambaran umum perekonomian kabupaten meliputi kinerja makro ekonomi dan pembangunan sosial; Bab V Analisis Sektor Strategis meliputi kinerja *output* dan *outcome* sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian; Bab VI Analisis Isu Lokal meliputi isu kemiskinan, isu gender, isu HIV/AIDS, dan Otonomi Khusus.

Seluruh data non-fiskal diperoleh dari publikasi BPS seperti Daerah Dalam Angka, Statistik Daerah, Indikator Kesejahteraan Sosial, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Hasil Sensus Penduduk 2010, dll. Beberapa data teknis-sektoral diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA diperoleh dari Bappeda, dan SKPD terkait dengan sektor strategis.

Seluruh data non-fiskal dianalisis dengan menggunakan model analisis statistik-deskriptif untuk series 2007-2011 kecuali untuk Bab II Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah (PFM) dan data isu lokal terutama terkait dengan isu gender, dan HIV/AIDS (dianalisis sesuai dengan ketersediaan data).